

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan



SIMPOSIUM PENGAJARAN SEJARAH

(Kumpulan Makalah Diskusi)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1998

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan



SIMPOSIUM PENGAJARAN SEJARAH

(Kumpulan Makalah Diskusi)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1998

SIMPOSIUM PENGAJARAN SEJARAH(Kumpulan Makalah Diskusi)

Penyunting : Restu Gunawan

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

**Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat
Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan**

Edisi I 1998

Dicetak oleh : CV. EKA DHARMA

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

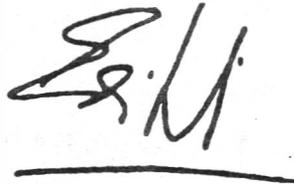
Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Projek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya proyek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Buku dengan judul *Simposium Pengajaran Sejarah ini*, merupakan kumpulan makalah simposium tentang pengajaran sejarah. Simposium tersebut merupakan salah satu pelaksanaan kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi sejarah Nasional, Direktorat sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diadakan di Hotel Ria Diani Cibogo - Bogor, 25-28 Desember 1997.

Simposium tersebut membahas berbagai aspek mengenai pengajaran sejarah. Diantaranya tentang proses belajar mengajar, materi pengajaran sejarah, alat peraga dan visualisasi pelajaran sejarah, buku-buku paket, guru sejarah dan guru pengajar sejarah serta kemungkinan pengembangan dimensi-dimensi tersebut dimasa yang akan datang.

Penerbitan kumpulan makalah simposium ini dimaksudkan untuk memberi informasi kepada masyarakat yang berkecimpung dalam dunia kependidikan terutama tentang permasalahan-permasalahan di dalam sistem pengajaran sejarah.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat memberi informasi yang memadai pada bidang pendidikan sejarah dan juga masyarakat yang berminat pada kajian tersebut. Disamping itu

diharapkan dapat menjadi bahan bagi peningkatan mutu pengajaran sejarah serta kesadaran sejarah masyarakat pada umumnya.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan buku ini kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, September 1998

**Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G.A. Ohorella', with a horizontal line underneath.

G.A. Ohorella
NIP. 130 370 094

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktorat Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan Dalam Acara Pembukaan Simposium Pengajaran Sejarah dan Diskusi Ilmiah Bandar Jalur Sutra	1
Cakupan Tugas Simposium Pengajaran Sejarah	7
Pengajaran Sejarah Sebagai Wahana Pendidikan Nilai dan Sikap, oleh Prof. Dr. Soedijarto MA	11
Organisasi Profesi Kesejarahan dan Peningkatan Mutu Pengajaran Sejarah, oleh Taufik Abdullah	43
Kebijakan dan Pelaksanaan Pendidikan Sejarah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, oleh Prof. Dr. S. Hamid Hasan	62
Dasar Filosofis Kurikulum Sejarah, oleh Dr. Hafid Abbas....	79
Landasan Filosofis Kurikulum Pengajaran Sejarah (SMU) Tantangan dan Harapan, oleh Prof. Dr. Rochiyati Wiriatmodjo	92

Penulisan Buku Teks Sejarah : Kriteria dan Permasalahannya, oleh Prof. Dr. Helius Sjamsuddin	103
Persepsi Pelajar Terhadap Pelajaran Sejarah, oleh Nina Febriana.....	120
Upaya Standarisasi Kompetensi Guru Sejarah, oleh Dr. Diana Nomida Musnir	125
Rumusan Hasil Simposium Pengajaran Sejarah	137

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DALAM ACARA PEMBUKAAN SIMPOSIUM PENGAJARAN
SEJARAH DAN DISKUSI ILMIAH BANDAR JALUR SUTRA
TANGGAL 26 DESEMBER 1997**

Saudara Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional dan Ketua Panitia Pelaksana dan Prof. Dr. Taufik Abdullah Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera

Om Swasti Astu

Acara ini memang acara yang kata kuncinya adalah penghematan, ngirit. Dua program ini dijadikan satu untuk menghemat, maksudnya supaya sekaligus hadirin dari kedua kegiatan ini, yaitu Simposium Pengajaran Sejarah dan Diskusi Ilmiah Jalur Sutra, bisa saling menyimak dalam kesempatan yang sama. Juga ngirit waktu rupanya. Biasanya dalam upacara pembukaan begini setelah ketua Panitia, Direktornya begitu ya, jadi sekarang sekaligus mewakili direktur, dan sekaligus mewakili Ketua Panitia karena Bu Sutji tadi lupa mengumumkan bahwa pemakalah kunci tidak ada, tetapi dijadikan pemakalah biasa dari Pak Soediarso. Karena beliau tidak bisa hadir, jadi akan dibahas setelah makalah Pak Taufik.

Jadi kita menghadapi dua acara. Yang pertama adalah pengajaran sejarah, yang memang senantiasa kita rasakan bersama sebagai suatu masalah yang aktual karena pada umumnya kita selalu ada kekurangpuasan terhadap pengajaran sejarah yang sudah ada di dalam dunia pendidikan kita. Sudah tentu pengajaran sejarah ini meskipun sekarang hanya masuk dalam sub salah satu judul mata pelajaran yang tidak menyebut sejarah tetapi inti yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa sejarah itu mesti diajarkan. Adalah suatu yang tidak pada tempatnya bilamana suatu bangsa tidak mengerti sejarahnya. Tujuannya sudah tentu untuk menumbuhkan kesadaran sejarah yaitu kesadaran sejarah pada peserta didik. Nah kesadaran sejarah ini apa saja komponennya saya tidak dapat menentukan sendiri. Di sini banyak hadir ahli-ahli pendidikan, guru-guru, praktisi di dunia pelajaran sejarah ini. Seberapa jauhkah sudah dirumuskan dengan tepat tujuan-tujuan instruksional, tujuan-tujuan kurikuler dari pengajaran sejarah di sekolah-sekolah umum ini? Memang ada dua aspek dari isi pengajaran sejarah yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu di satu sisi pemahaman konsep dan di sisi lain pengetahuan akan fakta. Mungkin kalau melihat buku-buku wajib sejarah kita, kelihatan bahwa pedomannya masih pada pengetahuan fakta-fakta. Kita barangkali perlu lebih mempertajam pemahaman konsep yang bagaimana yang kita sasar pada waktu kita pelajarkan sejarah. Di sinilah maka terlihat ada dua permasalahan di dalam pengajaran sejarah ini, yaitu yang *pertama* adalah masalah penjenjangan, artinya bagaimana kita menentukan perbedaan-perbedaan sasaran, baik dari segi pemahaman konsep maupun pengetahuan fakta, dari kelas satu SD sampai kelas tiga SMA. Dan yang *kedua* adalah masalah metode pengajaran dan penyediaan bahan ajar. Menyatukan metode harus begini begitu, tentu tidak cukup kalau tidak juga disertai dengan usaha yang terarah untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai untuk tuntutan metode itu. Mungkin yang dibaca sepintas dari kondisi yang ada adalah pengajaran kita terlalu satu arah, terlalu kurang mengaktifkan siswa, dan sebagainya. Tetapi kalau mengaktifkan siswa bahan ajarnya apa, sumber belajarnya apa?. Dan kalau boleh saya usul sebagai salah satu pendapat yang mungkin juga salah, untuk penjenjangan ini, misalnya kita bagikan studi dalam pelajaran sejarah ini atas lima jenjang kalau saya bisa kira-kira :

Jenjang pertama adalah SD kelas 1 sampai kelas 3
Jenjang kedua adalah SD kelas 4 sampai kelas 6
Selanjutnya adalah SMP, SMA, lalu perguruan tinggi

Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 konsep yang diajarkan sederhana saja yaitu tentang adanya kita dan mereka, kita bangsa Indonesia dan bangsa lain. Bahwa kita bangsa Indonesia perlu merdeka. Mungkin itu pengertian pertama yang perlu diajarkan. Oleh karena itu fokusnya pada masa kini, seperti juga analogi dengan pelajaran geografi, di mana akan saling efektif apabila diajarkan dulu mengurai geografi di sekitar tempat tinggalnya, baru kemudian meluas sampai ke dunia. Kemudian untuk jenjang SD kelas 4 sampai kelas 6 masih sama tentang pengertian konsep dasarnya, adalah tentang kita dan mereka, tetapi diberikan suatu ulasan yang menyeluruh tentang zaman kolonial. Jadi sudah lebih jauh ke belakang, tidak hanya sekitar kemerdekaan itu. Indonesia merdeka dari penjajah tetapi juga pengalaman dijajah itu bagaimana, itu sudah mulai diberikan. Barangkali mulai kenal pahlawan-pahlawan itu di situ.

Kemudian SMP, ini sudah tentu, sudah lebih paham seseorang anak, seperti halnya saya ingat pada waktu SMP dulu bagaimana menariknya guru sejarah ini karena mampu memberikan imajinasi mengembangkan daya apa, bukan imajinasi yang ngawur tetapi bisa membayangkan adanya pencapaian-pencapaian kerajaan-kerajaan besar kita di masa lalu begitu. Jadi pencapaian-pencapaian kerajaan di masa itu mungkin cocok untuk SMP lalu kemudian SMA sudah tentu sudah lebih dalam sehingga baru SMA inilah kiranya diberikan lintasan sejarah dari prasejarah hingga masa kemerdekaan lagi dengan menunjuk kepada masa prasejarah seperti membedakan fondasi kepada kebudayaan tata masyarakat Indonesia dan untuk dikembangkan lebih jauh sehingga di sini yang dituju adalah bahwa sebetulnya memang kita punya akar-akar sejarah dan budaya di dalam menjalani sejarah masa lalu khususnya dan sejarah selanjutnya. Nah sudah tentu kemudian di perguruan tinggi kita lebih jauh menguat peristiwa-peristiwa sejarah kita berusaha menganalisis manusia-manusia dibalik peristiwa sejarah yang di situ tinjauan kritis juga wawasan relativitas dalam penafsiran sejarah itu mulai dikembangkan di perguruan tinggi. Saya kira inilah sebetulnya masalahnya cukup

memerlukan kerja sama antara berbagai instansi karena itu Bapak Dikdasmen sebetulnya juga harapan dari kami, dari Pak Anhar ini adalah untuk acara-acara seperti ini tidak hanya sebagai formalitas kumpul-kumpul saja tetapi diharapkan ada tindak lanjut pembenahan tujuan-tujuan dari pengajaran sejarah itu acara yang pertama, yang barangkali sampai sore nanti ya Bu Sutji ?

Kemudian akan dilanjutkan dengan acara yang lain mestinya juga diselenggarakan sendiri tetapi digabungkan sebagai Jalur Sutra. Jalur Sutra ini adalah suatu proyek "*world decade for cultural development*", jadi suatu dasawarsa pengembangan kebudayaan dunia yang dimulai tahun 1988 dan berakhir tahun ini tahun 1997. Ini suatu proyek dari UNESCO. Dan UNESCO telah mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka ini antara lain ada ekspedisi dan pengkajian-pengkajian jalur sutra melewati darat dan jalur sutra melewati laut. Dan wakil Indonesia waktu itu untuk membahas daerah-daerah dari program ini adalah Prof. Dr. AB. Lopian. Beliau turut merumuskan apa-apa yang perlu di perlukan antara lain beliau sendiri memang mengikuti pelayaran napak tilas dari Oman sampai ke Osaka melewati berbagai bandar yang historis dan di sepanjang bandar itu diadakan seminar-seminar sejarah tahun 1991 (kalau tidak salah). Jadi kita dari Ditjarahnitra juga menyambut program internasional dengan membuat program nasional yaitu suatu kajian bandar-bandar perdagangan yang langsung tak langsung terkait dengan jalur sutra itu. Karena itulah ada sejumlah diskusi jalur sutra yang telah diselenggarakan oleh Direktorat. Dan juga ada sejumlah penelitian sejarahnya masing-masing bandar itu. Dan inilah yang kita harapkan Pak Anhar pegang pada akhir Dasawarsa ini semua hasil penelitian bandar-bandar ini dan juga hasil diskusi jalur sutra yang telah diselenggarakan menjadi satu set penerbitan sebagai bagian dari pelaporan kegiatan kita dalam rangka pengembangan kebudayaan sudah tentu kesempatan ini sudah sangat baik untuk memikirkan selanjutnya apa yang perlu dikaji dan dibahas karena dalam pidatonya di Sidang Umum ke 29 UNESCO baru-baru ini pak Menteri P dan K juga mengemukakan bahwa Indonesia juga menyiapkan suatu dekade pengembangan kebudayaan Indonesia setelah tahun 1997. Jadi berarti 1998--2007 begitu. Jadi saya persilakan untuk membahas ini juga pada

kesempatan ini. Saya kira demikianlah sebagai suatu pengantar bukan pengarah, pengantar usulan kalau diterima syukur kalau ngga ya silahkan dibahas.

Dengan ini maka ijinkanlah saya secara resmi menyatakan diskusi Jalur Sutra dan Simposium Pengajaran Sejarah di buka Bismillahirohkmannirrohim.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

CAKUPAN TUGAS SIMPOSIUM PENGAJARAN SEJARAH

1 Pendahuluan

Seminar/kongres sejarah nasional dalam empat dasawarsa telah dilaksanakan sebanyak 6 kali. Tekanan yang diberikan pada seminar/kongres sejarah itu adalah kecenderungan pengembangan teori dan metodologi serta hasil penelitian terbaru yang dilaksanakan para sejarawan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Padahal banyak permasalahan pengajaran sejarah di sekolah yang harus dipecahkan. Pelajaran sejarah masih bersifat dogmatis daripada memberikan nalar kritis dan upaya untuk memperoleh kearifan masa lampau. Pelajaran sejarah diberikan sebagai indoktrinasi sehingga bagi guru tugas itu dirasakan sebagai beban. Cara pengajarannya pun kaku dan membosankan, karena materi pelajaran harus dihafal. Materi pelajaran sejarah terlalu banyak dimensi politiknya daripada dimensi sosial budaya.

Penelitian tentang pengajaran sejarah bukannya tidak pernah dilakukan. Dari penelitian yang pernah dilakukan (Habib 1985) diperoleh gambaran bahwa ada anggapan menjadi guru sejarah itu mudah. Itulah sebabnya banyak guru sejarah bukan mereka yang berasal dari lulusan pendidikan yang bersangkutan. Permasalahan bertambah lagi dengan tidak ditunjangnya sarana pendidikan yang memadai. Selain itu terdapat kesenjangan antara kebijakan ditingkat atas dengan pelaksanaan di lapangan. Kenyataan di lapangan guru lapangan, guru lebih dituntut mengejar sasaran kurikulum. Dengan

demikian guru dikendalikan oleh Kantor Wilayah lebih pada urusan administratif daripada pemantauan aspek akademik. Agaknya sudah menjadi rahasia umum bahwa telah lama terjadi aspek akademik. Agaknya sudah menjadi rahasia umum bahwa telah lama terjadi ketidakharmisan hubungan antara instansi-instansi Ditjarahitra Ditjenbud dengan Dikdasmen, Puskurbalitbang dan notabene adalah instansi-instansi di bawah payung Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam simposium pertama pengajaran sejarah di Pelabuhan Ratu, Sukabumi 1993 telah dilontarkan pemikiran agar pengajaran sejarah harus diarahkan sebagai wacana intelektual bahwa belajar sejarah adalah juga belajar berfikir. Sejauh manakah pemikiran itu telah diterapkan dalam berbagai kebijaksanaan seperti dalam materi pengajaran, alat peraga dan visualisasi pengajaran sejarah, buku teks, persiapan untuk meningkatkan kemampuan guru dan sebagainya, adalah juga merupakan persoalan yang besar.

Simposium kedua ini diharapkan sebagai arena penyadaran semua pihak yang terkait didalam proses pengajaran sejarah di tanah air kita. Simposium ini dimaksudkan untuk melihat arah perkembangan pengajaran sejarah dalam segala aspeknya selama itu. Untuk maksud itu simposium diarahkan pada pembahasan tentang perkembangan konseptual mengenai jaringan pengajaran, hasil penelitian kancah, kurikulum, buku teks pengajaran sejarah, daya serap siswa terhadap materi pelajaran sejarah dan standardisasi guru sejarah. Selain itu simposium didahului dengan menampilkan pembicara kunci.

2 Tema Simposium

Simposium pengajaran sejarah tahun 1997/1998 bertemakan "Pengajaran Sejarah Kearifan Masa Lalu Untuk Menyongsong Tantangan Abad ke 21"

3 Topik dan Pembicara

Pembicara kunci membahas tema simposium: "Pengajaran Sejarah: Kearifan Masa Lalu Untuk Menyongsong Tantangan Abad ke-21".

Pembicara : Prof Dr. Soedijarto,

3.1 Perkembangan Teori/penelitian dan Metodologi Pengajaran Sejarah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Pemakalah : Prof Dr. Hamid Hasan

Dasar Filosofis Kurikulum Sejarah

Kebijaksanaan kurikulum dan dasar pemikiran rumusan kurikulum telah mengalami perkembangan dengan berbagai aspeknya.

Kurikulum yang bersifat lebih umum

Pemakalah : Dr. Hafid Abbas

Kurikulum yang bersifat lebih khusus

Pemakalah : Prof Dr. Rochiyati Wiriaatmaja

3.2 Bahan Pelajaran Sejarah Buku Teks Pelajaran Sejarah

Ditinjau dari perkembangan buku-buku sejarah yang dipergunakan selama ini dapat dievaluasi kecenderungan dan karakteristik pada setiap periode. Di sini pemakalah diharapkan dapat menilai dan melakukan kritik mengenai isi dan kebenaran faktual, sistematika dan penyajian dan retorikanya.

Pemakalah : Prof Dr. Helius Syamsuddin

3.3 Persepsi Pelajar

Kesan umum para siswa melihat pelajaran sejarah sebagai teknik menghafal peristiwa-peristiwa bersejarah. Mereka tidak melihat bahwa pelajaran sejarah adalah wacana intelektual, suatu proses berpikir. Padahal hampir semua jenis pengajaran juga melibatkan aspek menghafal. Karena proses akumulasi pengetahuan tidak mungkin akan tersimpan lama kalau tidak dihafal (diulang). Persoalannya sekarang mengapa pelajaran dan pengajaran sejarah dianggap membosankan siswa.

Pembicara adalah pemenang I sayembara mengarang Harkitnas Tahun 1997 :

Nina Febriana siswi SMU 08 Yogyakarta

3.4 Standardisasi Menjadi Guru Sejarah

Kriteria apa saja yang diperlukan untuk menjadi guru sejarah. Cukupkah hanya dengan ijazah sarjana IKIP Jurusan Sejarah? Persoalan itu perlu jawaban sehubungan dengan banyaknya kenyataan tidak mampunya guru sejarah dalam memberikan pelajaran sejarah yang baik. Standardisasi guru sejarah pada gilirannya juga akan berguna bagi penentuan kebijaksanaan dalam penerimaan guru sejarah dimasa depan.

Pemakalah : Dr. Diana Nomida Musnir

3.5 Peranan Organisasi Profesi Sejarah

Peranan organisasi profesi sejarah dalam memberikan sumbangan kepada peningkatan mutu pengajaran sejarah di Indonesia.

Pemakalah : Prof Dr. Taufik Abdullah

4 *Peserta*

Pakar pendidikan sejarah, Pejabat yang berhubungan dengan pengajaran sejarah, pendidik/guru sejarah, peneliti sejarah, dan undangan khusus.

Keseluruhan peserta berjumlah 50 orang

5 *Waktu dan Tempat Pelaksanaan*

Simposium diadakan di Hotel Ria Diani Cibogo, Bogor, tanggal 25--28 Desember 1997.

PENGAJARAN SEJARAH SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN NILAI DAN SIKAP

Prof. Dr. H. Soedijarto MA

Pengantar

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang : beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur; memiliki pengetahuan dan keterampilan; sehat jasmani dan rohani; berkepribadian mantap dan mandiri; dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dari lima karakteristik manusia Indonesia yang utuh, hanya satu yang secara tersurat menekankan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan, empat lainnya menuntut terwujudnya hasil pendidikan dalam bentuk nilai, sikap, dan perilaku seorang manusia Indonesia. Ini berarti bahwa pendidikan baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah harus bermuara kepada terbentuknya nilai, sikap yang mewujud dalam tingkah laku seseorang. Ini berarti juga bahwa semua matapelajaran, termasuk pengajaran sejarah, harus mampu menyumbang terbinanya manusia yang utuh tersebut. Dalam kerangka berpikir ini saya memberanikan diri mengajukan tulisan yang pada tahun 1983 atas permintaan Pusat Pengembangan Kurikulum saya tulis

untuk menunjang; lahirnya mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Karena itu tulisan yang saya ajukan kembali diberi judul : PENDIDIKAN NILAI MELALUI PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA.

Mudah-mudahan makalah ini dapat dijadikan bahan diskusi dalam Simposium Pengajaran Sejarah yang penting ini.

1 Pendahuluan

Sebagai bagian terpadu dari program Pendidikan Nasional, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa terutama diharapkan untuk berperan dalam menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Oleh karena itu, hakikat dari Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa adalah pendidikan nilai. Agar didalam melaksanakan tugas baik guru maupun pembina pendidikan, dapat secara optimal membantu para pelajar, murid, dan peserta didik dalam mencapai tujuan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, pada bab pendahuluan ini secara berturut akan diuraikan : 1) pengertian pendidikan nilai; 2) tujuan pendidikan nilai; 3) ruang lingkup pendidikan nilai; dan 4) sistematika pembahasan pendidikan nilai pada makalah ini.

1.1 Pengertian Pendidikan Nilai

Pengertian pendidikan disini menunjukkan pada proses yang secara sengaja direncanakan oleh pendidik dan dialami oleh anak didik/peserta didik dalam bentuk interaksi antara pendidik-anak-lingkungan pendidikan dan materi pendidikan, dengan maksud agar para anak didik/peserta didik mengalami perubahan, baik dalam tingkah laku, sikap, pengetahuan, ketrampilan, kemampuan maupun nilai yang diinginkan. Perubahan dalam hal-hal itu tidak hanya terjadi karena proses pendidikan melainkan dapat juga terjadi dalam proses interaksi sosial lainnya, baik dalam bentuk pergaulan dan pertemuan antar manusia maupun antara manusia dengan lingkungannya itu lingkungan sosial, kultural, politik, ekonomi, alam sekitar, dan lain-lainnya. Yang membedakan perubahan yang dialami melalui pendidikan dengan perubahan yang terjadi karena interaksi lainnya

adalah bahwa perubahan yang direncanakan terjadi melalui proses pendidikan yang perubahan itu menuju ketercapainya suatu gugus tujuan yang ditetapkan. Sedangkan perubahan yang terjadi melalui proses non-kependidikan dapat berupa perubahan ke arah yang negatif dan merugikan.

Perubahan pada murid SD dari tidak dapat berhitung menjadi dapat berhitung, dari kurang dapat bergaul dengan orang baru menjadi terbiasa dengan kawan-kawan yang baru dikenal, dari belum mampu berbahasa dengan baik dan benar menjadi lebih mampu berbahasa dengan baik dan benar, dari tidak mengenal tanah air menjadi mengenal tanah airnya dan berbagai perubahan lainnya adalah contoh-contoh perubahan yang terjadi melalui pendidikan. Sedangkan perubahan dari tidak perokok menjadi perokok, dari takut berbuat salah menjadi berani berbuat salah adalah contoh-contoh perubahan tingkah laku yang dapat terjadi sebagai interaksi sosial non-pendidikan.

Mengingat hakikat dari pendidikan sejarah perjuangan bangsa adalah pendidikan nilai, kiranya setelah memahami pengertian pendidikan perlu di ulas pengertian nilai yang berhubungan dengan pendidikan nilai. Setiap bangsa yang merdeka dan berdaulat memiliki nilai-nilai yang harus diikuti dan dijadikan landasan bertindak dan bersikap dari seluruh warga bangsa demi lestari dan mantapnya kehidupan negara bangsa tersebut. Dalam hubungan ini nilai adalah asas, aturan, persepsi, cita-cita dan pandangan hidup yang digerakkan dan dipegang oleh seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat, sebagai acuan. dalam menentukan pilihannya dalam bertindak, bersikap, dan berjuang baik sebagai bangsa maupun sebagai warga bangsa segala nilai yang kemudian menjadi bagian dari seluruh kepribadian kita, baik sebagai bangsa maupun sebagai perorangan, bukanlah sesuatu yang dapat menjadi milik dan bagian kepribadian kita dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang untuk menjadi milik dan bagian kepribadian kita memerlukan suatu proses.

Dengan dua pengertian pokok itu, yaitu pendidikan dan nilai, kiranya dapat dikembangkan lebih lanjut pengertian tentang pendidikan nilai. Dengan demikian, pendidikan nilai adalah proses

yang direncanakan oleh pendidik/lembaga pendidikan untuk dialami oleh anak didik/peserta didik agar terjadi proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang dicita-citakan, agar nilai-nilai itu menjadi bagian dari pribadi peserta didik. Dalam rumusan diatas ditekankan pengertian tentang sosialisasi dan internalisasi. Maksudnya tidak lain karena perbedaan dari pendidikan yang tujuannya hanyalah penguasaan ketrampilan dan pengetahuan dan pendidikan yang tujuannya menanamkan nilai kepada anak didik. Untuk pendidikan nilai diperlukan suatu proses interaksi antar manusia dalam situasi sosial budaya yang lebih mendalam daripada proses pendidikan yang tujuannya hanya untuk menguasai keterampilan atau pengetahuan belaka.

Perlu ditambahkan disini bahwa didalam praktik pendidikan di sekolah yang sering terjadi ialah pendidikan yang hanya terbatas pada suatu proses informal, yaitu proses penyampaian informasi dari pihak pendidik dan proses penerimaan informasi dari pihak anak didik/peserta didik. Proses yang demikian sering disebut proses belajar mengajar dan belum sampai kepada proses pendidikan dalam pengertian sesungguhnya. Dengan kata lain, pendidikan nilai menuntut pelaksanaan pendidikan dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu terciptanya suasana, lingkungan dan interaksi belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai.

1.2 Tujuan Pendidikan Nilai

Di atas secara sepintas telah disinggung tujuan pendidikan nilai yaitu untuk menanamkan nilai-nilai yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa dan negara Republik Indonesia kepada generasi muda demi lestari dan mantapnya bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Agar kita mengetahui arah yang dituju atau tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan nilai secara lebih jelas, pada sub bagian ini akan dibahas secara berturut-turut: a) pentingnya pendidikan nilai; b) nilai-nilai pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebagai bagian terpadu dari proses pendidikan; dan c) tujuan pendidikan nilai.

1.2.1 Pentingnya Pendidikan Nilai

Dalam kehidupan perorangan ataupun bangsa dapat kita telusuri betapa banyak orang yang terombang-ambing dalam perjalanan hidupnya, dan ada bangsa yang goyah dan tidak stabil dalam perjalanan sejarahnya. Bila kita kaji lebih lanjut perbedaan antara seseorang yang mantap dalam hidupnya (bukan dalam pengertian material) dengan orang yang terus gelisah dan goyah dalam hidupnya, pada hakikatnya perbedaan itu terletak pada ada tidaknya nilai-nilai yang secara mantap menjadi bagian dari pribadinya. Seorang pribadi yang memiliki pegangan hidup yang mantap akan dengan tenang menghadapi segala masalah yang ditemuinya. Tidak lain karena dia memiliki kerangka acuan sebagai pegangan dalam menentukan pilihan, tindakan pekerjaan, pendidikan, dan lain-lainnya. Demikian juga, bila diperhatikan perjalanan sejarah suatu bangsa, kita menyaksikan adanya negara-bangsa yang mantap dalam perjalanan sejarahnya. Di samping itu, ada negara yang terus bergolak. Amerika Serikat adalah contoh negara yang mantap, apalagi bila dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin. Hal ini karena Amerika Serikat memiliki pandangan hidup dan konstitusi yang diterima, diikuti, dan dibela oleh seluruh rakyatnya, sedangkan negara lain yang tidak semantap Amerika Serikat tidak memiliki suatu pegangan yang diterima, dimiliki, dan dibela oleh seluruh warganya.

Negara Republik Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami berbagai tantangan dan pertentangan, dalam proses persepakatan tentang pandangan hidup dan nilai-nilai yang harus diterima, diikuti, dibela, dan diperjuangkan bersama. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia melalui UUD 1945 yang disyahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah berikrar untuk menganut satu pandangan hidup yang harus diperjuangkan, dibela, dan diikuti oleh seluruh warga negara, yaitu Pancasila. Tekad suci untuk memiliki pandangan hidup yang satu, yaitu Pancasila dan UUD 1945, dalam perjalanannya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan terakhir yang terbesar adalah pemberontakan G-30S/PKI pada tahun 1965.

Orde Baru yang bertekad menegakkan tata kehidupan negara dan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen, telah makin berhasil memantapkan nilai-nilai Pancasila yang harus diikuti oleh semua warga negara, pejabat negara, dan lembaga negara dalam bentuk Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Nilai-nilai yang terkandung dalam P4 merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan dan dipribadikan dalam diri setiap warganegara terutama generasi muda, demi mantap dan lestarnya negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Telah disadari bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam P4 pada hakikatnya adalah kristalisasi dari pengalaman hidup bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya, seperti yang ditunjukkan oleh para perintis, penegak, pejuang, pembela, dan pengisi kemerdekaan dalam merintis, menegakkan, memperjuangkan, mempertahankan, membela, dan mengisi kemerdekaan. Sukar dibayangkan bagaimana generasi muda dapat memperoleh inspirasi dan imajinasi dari pentingnya berpegang pada nilai-nilai Pancasila tanpa mengetahui, mempelajari, dan meneladani kehidupan para pendahulunya dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, adalah mutlak bahwa proses penanaman dan pemribadian nilai ditempuh melalui pendidikan sejarah perjuangan bangsa.

Berbagai bidang studi yang direncanakan untuk membantu pelajar menghayati dan mempribadikan nilai-nilai sering tidak atau kurang berhasil, karena baik materi, pendekatan, maupun cara yang ditempuh tidak dapat menciptakan situasi belajar-mengajar yang, memungkinkan terjadinya proses sosialisasi dari internalisasi nilai-nilai. Nampak dalam praktik pendidikan sering terjadi bahwa seorang pendidik, yang bermaksud menanamkan nilai-nilai, melakukannya dengan cara yang tidak memungkinkan terjadinya proses sosialisasi dan internalisasi. Hal ini dengan sendirinya tidak akan dapat mencapai tujuan. Sebagai contoh, seorang guru yang ingin menanamkan nilai tentang perlunya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, tanpa menggambarkan konteks kehidupan masyarakat yang mendorong seorang tokoh memilih diantara hidup enak bekerja dengan Belanda dan pergi bergerilya dengan penuh

penderitaan untuk membela kepentingan bangsa, atau hidup enak bekerja dengan Pemerintah Kolonial dengan mengikuti sesuatu organisasi pergerakan dengan resiko masuk penjara serta dengan menempatkan setiap pelajar dalam situasi yang menuntut penentuan pilihan, melainkan hanya menyebutkan beberapa tokoh yang dipandang mewakili orang yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi tanpa memberikan gambaran latar belakang kehidupan kemasyarakatan pada saat itu, dikhawatirkan, akan sukar untuk dapat berhasil mencapai tujuan.

Dari uraian di atas tampak betapa tanpa dimilikinya nilai-nilai secara mantap oleh seseorang; atau bangsa sukar bagi orang atau bangsa itu untuk secara mantap menghadapi tantangan hidup. Penguasaan atau pemribadian nilai-nilai tidak dapat terjadi dengan sendirinya, bahkan tidak dapat tumbuh dan berkembang melalui sembarang cara belajar-mengajar yang intensif dan memungkinkan terjadinya proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai.

1.2.2 Nilai-nilai yang Dapat Dipetik Melalui Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa

Bangsa Indonesia, yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bukanlah bangsa yang tidak memiliki sejarah dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik sebelum mencapai kemerdekaannya kembali setelah mengalami penjajahan hampir 350 tahun, maupun setelah mencapai kemerdekaan yang telah dicapainya. Jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya kembali pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah mengalami kejayaan sebagai negara merdeka yang disegani di seluruh Asia, yaitu zaman kejayaan Sriwijaya sekitar 10 abad yang lampau dan zaman kejayaan Majapahit pada sekitar lima sampai enam abad yang lalu. Selain itu, bangsa Indonesia juga telah mengalami masa-masa surut dalam perjalanan sejarahnya, seperti yang dialami hampir 350 tahun di bawah penjajahan asing.

Dalam perjalanan sejarah yang demikian panjang, banyak pelajaran yang dapat dipetik melalui penelaahan dan pengkajian pengalaman sejarah bangsa seperti yang ditunjukkan oleh perjuangan para pahlawan bangsa dalam berbagai kurun waktu. Bangsa Indonesia

yang kini telah merdeka dan berhasil menunjukkan diri sebagai bangsa terhormat dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia ini hanya dapat terus dipertahankan, dikembangkan, dan dilestarikan sebagai bangsa yang jaya dan terhormat apabila generasi muda sebagai generasi penerus dapat memetik nilai-nilai yang dihayati dan diamalkan oleh para pendahulunya, yang telah memungkinkan tegak dan jayanya bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya, di samping kelemahan-kelemahan yang, tidak perlu diulang yang dapat membawa bangsa ke jurang kehancuran.

Seperti diuraikan terdahulu, nilai-nilai yang terkandung dalam P4 pada hakikatnya adalah kristalisasi segala pengalaman sejarah bangsa yang dapat menjamin mantap dan lestarnya negara-bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 oleh karena itu, ajakan kepada peserta didik untuk menjelajah perjalanan sejarah bangsa diharapkan akan makin dapat memantapkan keyakinan anak didik tentang pentingnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, nilai tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, nilai tentang pentingnya musyawarah dan mufakat sebagai bentuk pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak pentingnya ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai tentang pentingnya disiplin nasional, sikap patriotik, kesediaan untuk bekerjasama demi persatuan dan kemajuan bangsa, sikap kepahlawanan dalam membela kepentingan bangsa nilai kebanggaan nasional, sikap menghargai harkat orang lain, dan berbagai nilai luhur yang memungkinkan tegaknya negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 akan dapat diresapi dan ditanamkan melalui proses belajar sejarah perjuangan bangsa. Hal ini dimungkinkan karena melalui pendidikan sejarah perjuangan bangsa seorang guru yang kreatif dan imajinatif dapat menggambarkan penghayatan dan pengamatan setiap nilai itu secara utuh. Agar maksud ini dapat dicapai, penguasaan yang mendalam dari setiap guru tentang berbagai peristiwa sejarah yang menggambarkan penghayatan dan pengamalan nilai perjuangan bangsa dan kemampuan menyajikan peristiwa tersebut dengan cara yang hidup dan penuh inspirasi merupakan syarat bagi setiap guru pendidikan sejarah perjuangan bangsa.

2.2.3 Tujuan Pendidikan Nilai

Kita mengetahui bahwa dalam kehidupan kemasyarakatan terdapat berbagai gugus nilai, seperti nilai keagamaan, nilai yang berhubungan dengan kesenian, nilai yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, nilai yang berhubungan dengan teknologi, nilai yang berhubungan dengan kehidupan sosial, nilai yang berhubungan kehidupan ekonomi, dan nilai-nilai lainnya.

Pendidikan nilai dalam rangka pendidikan sejarah perjuangan bangsa tidak mungkin mencakup semua nilai yang terdapat dalam kehidupan kemasyarakatan, melainkan mengutamakan pendidikan nilai yang berhubungan dengan perjuangan bangsa yang mencerminkan keseluruhan sikap bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan sejarahnya dan dalam menghadapi masa depan, sebagai bagian dari pembinaan nilai-nilai Pancasila sebagai yang digariskan dalam Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila.

Oleh karena itu, tujuan utama pendidikan nilai adalah dalam rangka pendidikan sejarah perjuangan bangsa adalah agar dapat dihayati dan diamalkannya segala nilai yang telah dihayati dan diamalkan oleh para pejuang, pembela, dan pengisi kemerdekaan oleh generasi muda sebagai bagian terpadu dari penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang digariskan dalam P4.

1.3 Ruang Lingkup Pendidikan Nilai

Setiap bidang studi yang dijadikan obyek belajar-mengajar selalu diharapkan mencapai tujuan pendidikan yang bersifat ganda, antara lain penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan nilai serta sikap. Dalam hal ranah nilai dan sikap itu sendiri, perlu dikaji dan diliputi nilai yang tertanamnya secara instrinsiknya melalui proses mempelajari bidang itu sendiri, dan nilai yang dipelajari secara tersurat melalui bidang studi. Sebagai contoh, pada saat seorang pelajar mempelajari salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang disajikan dengan benar dan memadai, dengan sendirinya akan tumbuh sikap dan cara memandang adanya aturan yang dapat ditarik dari berbagai gejala alam, tetapi pada saat yang sama dapat ditanamkan pentingnya sikap teliti, pentingnya kejujuran, dan berkembangnya sikap ingin tahu secara

terus menerus. Hal yang sama dapat dicapai melalui pendidikan sejarah perjuangan bangsa.

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai bidang studi yang berdiri sendiri, di samping dapat menambah pengetahuan dan kemampuan penalaran, dengan sendirinya akan dapat meliputi dua gugus nilai, yaitu nilai yang tumbuh melalui proses mempelajari sejarah perjuangan bangsa dan tertanamnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang melalui proses pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Dengan demikian, pada hakikatnya ada dua kategori nilai yang dapat dicapai melalui pendidikan sejarah perjuangan bangsa, yaitu : a) nilai yang ditanam karena mempelajari. Perjalanan sejarah bangsa; dan b) nilai-nilai perjuangan yang tertanam melalui proses pendidikan sejarah perjuangan bangsa.

1.3.1 Nilai yang Tumbuh Karena Mempelajari Sejarah

Setiap orang yang mempelajari sejarah dengan tekun akan menemukan garis yang berkesinambungan dalam perjalanan sejarah suatu masyarakat dan bangsa. Melalui pelajaran sejarah, pelajar atau anak didik akan menemukan juga betapa setiap peristiwa sejarah selalu berkaitan dengan peristiwa sejarah lainnya pada suatu kurun waktu tertentu, yaitu antara peristiwa lokal, nasional, regional, international. Mereka akan menemukan pula bahwa setiap peristiwa sejarah bukanlah suatu kejadian yang berdimensi satu melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai kekuatan atau faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, kultural, dan geografis. Tiga hal yang ditemukan melalui proses mempelajari sejarah, yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dan ketekunan, akan dapat menanamkan dalam diri pelajar suatu persepsi tentang perkembangan masyarakat, yaitu bahwa : 1) masyarakat dalam sejarah perkembangannya selalu dipengaruhi oleh peristiwa atau keadaan sebelumnya dan terkait dengan peristiwa selanjutnya; 2) setiap kejadian dalam perjalanan sejarah suatu bangsa selalu berkaitan atau saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung antara satu kejadian dengan kejadian lainnya, baik lokal nasional, regional, maupun internasional; dan 3) setiap peristiwa atau gejala yang muncul dalam perjalanan sejarah satu bangsa selalu atau pada hakikatnya merupakan hasil interaksi

berbagai faktor, yang saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, baik faktor sosial politik, ekonomi, demografis, maupun faktor kultural. Melalui penghayatan hal-hal di atas, dapatlah tumbuh dan berkembang perasaan sejarah (*historical sense*) dari setiap pelajar yang mempelajari sejarah.

1.3.2 Nilai-Nilai yang Dikembangkan dan Dimantapkan Melalui Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa

Tugas utama pendidikan sejarah perjuangan bangsa bukan untuk mengembangkan nilai-nilai yang disebutkan di atas, melainkan untuk menanamkan dan menyosialisasikan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945, yaitu nilai-nilai yang telah memungkinkan keberhasilan para pendahulu kita dalam menegakkan, mempertahankan, membela, dan mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai yang dapat ditumbuhkan melalui proses pendidikan sejarah perjuangan bangsa antara lain adalah :

- 1) Mengutamakan kepentingan umum dan bangsa di atas kepentingan pribadi;
- 2) Semangat rela berkorban dan mengabdikan kepada negara-bangsa;
- 3) Sikap pantang menyerah dalam membela kepentingan bangsa dan negara RI;
- 4) Sikap persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Sikap patriotik dalam mempertahankan dan memajukan bangsa;
- 6) Sikap membangun untuk kepentingan bersama;
- 7) Sikap bekerjasama untuk membangun bangsa;
- 8) Sikap "tepa selira", mengukur diri sendiri;
- 9) Sikap memperbaiki diri dan tenggang rasa;
- 10) Mampu menguasai diri demi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 11) Bersikap adil dan "ambeg paramarta",
- 12) Berjiwa merdeka dan cinta perdamaian;
- 13) Tahan uji, ulet, dan tahan menderita dalam membela dan membangun negara;
- 14) Jujur terhadap sesama dan diri sendiri; dan nilai-nilai luhur lainnya seperti yang telah digariskan dalam GBPP Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.

Dengan dua gugus nilai yang perlu dikembangkan dan ditumbuhkan pada diri setiap anak didik khususnya, dan generasi muda pada umumnya, diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut berbagai pendekatan dan metode untuk mencapai tujuan pendidikan nilai melalui pendidikan sejarah perjuangan bangsa.

1.4 Sistematika Pembahasan Nilai

Setelah bab pendahuluan ini, secara berturut-turut akan dibahas : 1) nilai sejarah perjuangan bangsa, yang dirinci menjadi a) nilai-nilai pada umumnya, b) nilai-nilai yang dapat dikembangkan melalui pendidikan sejarah perjuangan bangsa; 2) pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebagai wahana internalisasi nilai-nilai perjuangan bangsa yang akan meliputi: a) proses internalisasi nilai-nilai, b) berbagai pendekatan pendidikan sejarah perjuangan bangsa untuk internalisasi nilai-nilai, c) kriteria pemilihan proses belajar mengajar yang relevan dengan tujuan pendidikan sejarah perjuangan bangsa, dan d) penerapan nilai-nilai pendidikan sejarah perjuangan bangsa pada berbagai tingkat pendidikan; dan 3) penutup, yang meliputi ringkasan tentang: a) proses mendidikan nilai pada umumnya, b) pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebagai wahana internalisasi nilai-nilai, dan c) penerapan nilai-nilai pendidikan sejarah perjuangan bangsa.

2 *Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Bangsa*

Pada bab pendahuluan, telah disinggung secara sepintas hal-hal yang menyangkut masalah nilai-nilai yang dapat dipetik dan ditanamkan kepada generasi muda dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa. Pada bab itu secara sepintas telah digambarkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam P4 pada hakikatnya merupakan kristalisasi pengalaman dan cita-cita perjuangan bangsa, seperti yang telah ditunjukkan para pendahulu kita dalam perjuangan, membela, dan mengisi kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk memberikan gambaran tentang kedudukan nilai-nilai itu dalam kerangka yang lebih luas, pada bab ini secara berturut-turut akan dibahas: 1) nilai-nilai pada umumnya,

2) nilai-nilai yang dapat diperoleh dan diresapi dengan belajar sejarah pada umumnya, dan 3) nilai-nilai yang dapat dikembangkan melalui pendidikan sejarah perjuangan bangsa.

2.1 Nilai-nilai Umumnya

Pada bab pendahuluan telah disinggung secara singkat pengertian tentang nilai dalam makalah ini, yaitu segala asas, cita-cita, konsepsi, cara memandang, dan/atau pandangan hidup seseorang atau masyarakat tentang hal-hal yang ditemuinya dalam kehidupannya, dalam pergaulannya dengan orang lain, dan interaksinya dengan alam sekitar, dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan material, dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan menegara, serta dalam hubungannya dengan diri sendiri dan keluarga. Dalam hal-hal itu, seseorang atau masyarakat atau bangsa berbeda dengan lainnya dalam cara memandang, dalam harapan, dalam sikap, dan dalam menentukan urutan kepentingannya. Perbedaan yang satu dengan lainnya dalam hal-hal itu timbul karena adanya perbedaan dalam sistem nilai yang dianut. Seseorang yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi akan berbeda dari seseorang yang; mengutamakan kepentingan pribadi bila misalnya menemukan adanya sumber tenaga alam. Seseorang yang egois akan mempertanyakan usaha apa yang dapat dikembangkan agar dapat diperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi pemupukan modal keluarga dan dirinya, tetapi seseorang yang mengutamakan kepentingan umum, bangsa, dan masyarakat akan berusaha mengembangkan usaha agar negara dapat memperoleh manfaat dari kekayaan itu, baik bagi peningkatan devisa, membuka kesempatan kerja, maupun bagi peningkatan taraf hidup rakyat. Contoh sederhana ini menunjukkan betapa gejala atau masalah yang sama akan dipandang secara berbeda oleh orang yang memiliki cara pandang dan cita-cita yang berbeda. Dengan kata lain, perbedaan cita-cita, harapan, dan cara memandang yang mencerminkan perbedaan nilai yang didukung melahirkan tindakan yang berbeda.

Berangkat dari contoh sederhana di atas nampak bahwa pada hakikatnya nilai yang didukung atau dianut oleh seseorang atau suatu masyarakat akan nampak dalam tindakan, dalam aspirasi, dalam tujuan

hidup, dalam sikap, dalam minat, dalam kepercayaan, dan dalam perasaan seseorang atau suatu bangsa.

Sebagai suatu bangsa yang memiliki satu cita-cita, yaitu membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka perlu dan mutlak dikembangkannya suatu sistem nilai yang secara bersama dihayati dan disepakati untuk dijadikan pedoman oleh setiap warganegara dalam perbuatan, tindakan, cita-cita dan cara pandangnya, terutama yang berhubungan dengan bidang-bidang kehidupan bernegara dan menegara, sehingga untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam segala tindakan dalam hubungannya dengan masalah-masalah masyarakat negara bangsa Indonesia.

Untuk mencapai tujuan itu, melalui berbagai usaha terutama pendidikan, lebih khusus lagi pendidikan formal, telah disusun berbagai program dan strategi pendidikan untuk menanamkan dan memprioritaskan nilai-nilai yang tercantum dalam Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa adalah salah satu wahana utama yang bertugas mengemban misi melahirkan generasi muda terdidik yang berjiwa, bersemangat, dan mendukung serta memiliki nilai-nilai Pancasila sebagai tercantum dalam P4. Namun demikian disadari, seperti diulas dalam penataran lainnya, bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan, perlu dipertegas nilai-nilai terutama nilai-nilai yang dapat dan harus dicapai melalui pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Menurut pertimbangan ini, pada bagian berikut akan diulas nilai-nilai yang dapat diperoleh melalui proses mempelajari sejarah pada umumnya.

2.2 Nilai-nilai yang Dapat Diperoleh dan Diresapi dengan Belajar Sejarah pada Umumnya

Dimiliki, diresapi, dihayati, dan diamalkannya suatu nilai oleh seseorang tidak dapat dicapai melalui suatu proses sejarah, apalagi melalui satu atau dua jam pelajaran, melainkan memerlukan suatu proses yang panjang dan terus-menerus. Jelas berbeda bila tujuannya hanya untuk dapat menerangkan arti peranan suatu nilai. Mungkin anak didik yang cerdas dapat secepatnya menjelaskan, misalnya arti

nasionalisme, contoh-contoh tindakan yang nasionalistis, dan komentar tentang peranan sikap mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dalam perjuangan sejarah perjuangan bangsa. Cukup jelas kiranya bahwa kemampuan yang terakhir ini bukan merupakan tujuan pendidikan nilai yang akan dicapai melalui pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Yang ingin dicapai, dalam sikap mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi adalah generasi muda yang bila dihadapkan kepada pilihan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi akan memilih kepentingan bangsa. Misalnya seorang pemuda terpelajar yang memimpin perusahaan keluarga pada suatu ketika harus meninggalkan pekerjaannya untuk memanggul senjata karena negara berada dalam ancaman agresi negara asing. Dalam keadaan demikian pemuda yang mendukung nilai yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dengan tulus akan segera meninggalkan kedudukannya yang sekarang untuk pergi ke medan laga. Tetapi sebaiknya, bila dia mendukung nilai yang lain, dia akan menolak tugas membela negara.

Kiranya jelas bahwa pencapaian tingkatan, seperti digambarkan terakhir ini, tidak dapat terlaksana dengan jalan proses belajar-mengajar biasa, yang tidak lebih dari proses mentransfer informasi. Pencapaian itu memerlukan proses pendidikan yang intensif dan terus-menerus.

Sejarah sebagai bidang pengetahuan yang memuat pengetahuan tentang berbagai peristiwa lampau dalam perjuangan suatu bangsa dapat merupakan sumber pelajaran mengenai berbagai peristiwa yang mencerminkan penerapan berbagai nilai sebagai nampak dalam tekad, tindakan dan perjuangan pendahulu kita pada berbagai kurun sejarah. Melalui pelajaran sejarah, seorang anak didik/peserta didik dapat diajak berkelana ke masa lampau pada saat pendiri Majapahit bersiasat mengusir tentara Cina yang kuat dengan tekad kuat yang mengutamakan kepentingan keagungan kerajaan di atas kepentingan pribadi masing-masing. Melalui pengajaran Sejarah anak didik dapat diajak juga berkelana untuk memperoleh inspirasi dan imajinasi bagaimana para tokoh pergerakan nasional meninggalkan kenikmatan hidup dalam bekerja dengan Belanda dan memilih dibuang dan

dipenjara demi kemerdekaan bangsa. Melalui pelajaran sejarah anak didik belajar pula mengapa Indonesia sampai sempat dijajah begitu lama, dan tidak untuk mengulangi sejarah surat tersebut, yaitu sikap mengutamakan ketenaran dan keenakan pribadi di atas kepentingan persatuan dan kejayaan bangsa.

Seperti dituangkan pada bab pendahuluan, melalui pelajaran sejarah anak didik diajak menelusuri kesinambungan sejarah dari kurun berikutnya, dan bahwa jayanya suatu kurun ditentukan oleh kemampuan dan ketangguhan generasi penerus untuk melanjutkan dan mempertahankan kejayaan dan kebesaran suatu kerajaan. Pendalaman sejarah lahirnya kerajaan Majapahit yang jaya dan disegani, kebangkitan negara Indonesia dalam bentuk Republik, keberhasilan generasi 1945 memikul tanggung jawab sejarah dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, dan keberhasilan para pemimpin menegakkan Orde Baru, menunjukkan kemampuan dan kesiapan generasi muda dalam kurun-kurun itu dalam mengemban tugas nasional mereka menegakkan kejayaan negara dan bangsa. Pada setiap kurun itu dapat ditelaah, diteliti, dan diteladani berbagai nilai yang melatarbelakangi tindakan kepahlawanan mereka seperti nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai pengabdian dan pengorbanan, nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai keadilan sosial, dan nilai musyawarah untuk mufakat di antara sesama pejuang bangsa. Masing-masing nilai itu secara nyata dan utuh menunjukkan betapa para pendahulu kita telah berperanan dalam perjalanan sejarah bangsa.

Melalui pelajaran sejarah kita dapat menyaksikan betapa persatuan dan kesatuan bangsa dapat goyah serta bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa dapat menjadi kokoh dan ampuh baik sebagai sasaran perjuangan maupun modal perjuangan. Melalui pelajaran sejarah baik didik atau peserta didik dapat juga diajak serta menyaksikan betapa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tidak dimiliki bangsa akibat penjajahan dan betapa nilai yang sama telah membakar semangat dan mengorbankan api perjuangan merebut kembali kemerdekaan yang jelas bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui pelajaran sejarah nasional juga dapat disaksikan betapa keadilan sosial yang diinjak-injak oleh kaum penjajah melalui

diskriminasi dan politik eksploitasinya, tetapi cita-cita untuk menegakkan keadilan sosial telah dapat membangunkan semangat untuk menumbangkan penjajahan dan membangun Indonesia yang adil dan makmur secara merata. Banyak peristiwa sejarah dalam perjalanan hidup bangsa, sejak masa sebelum kemerdekaan sampai dengan masa perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, diikuti, dan dilaksanakan segala nilai yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.

Melalui pelajaran sejarah juga seperti telah diungkapkan dalam bab pendahuluan makalah ini, setiap pelajaran sejarah yang sungguh-sungguh dapat menangkap betapa hari ini tidak mungkin kita capai tanpa melewati proses sejarah di hari yang lalu. Melalui pelajaran sejarah pada, anak didik atau peserta didik dapat menarik pelajaran bahwa keberhasilan atau ketidakberhasilan kita dalam usaha pembangunan atau perjuangan apa pun akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, budaya, dan sikap manusianya sendiri. Selain itu, mereka dapat menarik pelajaran bahwa tidak ada kejadian dalam sejarah modern yang berdiri sendiri tanpa ada kaitan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan keadaan dunia, baik internasional, nasional, regional maupun lokal. Sebagai contoh, melalui pelajaran sejarah pelajar dapat mengetahui pengaruh revolusi industri terhadap datangnya orang Eropa dalam mencari pasaran dan bahan, mentah sebagai titik mula dari penjajahan, pengaruh depresi ekonomi tahun 1930-an terhadap politik penjajahan Belanda, pengaruh revolusi Tiongkok pada tahun 1911 dan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 terhadap pergerakan nasional, dan masih banyak contoh lainnya.

Dari uraian di atas, jelaslah nilai-nilai yang dapat, ditarik dari mempelajari sejarah pada umumnya. Sudah barang tentu untuk mencapai tujuan ini diperlukan cara belajar dan mengajar yang memadai untuk mencapai tujuan.

Berbagai nilai yang dinyatakan di atas melalui pelajaran sejarah memang dapat diungkapkan dan dipelajari, tetapi sampai berapa jauh dapat ditanamkan dan dipribadikan ke dalam diri generasi muda belum dapat dijamin. Oleh karena itu, masih perlu ada usaha khusus untuk

kepentingan proses penanaman dan pemasyarakatan nilai-nilai, yaitu melalui pendidikan sejarah perjuangan bangsa.

2.3 Nilai-nilai yang Dapat Dikembangkan melalui Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa

Berbagai nilai yang dapat dipetik melalui proses belajar sejarah seperti yang diungkapkan pada bagian terdahulu pada dasarnya baru merupakan nilai yang dapat mengilhami para pelajar serta membangkitkan imajinasi tentang penting dan mutlaknyanya melaksanakan nilai-nilai tersebut. Timbulnya perasaan atau pandangan tentang pentingnya suatu nilai tidak dengan sendirinya dapat diartikan sebagai telah tertanam atau telah mempribadinya nilai tersebut dalam diri pelajar yang bersangkutan. Proses menjadi tertanamnya suatu nilai memerlukan proses kependidikan yang secara khusus dikembangkan untuk itu. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa adalah suatu pengertian dan program yang khusus dikembangkan dan dimaksudkan untuk dapat mengemban tugas menanamkan nilai-nilai tersebut ke dalam diri pelajar sebagai generasi penerus.

Pendidikan sebagai yang telah diutarakan pada bab pendahuluan menunjukkan suatu proses perubahan yang direncanakan, dalam bentuk interaksi anak didik-pendidik, anak didik-pendidik dan bahan pendidikan, anak didik-pendidik bahan pendidikan dalam situasi sosial kependidikan tertentu. Seorang pendidik yang telah merupakan personifikasi segala nilai yang akan ditanamkan dalam hubungannya dengan anak didik dalam situasi kependidikan, dengan sendirinya akan dapat menjadi panduan bagi anak didik untuk berbuat/bertingkah laku. Dengan bahan pendidikan yang dipacu secara khusus mengembangkan nilai pada diri anak didik dengan sendirinya akan mempercepat terjadinya proses tertanamnya nilai tersebut. Lebih-lebih lagi bila terjadi dalam situasi sosial kependidikan yang diciptakan untuk itu. Dengan kata lain, berbeda dengan pelajaran sejarah yang dapat menghasilkan anak didik yang mulai menyadari pentingnya nilai-nilai perjuangan bangsa sebagai bagian dari nilai-nilai yang harus dimiliki dan dihayati, dalam pendidikan sejarah perjuangan bangsa diharapkan lebih dari itu, yakni segala nilai tersebut perlu dapat dihayati dan

diresapi secara langsung melalui berbagai bentuk interaksi belajar-mengajar.

Kesadaran nasional yang tinggi, nilai patriotisme, nilai keadilan sosial, nilai pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa, nilai mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, setelah mereka saksikan dan kagumi proses mempelajari sejarah, perlu ditekankan lagi dalam bentuk interaksi belajar-mengajar yang lebih meyakinkan dan menguatkan nilai-nilai tersebut sebagai bagian dan kepribadian mereka, bukan sebagai sesuatu yang masih berada di luar dirinya. Untuk kepentingan ini, setiap pendidik data proses pendidikan sejarah perjuangan bangsa, di samping harus terampil dalam menggali nilai-nilai yang tersirat maupun tersurat dalam setiap episode sejarah perjuangan bangsa harus juga meyakini kebenarannya dan dapat menularkan sikapnya itu ke dalam pribadi anak didik. Bagaimana proses itu dapat terjadi, akan diuraikan secara khusus pada bab berikut.

3 Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Sebagai Wahana Internalisasi Nilai-nilai Perjuangan Bangsa

Seperti telah dikupas pada Bab II, melalui pelajaran sejarah dan sejarah perjuangan bangsa, para pelajar (anak didik dan peserta didik) akan berkesempatan memperoleh inspirasi pengetahuan, dan imajinasi tentang nilai-nilai perjuangan bangsa yang telah mendorong perjuangan dan menjadi landasan bertindak dari pendahulu kita. Melalui pendidikan sejarah perjuangan bangsa, para pelajar diharapkan dapat mencapai tingkatan lebih dari hanya memperoleh inspirasi, pengetahuan, dan imajinasi tentang nilai-nilai perjuangan, yaitu menjadikan nilai-nilai itu menjadi miliknya, bagian dari sistem nilai yang dianutnya, menjadi dasar acuan dalam bertindak dan bertingkah laku. Proses menjadikan nilai sebagai bagian dari seseorang disebut proses internalisasi nilai-nilai pendidikan sejarah perjuangan bangsa akan dapat mengembangkan proses internalisasi nilai-nilai perjuangan bangsa dalam diri anak didik/peserta didik? Bab ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan ini melalui uraian mengenai hal-hal sebagai berikut : 1) proses internalisasi nilai pada umumnya; 2) berbagai pendekatan belajar-mengajar yang memungkinkan

terjadinya proses internalisasi melalui pendidikan sejarah perjuangan bangsa; 3) kriteria pemilihan proses belajar mengajar yang relevan dengan tujuan pendidikan sejarah perjuangan bangsa; 4) penerapan nilai-nilai pendidikan sejarah perjuangan bangsa pada berbagai tingkatan pendidikan.

3.1 Proses Internalisasi Nilai pada Umumnya

Bila seseorang telah memiliki dan menjadikan suatu nilai sebagai bagian dari kepribadiannya dan bagian dari kata hatinya, maka ia telah merasakan kesesuaian antara perasaan, cita-cita kebutuhan, dan cara memandangnya dengan nilai yang dihayati dalam hubungannya dengan lingkungan sosial, cultural, politik, ekonomi dan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, bila seseorang telah menjadikan nilai pentingnya mengutamakan bangsa di atas kepentingan pribadi, hal itu berarti bahwa melalui pengabdianya orang ini merasakan kepuasan dan kebahagiaan dalam batinnya karena mengabdikan kepada bangsa dan negara adalah cita-cita dan kebutuhan dasarnya. Bila tingkatan yang ingin dicapai melalui pendidikan sejarah perjuangan bangsa adalah demikian, jelaslah bahwa untuk mencapai tingkatan ini diperlukan suatu proses yang intensif dan terus menerus yang memungkinkan penghayatan secara utuh dari pihak pelajar terhadap penerapan nilai.

Dalam pada itu, pelajaran sejarah mengandung gambaran tentang masa lampau. Masa lampau yang tergambar dalam sejarah ini oleh guru dan penulis yang memenuhi syarat dapat diwujudkan dalam suatu lukisan peristiwa yang utuh dengan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya berikut lingkungan sosial budaya-politik-ekonomi yang melatarbelakangi. Walaupun demikian, betapapun hebatnya, seorang guru melakukan peranannya tidak akan dengan sendirinya suatu nilai yang digali dan dipetik dari suatu peristiwa sejarah dapat langsung tertanam dalam diri anak didik. Untuk sampai kepada tingkatan yang demikian dari tahap mulai menyadari nilai yang perlu dimiliki sampai kepada mempribadikan nilai perlu dilampaui proses yang terus-menerus dalam bentuk perubahan tingkah laku dari anak didik sampai kepada tingkatan menjadinya suatu nilai bagian dari kepribadiannya.

Secara *taksonomis*, tahap-tahap tersebut, menurut David Kratwohl dan kawan-kawannya, adalah :

- 1) Tahap mulai terbuka menerima rangsangan, yang meliputi tingkatan : penyadaran; hasrat untuk menerima pengaruh; dan memberikan perhatian secara memilih di antara pengaruh yang masuk.
- 2) Tahap mulai memberikan tanggapan terhadap rangsangan afektif, yang meliputi : mulai memberikan perhatian pada nilai yang dirangsangkan; berhasrat untuk secara aktif memberikan perhatian; dan menikmati dengan penuh kebahagiaan memberikan perhatian terhadap nilai afektif.
- 3) Tahap mulai memberikan penilaian terhadap rangsangan, yang meliputi tingkatan : mulai menerima nilai yang sudah menarik perhatiannya; pada tingkatan ini anak didik mulai aktif menyatakan penilaiannya berdasarkan nilai yang mulai diterimanya; memilih berdasarkan nilai; pada tingkatan ini anak didik sudah mulai menggunakan nilainya sebagai acuan data memilih suatu objek; dan percaya akan kebenaran suatu nilai. Pada tingkatan ini anak didik sudah mulai dengan penuh keyakinan menerima kebenaran suatu nilai.
- 4) Pengorganisasian berbagai nilai yang telah diterima, yang meliputi tingkatan : menetapkan kedudukan atau hubungan suatu nilai dengan nilai lainnya, misalnya keadilan sosial dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan data permusyawaratan perwakilan; menempatkan prioritas di antara nilai-nilai yang telah diterima, misalnya menetapkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi.
- 5) Penyaturagaan nilai-nilai dalam satu sistem nilai yang konsisten, yang meliputi tingkatan : generalisasi nilai sebagai landasan acuan data melihat dan memandang masalah-masalah yang dihadapi; dan mengembangkan satu filsafat hidup yang utuh dan konsisten. Pada saat ini semua nilai yang ditanamkan dalam dirinya telah menjadi bagian terpadu dari sistem kepribadian anak didik.

Bila kerangka berpikir tentang perkembangan afektif seorang anak didik dari tahap mulai menyadari dan tertarik adanya nilai sampai dengan tingkatan menjadikan nilai tersebut sebagai bagian terpadu dari sistem kepribadiannya dihubungkan dengan proses perkembangan watak seperti yang dikemukakan oleh Robert F. Peck dan Robert J. Havighill, maka dapatlah ditunjukkan kesejajaran.

Tingkatan terendah dalam model kedua orang ini adalah tingkatan amoral yaitu tingkatan pada anak masih bayi, tidak ada yang sejajar dengan tingkatan pengembangan menurut Krathwohl, tetapi pada tiga tingkatan berikutnya ada kesejajaran sebagai berikut :

Tahap kedua model ini yaitu *expedient*, tingkatan dimana anak menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk menghindari hukuman, dikatakan oleh mereka, bahwa bila hukuman diberikan berarti berbagai larangan tersebut akan tertanam secara mendalam, tetapi mereka, ini sukar dijadikan landasan bagi perkembangan moral. Tahap ini sesungguhnya sudah melampaui tahap *penerimaan Krathwohl*, dan sejajar dengan tahap mulai memberikan tanggapan. Pada tahap ini anak didik sudah mulai menurut.

Tahap ketiga adalah tahap penyesuaian (*conformity*). Pada tingkatan ini anak didik sudah menerima aturan dan nilai dengan sikap positif, bukan karena takut dihukum. Tingkatan ini mendekati tingkatan memberikan tanggapan dengan bahagian.

Tahap keempat adalah tahap *irrational-conscienuous* pada tahap ini anak didik menerima aturan dan nilai tanpa mempersoalkan, ini setingkat dengan tingkatan percaya pada kebenaran nilai yang diikuti.

Tahap kelima sebagai tahap tertinggi dalam model ini adalah *rationalaltruist*, yaitu suatu tingkatan kematangan moral dari seseorang yang telah menyaturagakan berbagai nilai dengan sistem kepribadiannya. Pada tahap ini seorang anak didik telah aktif memperjuangkan nilai-nilai yang diterimanya, bahkan sering bersaksi dengan penuh perasaan dan emosi. Pengalaman emosionalnya dipadukan dengan penelaahan rasionalnya. Tahap ini sejajar dengan seluruh tiga tahap terakhir model Krathwohl.

Dengan ulasan di atas kiranya menjadi jelas tingkatan-tingkatan yang perlu dilalui untuk membimbing anak didik menerima dan mempribadikan nilai-nilai dalam dirinya. Jelas pula kiranya bahwa model Krathwohl lebih mudah dijadikan kerangka dalam mengembangkan berbagai model belajar mengajar.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu, ada tingkatan dan tahap yang perlu dilalui agar nilai yang akan ditanamkan pada diri anak benar-benar menjadi miliknya, menjadi bagian dari sistem kepribadiannya. Oleh karena itu, agar maksud tersebut dapat dicapai secara efisien dan efektif, setiap pendidik dan guru harus memikirkan strategi belajar mengajar yang memungkinkan tercapainya tujuan tersebut.

3.2 Berbagai Pendekatan Belajar Mengajar yang Memungkinkan Terjadinya Proses Internalisasi Nilai melalui Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa

Bila dikaji kembali lima tahap yang dikemukakan oleh Krathwohl tentang tingkatan perkembangan nilai, dari tingkatan penyadaran nilai sampai pada memadunya nilai tersebut sebagai bagian terpadu dari sistem kepribadian seorang anak didik, maka lima tahap itu pada hakikatnya dapat dibagi lagi menjadi tiga tahap, yaitu :

- 1) Tahap pengenalan dan pemahaman, yaitu tahap pada saat seorang mulai tertarik, memahami, dan menghargai pentingnya suatu nilai bagi dirinya sebagai pribadi dan anggota masyarakat negara-bangsa;
- 2) Tahap penerimaan, yaitu tahap pada seorang pelajar mulai meyakini kebenaran suatu nilai dan menjadikannya sebagai acuan dalam tindakan dan perbuatannya;
- 3) Tahap pengintegrasian, yaitu tahap pada saat seorang pelajar memasukkan suatu nilai dalam keseluruhan sistem nilai yang dianutnya. Pada tahap ini, seorang pelajar telah dewasa memiliki kepribadian yang utuh, sikap konsisten dalam pendirian, dan sikap pantang menyerah dalam membela suatu nilai. Pada saat ini, nilai yang diterimanya telah menjadi bagian dari kata hati dan kepribadiannya.

Pertanyaan yang perlu dijawab dalam bagian ini, setelah menyadari adanya tiga tahap di atas, adalah : 1) apakah setiap nilai yang akan ditanamkan harus melalui tiga tahapan tersebut? 2) apakah untuk setiap tingkatan pendidikan harus dinilai tiga tahap tersebut? dan 3) bagaimanakah pendekatan dan strategi belajar-mengajar untuk setiap tahapan tersebut?

Terhadap pertanyaan itu jawabannya adalah sebagai berikut : untuk pertanyaan pertama, bila nilai yang akan kita tanamkan dimaksudkan untuk sepenuhnya menjadi bagian dari sistem kepribadian setiap anak didik, jawabannya secara positif adalah "ya", tiga tahap tersebut harus ditempuh. Sedangkan penerapan ketiga tahap itu untuk setiap tingkatan pendidikan, jawabannya tidak dapat positif, tergantung pemahaman kita terhadap tingkat kematangan anak didik serta hakikat nilai yang akan ditanamkan. Sedangkan pertanyaan ketiga akan dijawab oleh seluruh uraian bagian ini.

Dari tiga tahap yang perlu dilalui dalam proses internalisasi nilai sebagaimana diuraikan di atas kiranya dapat dikembangkan pendekatan dan strategi belajar-mengajar yang sesuai dengan masing-masing tahap.

3.2.1 Pendekatan dan Strategi Belajar-Mengajar untuk Tahap Pengenalan dan Pemahaman

Pada tahap ini proses belajar mengajar yang ditempuh pada hakikatnya masih bersifat kognitif. Pelajar akan berkenalan dengan nilai yang akan ditanamkan melalui proses belajar kognitif oleh karena itu, pendekatan proses informasi diperlukan, namun perlu disajikan dalam konteks berlakunya nilai itu. Pada tahap ini pelajar akan memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu nilai dalam konteksnya. Artinya, melalui proses mempelajari suatu episode sejarah, pelajar akan memperoleh gambaran tentang peranan diamalkannya suatu nilai, dan pada saat yang sama pelajar diajak juga berimajinasi tentang pengandaian bila suatu nilai tidak diamalkan oleh para pelaku sejarah. Sebagai contoh, dalam memperkenalkan pentingnya nilai persatuan bangsa dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia, pelajar misalnya diajak mempelajari bagaimana para tokoh penegak kemerdekaan tidak selalu harus

menerapkan cara berpikirmya dalam berjuang dalam kemerdekaan, melainkan perlu mengorbankan prinsipnya untuk menyatukan pandangannya dengan tokoh-tokoh lainnya. Periode pendudukan Jepang dapat dijadikan obyek untuk mempelajari betapa dengan tekad merebut kemerdekaan dikemudian hari, para pejuang kemerdekaan membagi dua *Front* perjuangan yaitu perjuangan di bawah tanah, dan perjuangan melalui kerja sama dengan Jepang. Bila diandaikan kedua *front* itu tidak bersatu, pelajar diajak berimajinasi tentang bagaimana akibatnya bagi perjuangan memerdekakan bangsa.

Pada saat guru memperkenalkan nilai seperti yang dicontohkan di atas, pelajar terutama diajak menggunakan kemampuan kognitifnya. Tetapi, karena yang dipelajari adalah masalah kepentingan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan sesama dan sebagai suatu warga bangsa, dengan sendirinya dimensi afektif akan mulai disentuh.

Berbagai, strategi belajar-mengajar untuk kepentingan ini dapat dikembangkan, antara lain dengan jalan :

- 1) Mengajak atau menugaskan pelajar menelaah berbagai peristiwa yang mengandung nilai yang sejajar atau balikan kontradiktif
- 2) Mengadakan dialog yang intensif dengan pelajar tentang suatu nilai pada suatu periode atau peristiwa sejarah dengan melibatkan pelajar secara kognitif dan efektif dalam dialog tersebut mereka akan merasa ikut terjun dalam peristiwa yang sedang dibahas.
- 3) Menugaskan pelajar untuk menuliskan kembali pengetahuannya tentang sesuatu nilai yang sedang dibahas dengan bahasa mereka. Pada tulisan ini pelajar diminta untuk menggambarkan bagaimana seorang atau beberapa tokoh dalam peristiwa atau beberapa peristiwa sejarah melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu adat dan bagaimana artinya dalam proses perkembangan bangsa.
- 4) Melakukan curah pendapat dan tukar pendapat dalam diskusi terbuka yang dipimpin dan diikuti oleh seluruh kelas, baik melalui kelompok besar maupun kelompok kecil, untuk mempertajam pemahaman pelajar tentang arti suatu nilai.

Dengan keempat cara belajar-mengajar itu, diharapkan pelajar mulai memahami dan menghargai pentingnya suatu nilai. Akan tetapi,

hanya memahami dan menghargai pentingnya suatu nilai belum berarti bahwa nilai itu telah diterima dan dijadikan kerangka acuan dalam perbuatan, cita-cita, dan pandangan. Untuk itu, proses pendidikan perlu memasuki tahap berikut yaitu penerimaan.

3.2.2 Pendekatan dari Strategi Belajar-Mengajar untuk Tahap Penerimaan

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu, suatu nilai diterima oleh seseorang karena nilai itu sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya, dalam hubungannya dengan diri sendiri dan lingkungannya. Oleh karena itu, agar suatu nilai dapat diterima, diperlukan suatu pendekatan belajar yang merupakan proses sosial yaitu pendekatan yang memungkinkan pelajar merasakan diri dalam konteks hubungannya dengan lingkungan, bukan suatu proses belajar yang menempatkan pelajar dalam suatu jarak dengan yang sedang dipelajari. Suatu kehidupan sosial yang nyata, yang menempatkan pelajar sebagai salah seorang aktornya, memang sukar dikembangkan dalam situasi pendidikan di sekolah. Tetapi, tanpa diciptakannya suatu suasana dan lingkungan belajar yang memungkinkan terjadinya sosialisasi, sukar bagi kaum pendidik untuk mengharapkan tertanamnya suatu atau satu gugus nilai dalam diri para pelajar.

Dalam pendekatan ini, secara garis besar pendidik diharapkan melakukan hal-hal berikut :

- 1) Menciptakan situasi kehidupan sosial. dalam hal ini pelajar dihubungkan dengan lingkup sosial yang memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukan pilihan dan merasakan akibatnya dari pilihan itu bagi diri dan masyarakatnya;
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelajar berdasarkan pengalamannya untuk merenungkan dan memikirkan berbagai konsekuensi dari diterima dan tidak diterimanya suatu nilai dalam kehidupan masyarakat di mana pribadi pelajar ada di dalamnya;
- 3) Memberi kesempatan kepada pelajar untuk merasakan faedah dari diterimanya suatu nilai dalam hubungannya dengan kehidupan bersama;

- 4) Mendorong pelajar, melalui pemberian penghargaan dan pujian, untuk mengamalkan nilai yang telah dipahami dan untuk diterimanya;
- 5) Memberi kesempatan kepada pelajar untuk mengulangi perbuatan yang sesuai dengan nilai yang diterimanya.

Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan pada tahap sebelumnya. Belajar diajak untuk merasakan arti dan pentingnya nilai ini pada situasi kehidupan masa kini dan proyeksinya ke depan dengan latar belakang masa lalu. Dalam tahap yang pertama konteks yang dijadikan kerangka pelaksanaan nilai adalah masa lalu.

Menurut hemat kami, di sinilah terletak perbedaan antara pendidikan sejarah perjuangan bangsa dengan pelajaran sejarah. Dalam pendidikan sejarah perjuangan bangsa, pendidik tidak dilarang, bahkan dianjurkan, mengajak pelajar merasakan nilai-nilai perjuangan bagi kehidupan mereka pada saat ini dan pada waktu yang akan datang.

3.2.3 Pendekatan dan Strategi Belajar-Mengajar untuk Tahap Pengintegrasian Nilai

Kalau pada tahap penerimaan di atas pelajar mungkin belum menerima nilai-nilai sebagai bagian terpadu dari sistem kepribadiannya, maka pada tahap ini pelajar diharapkan telah menjadikan nilai yang diterima sebagai bagian dari sistem kepribadiannya. Pada tahap ini, manusia yang utuh dan terintegrasi mulai terwujud. Pada saat ini, nilai-nilai yang diterima bukan merupakan mosaik, melainkan merupakan suatu sistem yang dalam langkah dan tindak hidupnya secara serasi dan seimbang menjadi kerangka acuan perbuatannya. Kalau pada tahap sebelumnya seorang pelajar menerima sikap seorang yang, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan lainnya, maka pada saat ini nilai itu secara seimbang telah diintegrasikan dengan nilai-nilai lainnya, seperti ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial.

Jika diperhatikan hakikat dari proses integrasi nilai dalam satu sistem nilai yang utuh, seimbang, dan serasi, maka pendekatannya pun sejajar dengan tahap sebelumnya, hanya situasi kependidikan dan sistem sosial yang dikembangkan di lembaga pendidikan lebih utuh, yaitu mengemban berbagai nilai yang secara utuh harus menjadi sistem nilai dari setiap pelajar.

3.3 Kriteria Bagi Pemilihan Proses Belajar-Mengajar yang Relevan dengan Tujuan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa

Pokok ini mengandung pengertian bahwa tidak semua jenis proses belajar-mengajar relevan untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya tujuan pendidikan yang bersifat efektif oleh karena itu perlu selalu diperhatikan proses belajar-mengajar yang diperkirakan relevan bagi pencapaian tujuan pendidikan. Dalam hubungan ini ada empat kriteria yang secara menyeluruh dan seimbang perlu digunakan sebagai tolok ukur menilai dan memilih jenis dan bentuk proses belajar-mengajar yang relevan, yaitu 1) partisipasi aktif pelajar dalam proses belajar-mengajar; 2) efisiensi, 3) terarah kepada pencapaian tujuan; dan 4) mengandung nilai-nilai yang dicita-citakan. Keempat kriteria ini perlu digunakan secara bersama dan seimbang. Untuk itu, berikut ini akan dijelaskan pengertian dan aplikasi masing-masing.

3.3.1 Partisipasi aktif

Berbagai studi memberikan petunjuk adanya sebagian besar pelajar yang menyatakan bahwa kegiatan yang paling sering dilakukan adalah mendengarkan dan mencatat. Untuk tujuan pendidikan yang sifatnya hanya memberikan informasi, mungkin bentuk , proses belajar nanti akan menghafalkan isi catatannya dan guru hanya menanyakan ingatan mereka berdasarkan catatan. Akan tetapi, tujuan pendidikan yang demikianlah yang banyak dikritik dan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagai yang tercantum dalam GBHN. Dengan cara yang disebut tadi, pelajar akan mudah memperoleh pengetahuan tentang kapan terjadi perang Diponegoro, siapa pelaku-pelakunya, dan bagaimana akhirnya. Tetapi jelas, sukar untuk memberikan gambaran yang gamblang tentang beberapa nilai yang secara utuh dapat dipetik dari peristiwa sejarah itu. Oleh karena itu, agar pelajar melalui proses

mempelajari sejarah dapat memetik nilai-nilai yang perlu ditanamkan, kirannya perlu ditempuh cara belajar aktif, seperti menugaskan pelajar membaca berbagai tujuan tentang peristiwa, mempelajari dokumen, melihat gambar peristiwa, lukisan peristiwa, atau novel dan film tentang peristiwa itu. Hal ini dilanjutkan dengan penugasan untuk menuliskan pengetahuannya, membahas dan mendiskusikan berbagai aspek penting dari setiap peristiwa sejarah yang dipilih, apakah Perang Paderi, Perang Aceh, atau pemberontakan melawan Belanda lainnya. Dengan jalan demikian, melalui kegiatan belajar yang sifatnya kognitif seorang pelajar mulai dapat merasakan dan menghargai nilai-nilai yang telah mendorong para pejuang menentang penjajahan.

Akibat pelaksanaan yang kurang tepat dari pendekatan yang berorientasi kepada tujuan, maka proses belajar yang sesungguhnya lebih bernilai kependidikan, yang sering disebut sebagai kurikulum tersembunyi, dilalaikan. Hal ini tidak lain karena yang dipentingkan adalah kemampuan pelajar dalam menjawab pertanyaan dalam bentuk obyektif, apalagi dengan penekanan pada luasnya cakupan dan bukan mendalamnya pengertian. Oleh karena itu, konsekuensi afektif dari setiap pendidikan di sekolah menjadi sangat minim.

3.3.2 Efisiensi

Pengertian efisiensi yang dimaksud di sini ialah dapat dicapainya lebih dari satu tujuan melalui satu kegiatan belajar. Bila seorang guru hanya mendiktekan isi pelajaran, yang dapat dicapai hanyalah penguasaan informasi dan kemampuan menangkap pelajaran yang disajikan secara lisan. Kemampuan lain seperti bagaimana cara belajar yang betul, bagaimana cara menuliskan pendapat secara benar, dan bagaimana cara menyampaikan pendapat secara lisan tidak dapat dicapai apalagi dimensi afektif seperti menghargai nilai.

Oleh karena itu, dianjurkan agar dalam memilih proses belajar-mengajar diusahakan untuk memperhatikan berbagai akibat positif yang dapat ditimbulkan dan kegunaannya salah satu model belajar-mengajar. Makin banyak tujuan yang dapat dicapai melalui suatu proses belajar, makin efisien model belajar tersebut.

3.3.3 Terarah kepada Pencapaian tujuan

Kriteria ini memang merupakan hal yang dalam penerapan pendekatan sistem dalam bidang pendidikan akhir-akhir ini sangat menonjol, walaupun kurang memadai penerapannya. Namun demikian, setiap guru tidak boleh lupa bahwa setiap penggal program belajar-mengajar mempunyai titik berat tujuan yang harus dicapai. Bila suatu penggal mengutamakan pemahaman tentang arti nilai dalam proses perjalanan sejarah bangsa, hendaknya diutamakan proses belajar yang secara efektif dapat menunjang tercapainya tujuan itu. Akan tetapi, jelas harus secara kaya dilaksanakan dalam bentuk interaksi belajar-mengajar yang memungkinkan pencapaian tujuan yang lain. Dengan kata lain, pada setiap penggal pelajaran akan dikenal tujuan utama dan tujuan sekunder atau tersier.

3.3.4 Mengandung Nilai-nilai yang Dicitakan

Karena pendidikan sejarah perjuangan bangsa terutama adalah pendidikan nilai, maka pencapaian pendidikan nilai adalah yang paling utama. Pendidikan nilai yang paling ampuh adalah yang situasi belajar-mengajar yang mengandung nilai-nilai yang akan diajarkan dan ditanamkan. Ini harus tercermin dalam jenis bahasan yang dijadikan obyek belajar, sistem evaluasi, dan bentuk interaksi antara pelajar-pelajar dan guru pelajar. Secara singkat suasana belajar tersebut hendaknya merupakan amplikasi nilai *in action* tanpa terlihat adanya kesengajaan, melainkan secara tidak terasa merasuk ke dalam seluruh situasi belajar-mengajar.

Keempat kriteria itu pada setiap saat harus digunakan untuk menilai dan memilih jenis dan bentuk proses belajar-mengajar yang akan diambil sesuai dengan tujuan menyajikan suatu pokok bahasan dan pencapaian suatu tujuan pendidikan.

3.4 Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa pada Berbagai Tingkat Pendidikan

Bagian ini tidak dimaksudkan untuk secara terperinci memberikan gambaran bagaimana pada tiap jenjang pendidikan proses internalisasi nilai itu harus diterapkan. Yang perlu dicatat pertama adalah bahwa

pada akhir Pendidikan Menengah Atas semua generasi muda, khususnya yang terpelajar, diharapkan telah menjadikan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 sebagai bagian terpadu dari sistem kepribadian mereka. Dalam pada itu, dalam pendidikan formal dikenal tingkatan berikut : 1) tingkat Taman Kanak-kanak; 2) tingkat Pendidikan Dasar kelas I-III, dan tingkatan Pendidikan Dasar kelas IV-VI; 3) tingkat Pendidikan Menengah Pertama; dan 4) tingkat Pendidikan Menengah Atas.

Pada setiap tingkat di atas, ketiga tahapan proses internalisasi itu perlu ditempuh dengan bobot yang berbeda dan dengan pendekatan yang berbeda.

3.4.1 Pada Tingkat Pendidikan Taman Kanak-kanak.

Pada tingkat ini tahap pemahaman tidak diberikan lebih dari mendongengkan berbagai cerita sejarah, sedangkan pada tahap penerimaan diutamakan pemberian contoh dalam konteks cerita, diikuti dengan penerapan strategi penguatan kependidikan, seperti pemberian pujian, teguran dan lain-lain kepada mereka yang tidak menerapkan nilai-nilai yang telah disajikan, sedangkan tahap yang terakhir tidak, lebih dari memperkuat tahap yang pertama.

3.4.2 Pada Tingkat Pendidikan Dasar.

Pendekatan sejarah dapat dimulai pada kelas IV. Artinya, penyajian pelajaran dalam bentuk sejarah dapat dimulai. Pada tahap pertama, pemberian kesempatan untuk membaca beberapa tulisan sederhana tentang tokoh-tokoh perjuangan bangsa dapat dimulai, demikian juga pembahasannya. Bentuk pementasan sandiwara, penulisan karangan, serta bentuk seminar dan proyek sudah dapat digunakan.

3.4.2 Pada Tingkat Pendidikan Menengah.

Secara kognitif pelajar SMTP dan SMTA telah memasuki tahap untuk diajak belajar kognitif yang utuh. Karena itu strategi belajar-mengajar yang diuraikan pada bagian tentang pendekatan dan strategi belajar-mengajar dapat sepenuhnya dikembangkan, dan diterapkan secara penuh.

3 *Penutup*

Penulis merasa bahwa agar tulisan ini dapat lebih bermanfaat maka bagian terakhir masih perlu dikembangkan. Diharapkan melalui berbagai diskusi diantara para ahli dan penatar teras, dapat dikembangkan uraian khusus tentang tingkat-tingkat penerapan nilai menurut jenjang pendidikan, yang pada tulisan ini belum dibahas secara terperinci.

Mudah-mudahan tulisan ini dapat mengundang penilaian dan membuka cakrawala bagi pengembangan lebih lanjut pendidikan sejarah perjuangan bangsa.

Daftar buku yang patut dibaca untuk mengembangkan lebih lanjut topik ini :

1. Bloom, B.S., Krathwohl, David R. et.al. *Taxanomy of Educational Objectives : The Classification of Educational Goals*. New York : David McKay Company, Inc, 1956.
2. Gagne Robert M. *The Conditions of Learning*. New York. Holt. Rinehart and Winston. 1976 (Third Edition).
3. Brown, George I (edit), *The Live Classroom*. New York : Penguin Books, 1976.
4. McNeil, John D. *Designing Curriculum : Self-Instructional Modules*. Boston : Little, Brown and Co., 1976.
5. Parsons, Talcott, dan Shils, Ed. *A. Toward a General Theory of Action*. The Academy Library, 1962.
6. Rath, Louis E., et. Al. *Values and Teaching*. Columbus : Charles E. Merrill Publishing Co., 1978.

ORGANISASI PROFESI KESEJARAHAN DAN PENINGKATAN MUTU PENGAJARAN SEJARAH

Taufik Abdullah

Mestikah saya buktikan bahwa saya bukan seorang ahli pendidikan? Barangkali tak perlu. Ketidaktahuan saya tentang berbagai hal yang esensial mengenai pendidikan saja sudah dengan mudah dapat membuktikan hal ini. Jangankan memahami permasalahan pendidikan, bahasa yang dipakai oleh para ahli pendidikan pun sekarang semakin sulit saja saya mengerti. Pernah di suatu saat saya memahami perbedaan konseptual antara "pengajaran" atau *onderwijs* dengan "pendidikan" atau *opvoeding*. Sebabnya sederhana saja, bukankah dahulu Departemen yang kini disebut Pendidikan dan Kebudayaan, dahulu bernama Kementerian Pendidikan, *Pengajaran* dan Kebudayaan? Dan lagi bukankah pula pembedaan ini yang menjadi awal dari sebuah perdebatan yang sempat menyebabkan Sutan Takdir Alisyahbana melancarkan *Polemik Kebudayaan* yang terkenal itu. Sekarang pembedaan konseptual itu rupanya telah dilebur. Jadi antara pendidikan "normatif" dengan pengajaran "kognitif" tak perlu lagi dibedakan secara konseptual. Saya tentu setuju saja. Tetapi kini muncul lagi hal lain. Saya tak tahu membedakan arti "pengajaran" dengan "pembelajaran". Tetapi sudahlah setiap disiplin ilmu memang mempunyai kecenderungan untuk menciptakan konsep sendiri. Bahkan lebih daripada itu ada kecenderungan untuk menciptakan dunia sendiri, yang tertutup bagi disiplin lain.

Sekarang saya diharapkan berbicara tentang kemungkinan peran yang bisa dijalankan oleh sebuah organisasi, yang kebutuhan sekarang berada di bawah pimpinan saya, M.S.I. (Masyarakat Sejarawan Indonesia), dalam meningkatkan mutu pengajaran sejarah di sekolah-sekolah. Apakah yang harus saya bicarakan? Tetapi daripada saya bingung tak karuan, lebih baik saya berkisah lebih dahulu. Siapa tahu kisah ini bisa juga memberikan inspirasi kepada saya mengenai masalah tersebut.

Begini, ceritanya. Di bulan November 1970, saya pulang ke tanah air, setelah sekian lama menurut istilah di kampung saya merantau di negeri orang. Meskipun saya pulang dengan perasaan gembira, karena sekolah telah selesai, tetapi timbul juga sedikit rasa penyesalan. Ternyata saya terlambat pulang, karena satu atau dua bulan sebelum itu Seminar Sejarah Nasional II diadakan di Yogyakarta. Rugi juga rasanya. Sebab saya, sebagai mahasiswa sempat hadir pada Seminar Sejarah Nasional I, yang diadakan pada tahun 1957, juga di Yogyakarta. Bukankah tak enak rasanya kalau sekarang sebagai "ilmuwan" yang ibarat roti masih "*fresh from the oven*" saya tak sempat bisa ikut dalam seminar yang penting itu. Kapan lagi seminar seperti itu akan diadakan?

Tetapi hati saya terhibur juga, karena kawan-kawan panitia seminar berbaik hati mengirimkan kepada saya sebagian dari makalah yang diajukan dalam seminar tersebut. Jadi saya bisa juga menduga perkembangan ilmu dan pengetahuan sejarah di tanah air kita selama masa krisis di tahun 1960-an. Saya katakan krisis, sebab selama tahun 1960-an jadi setelah Seminar Sejarah Nasional I ilmu dan pengetahuan sejarah kita sangat bersifat ideologis. Tak banyak tulisan kesejarahn yang bisa membebaskan diri dari ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Bahkan ada sejarawan yang dengan susah payah mencari kesesuaian teoretik antara sejarah kritis yang empirik, yang harus dipertanggungjawabkan, dengan ajaran dan teori revolusi yang diindoktrinasikan.

Setelah membaca makalah-makalah tersebut, saya gembira juga. Ternyata penggolakan politik di tanah air tidak dengan begitu saja bisa mematikan hasrat para sejarawan muda untuk mencari "kebenaran

sejarah" kalau kata-kata mahal ini boleh dipakai. Atau, dengan kata-kata teknis, pergolakan politik dan ideologis serta kemerosotan ekonomi di tanah air kita selama periode Demokrasi Terpimpin dan tragedi nasional yang mengiringinya rupanya tidak mematahkan perhatian mereka untuk menjalankan penelitian sejarah kritis dan mengadakan rekonstruksi serta pemahaman terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tak kurang pentingnya ialah bahwa perhatian pun semakin bervariasi pula. Kajian tentang peristiwa politik mungkin masih dominan, tetapi aspek-aspek yang lain telah mulai juga dibicarakan. Jawa mungkin masih menjadi pusat perhatian, tetapi daerah-daerah lain pun telah mulai juga digarap. Apa yang pernah diperingatkan oleh Resink di tahun 1950-an, ketika usaha untuk menemukan landasan baru dalam penulisan sejarah sedang diperdebatkan, bahwa ide besar hanyalah ada arti kalau bisa dipertahankan oleh penelitian yang detail, ternyata dipraktikkan dengan baik. Hal ini dijalankan meskipun mungkin sekali para sejarawan tak tahu bahwa peringatan itu pernah diucapkan. Lebih penting lagi bukti Seminar Sejarah Nasional II ini memutuskan bahwa penulisan buku standard sejarah (nasional) Indonesia harus segera dilakukan dan organisasi keserjanaan para sejarawan Indonesia dibentuk.

Keputusan pertama menulis buku sejarah standard sangat penting. Karena itu hal ini berarti bahwa para peserta seminar Sejarah Nasional II ingin menjadikan impian Seminar Sejarah Nasional I suatu kenyataan. Jadi semacam kontinuitas dalam aspirasi telah diletakkan. Tetapi sesungguhnya keputusan ini menunjukkan dua hal yang lain. Pertama keputusan ini menunjukkan bahwa tidak seperti tahun 1950-an ketika tugas penulisan buku sejarah itu diserahkan kepada para tokoh terkemuka yang bukan saja teramat sibuk tetapi juga "dewa-dewa" yang mempunyai wilayah sendiri, kini di tahun 1970 telah terdapat sejumlah sejarawan yang terlatih dalam menghadapi masalah kesejarahan yang empiris dan kritis. Kedua, bukan saja adanya sebuah buku sejarah yang standard semakin mendesak bukankah kita sedang memasuki "era pembangunan" ? keputusan ini juga ingin mengatakan bahwa kini pendekatan sejarah yang lebih menyeluruh telah didapatkan. Sejarah tak lagi harus terpaku pada

sejarah politik dan terlebih lagi sejarah pun harus terlepas dari keharusan ideologis. Setidaknya demikianlah niat dari pendekatan yang bercorak "multidimensional", yang antara lain menuntut penghargaan yang sama terhadap semua aspek kehidupan sosial. Dengan keputusan ini maka bolehlah dikatakan bahwa kalau Seminar Sejarah Nasional I adalah pertemuan para pemikir sejarah, maka yang kedua ini adalah pertemuan para sejarawan profesional.

Keprofesionalan ini kelihatan segera, dengan tersusunnya dewan redaksi dan ditentukannya jilid-jilid yang akan dihasilkan serta penanggung jawab dari masing-masing jilid. Barulah kira-kira dua tahun kemudian, ketika saya diminta oleh Prof. Koentjaraningrat menulis bab tentang "sejarah dan arkaelogi" bagi penerbitan buku *The Social Sciences in Indonesia*, saya mengetahui bahwa penanggung jawab dari masing-masing jilid hampir sama dengan para penulis bab-bab dari laporan Indonesia ke UNESCO mengenai perkembangan historiografi. Laporan ini dimaksud sebagai bahan masukan bagi editor penerbitan UNESCO mengenai perkembangan historiografi, Barraclough, seorang sejarah Inggris yang terkemuka. Dipimpin oleh Prof. Sartono Kartodirdjo, yang juga berperan sebagai salah seorang penulis bab tentang abad 19, para penulis itu ialah Nugroho Notosusanto (ahli sejarah militer), Buchori (ahli purbakala klasik) Suyono (ahli prasejarah), dan Abdurrahman Surjomihardjo (ahli zaman pergerakan). Dalam susunan team penulisan buku "standard" sejarah itu Prof. Sartono memimpin dewan redaksi, sedangkan penanggung jawab abad 19 diserahkan kepada F.A. Soetjipto. Nugroho menjadi orang kedua dalam dewan redaksi, disamping menjadi penanggung jawab jilid 6 (masa Jepang sampai sekarang). Lebih penting lagi ia adalah pula penanggung jawab administrasi dari proyek penulisan. Marwati Djoened Poesponegoro adalah orang ketiga dalam susunan hirarki dewan redaksi. Di samping itu Uka Tjandrasmita dimasukkan sebagai penulis dan sekaligus penanggung jawab jilid 4 (zaman kerajaan Islam). Demikianlah kontinuitas dipertahankan. Masing-masing penanggungjawab jilid pun diberi hak untuk mencari anggotanya.

Tak kurang pentingnya, seperti saya katakan di atas, ialah didirikannya *Masyarakat Sejarawan Indonesia*. Saya tak tahu

argumen yang dipakai untuk mendirikan M.S.I. ini. Tetapi saya sangat menyetujui berdirinya organisasi ini. Saya sendiri, empat tahun kemudian, juga ikut serta, bahkan menjadi ketua pertama, dari *Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu Sosial* (kemudian di sebut *Ilmu-ilmu Sosial*) atau HIPIIS. Tetapi terlepas dari pengalaman pribadi saya dalam mendirikan dan memimpin sebuah organisasi keilmuan, susunan kepengurusan MSI yang diumumkan bersamaan dengan pembentukannya cukup unik juga. Keunikannya ini menyebabkan saya berdoa semoga semua berjalan lancar. Sebab ternyata pengurus M.S.I identik dengan pimpinan penulisan buku sejarah standard. Bisakah keduanya berjalan lancar meskipun persahabatan sesama mereka telah terjalin sekian tahun? Bisakah semua berjalan lancar meskipun mereka adalah para sejarawan yang paling senior di bidang masing-masing? Masalahnya ialah penulisan buku dan pengendalian organisasi keilmuan menuntut hal yang berbeda-beda dan jarang bisa saling berbenturan.

Saya tak akan berkisah lebih jauh. Tetapi memang ternyata penyatuan kepemimpinan ini merugikan perkembangan M.S.I. Bukan saja perhatian para pengurus mau tak mau lebih banyak diarahkan kepada penulisan buku "standard" itu saja. Dengan begini maka perkembangan organisasi terhambat dan pemikiran tentang apa dan bagaimana sebaiknya organisasi keilmuan tak sempat dipikirkan. Ketimpangan ini bertambah parah, kalau kita ingat pula bahwa penulisan sejarah pada dasarnya bersifat pribadi ketika sang sejarawan berhadapan dengan berbagai sumber yang mungkin saling bertentangan dan mencoba membuat rekonstruksi yang rasional dan kritis dari berbagai peristiwa yang tak selamanya terjadi secara rasional sedangkan kehidupan organisasi ditentukan oleh kesediaan untuk membentuk komunitas yang ramah bagi semua. Maka, ketika kesendirian masing-masing sejarawan berbenturan dalam proses penulisan sejarah, usaha membentuk komunikasi yang ramah pun menjadi korban pertama. Beberapa lamakah waktu yang diperlukan mendapatkan kembali "*the sphere of innovence*" yang telah hilang?

Sekian tahun telah berlalu. Buku sejarah yang "standard" itu telah beranak pinak, karena telah melahirkan pula buku pelajaran sejarah untuk SMP dan SMA (atau kini SMU) yang "resmi". Sekian masa

telah berjalan, buku "standard" itupun telah mulai mengalami "krisis legitimasi". Perubahan politik yang terjadi telah menuntut pembaruan yang radikal terhadap gambaran dari sejarah kontemporer. Sementara itu tuntutan masyarakat kepada sejarawan agar tampil ke depan "meluruskan sejarah". Tiba-tiba masyarakat kita seakan-akan menyadari betapa pentingnya sejarah "yang benar" dalam kehidupan bangsa. Masyarakat seakan-akan baru sadar bahwa kekuasaan bukanlah orientasi yang semestinya yang harus dipakai dalam penulisan sejarah, betapapun mungkin luhurnya misi yang dijalankan oleh sistim kekuasaan itu. Maka, begitulah kini telah bergema dengan keras tuntutan kepada sejarawan, yaitu para ilmuwan yang selama ini dianggap tidak begitu relevant dalam proses pembangunan nasional, agar mereka tampil ke depan, berperan sebagai pembawa "kebenaran". Dalam situasi eforia politik dan krisis politik, yang kini masih kita alami, sejarawan tak jarang ditampilkan sebagai "pembela kebenaran" yang selama ini dibenam oleh sistim kekuasaan yang otorier. Tetapi, masalahnya memang menjadi rumit juga karena "kebenaran" itu tak jarang diartikan sebagai sesuatu yang sesuai "*dengan anggapan saya*". Jadi kebenaran yang "benar" tak jarang adalah sesungguhnya "kebenaran yang partisan". Di manakah tempat sejarawan, jadinya ? Bukan itu saja, sejarawan pun diharapkan pula "mengajarkan sejarah yang benar" kepada anak-anak sekolah.

Lebih daripada saat-saat yang baru saja kita lalui, saya kira sekaranglah peranan M.S.I sebagai organisasi keilmuan dan profesi semakin diperlukan. Ketika inilah sejarawan tak bisa hanya tampil dalam kesendiriannya. Ia tak lagi hanya harus dengan kritis menghadapi yang secara teoretis dan metodologis cukup strategis untuk menjawab pertanyaan pokoknya, tetapi juga berhadapan dengan berbagai tuntutan dan harapan sosial. Di manakah batas antara "kepastian sejarah", yang harus didapatkan dari berbagai usaha kritik terhadap sumber-sumber, dengan "kewajaran sejarah", yang hidup di kalangan masyarakat yang pluralistik ? Mendapatkan "kepastian sejarah" adalah landasan dari integritasnya sebagai ilmuwan, tetapi menampilkan "kewajaran sejarah" adalah tanggungjawabnya sebagai intelektual. Hanya saja kedua nilai yang mulia ini tak selalu bisa menemukan afinitasnya. Mestinya sejarawan mengorbankan

integritasnya demi tanggungjawab sosial ? Atau sebaliknya ? Ketika dilema ini telah dihadapi maka semakin terasalah betapa pentingnya sebuah organisasi keilmuan dan profesi. Dengan organisasi dilema pribadi akan menjadi bagian dari masalah yang harus dihadapi komunitas keilmuan dalam berhadapan dengan masyarakat luas.

Saya kira ada beberapa hal yang bisa diharapkan dari organisasi keilmuan dan profesi, seperti M.S.I., dan dari keutuhan hal-hal inilah pula kita bisa merumuskan harapan dan kemungkinan peranan M.S.I. dalam usaha peningkatan pengajaran sejarah. *Pertama*, organisasi keilmuan dan profesi memberikan kepada kita suasana alternatif yang relatif terbatas dari ikatan struktural dan ikatan formal masing-masing. Jabatan apapun yang dipunyai dalam lembaga struktural masing-masing, dalam konteks organisasi kesemuanya membayar, karena semua adalah anggota dari sebuah komunitas keilmuan. Dalam konteks organisasi seseorang adalah dirinya sendiri. Apakah ia seorang profesor dengan banyak gelar atau baru selesai S1, dalam komunitas kesemuanya kehilangan relevansi. Semua adalah *peers*, rekan, yang sama-sama bergerak dalam disiplin keilmuan yang sama. Seseorang mungkin menjadi ketua atau apa saja, tetapi bukan karena hak yang terlekat pada dirinya, melainkan sebagai hasil dari sebuah proses pemilihan dan persetujuan bersama. Dan tempatnya pun tak lebih daripada *primus inter pares* saja itupun hanya dalam masalah keorganisasian. Tak ada hirarki formal yang harus dipatuhi, kecuali hirarki respek yang diberikan. Sebagai organisasi keilmuan, komunitas yang terdiri dari para *peers* ini bisa saja memberi tempat lebih bagi seseorang karena wibawa keilmuan yang telah dicapainya. Seseorang mungkin mendapatkan penghargaan yang khusus dalam pergaulan keilmuan karena jasa dan prestasi keilmuan yang telah diberikannya. Penghargaan dari *peers* itu adalah yang tertinggi nilainya dalam dunia keilmuan.

Kedua, organisasi keilmuan adalah pula sebuah *forum kesarjanaan* dan *forum dialog* teman sejawat. Dalam forum diaolog inilah kita berkesempatan mengajukan hasil penelitian baru dan memberikan ide-ide tentang ilmu dan pengetahuan kita. Untuk hal-hal inilah MSI dan, tentu saja organisasi lain, semestinya secara teratur mengadakan simposium, seminar dan lain-lain. Dalam forum ini

kesemua temuan dan pemikiran keilmuan dalam dunia kesejarahan bisa diuji dan diperdebatkan. Apakah temuan itu bisa dipertanggungjawabkan secara teoritis ataukah temuan hanya bertolak dari kesalahan interpretasi terhadap sumber yang dihadapi ? Apakah ide atau tafsiran baru yang diajukan tentang hal-hal yang telah menjadi bagian dari perbendaharaan pengetahuan (*the body of knowledge*) secara teoritis dan metodologis cukup sah ? Perdebatan keilmuan, yang kadang-kadang harus melakukan "dekonstruksi" terhadap pengetahuan yang telah dimiliki dan yang telah dianggap "benar", demi didapatkannya "rekonstruksi" baru atau membuang pemahaman lama yang telah dianggap baku tentang sesuatu hal atau peristiwa, adalah pertanda yang sah dari adanya dinamika keilmuan. Dalam kesendirian, tanpa organisasi yang memberikan forum, kemajuan keilmuan akan berjalan tersendat-sendat. Sebab itulah sebuah organisasi keilmuan *seharunya* juga mempunyai sebuah majalah keilmuan. Maka, meskipun terseot-seot penerbitannya antara lain karena kurangnya dukungan para sejarawan sendiri, MSI menerbitkan juga majalah *SEJARAH*.

Ketiga, berkaitan juga dengan yang kedua, organisasi keilmuan merupakan saluran komunikasi tentang berbagai peristiwa keilmuan baik yang terjadi di dalam maupun di luar bidang keilmuan itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang ilmu sejarah, umpamanya, bagaimanakah sejarawan akan membiarkan lewat begitu saja berbagai perkembangan dan gejala teori yang terjadi dalam sosiologi, sastra, antropologi dan sebagainya, padahal kesemuanya mungkin memberi ketajaman dan ketepatan tambahan pada usaha rekonstruksi dan interpretasi peristiwa atau fakta sejarah yang dihadapinya? Tetapi sebaliknya jika semua hal itu harus diikuti secara pribadi, timbul juga pertanyaan "kapan lagi waktu tersedia untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang keilmuan sendiri?" Maka secara ideal sebuah organisasi keilmuan harus berperan juga sebagai *broker* yang mengantarei dinamika-luar itu dengan anggota komunitasnya. Di samping itu juga organisasi keilmuan harus juga menjadi perantara dari peristiwa keilmuan yang terjadi di luar tanah air. Karena itulah semestinya setiap organisasi keilmuan menerbitkan *newsletter* atau *bulletin*. Dengan pendek dan ringkas berbagai peristiwa di dalam keilmuan dapat diberitakan dan

berbagai kegiatan ilmuwan dapat pula disebarakan. Di samping itu kontak antara berbagai organisasi keilmuan dan antara para ilmuwan bisa juga dilakukan.

Suasana alternatif, yang tak lagi terikat oleh segala macam ikatan struktural, forum dialog dan komunikasi, adalah hal-hal yang *inherent* dari setiap organisasi keilmuan. Tetapi untuk apa semua itu, kalau organisasi bukan, yang *keempat*, untuk menjadi forum sebagai penjaga *the standard excellence* dari pengerjaan keilmuan ? Kalau sekiranya karya ilmiah boleh diumpamakan sebagai sebuah produk maka organisasi keilmuan semestinya harus juga bisa berperan sebagai pelaksana dari *quality control*. Peningkaran etik seperti plagiat atau sejenisnya dan pelecehan konvensi keilmuan seperti umpamanya pencampuran "*gossip*" dengan penemuan empirik bisa saja menyebabkan organisasi melakukan teguran dan sebagainya, tetapi yang paling diharapkan ialah adanya kesanggupan dan kesediaan organisasi untuk memberikan penghargaan bagi karya keilmuan yang baik. MSI baru saja sampai pada tingkat pemberian kehormatan kepada mereka yang telah berjasa dalam mengembangkan pengetahuan sejarah, tetapi belum sampai memberikan penghargaan kepada karya. Pada kesempatan pertama, ketika dilangsungkan Kongres Sejarah Nasional 1995 Jenderal Besar (Purnawirawan) A.H. Nasution, Prof. J. Resink, Prof. A. Hasymi, Rusli Amran telah diangkat sebagai "Anggota Kehormatan MSI."

Akhirnya, yang *kelima*, adalah tugas organisasi keilmuan, khususnya MSI, untuk menjaga *intellectual integrity*. Tetapi bagaimanakah sebaiknya kita memahami konsep yang mudah dikatakan, tetapi merupakan problematik ketika ingin diterapkan dalam pengalaman yang riil? Baiklah kita mulai saja dari sebuah hal yang mendasar dalam pengerjaan keilmuan. Mungkinkah penelitian dikerjakan tanpa adanya pertanyaan pokok, baik yang telah dirumuskan dengan teliti atau terjadi dalam proses dialog dengan sasaran penelitian, seperti biasa dilakukan oleh kecenderungan metodologis baru yang menjadikan peristiwa sosial sebagai "teks yang harus dibaca"? Hampir tak mungkin. Tetapi dari manakah datangnya "pertanyaan" itu ditanyakan ? Dari manapun datangnya dan apapun sumbernya, pertanyaan itu atau bahkan rangsangan dalam proses

pembacaan "teks sosial" itu, semuanya adalah hasil pilihan yang disengaja. Dalam penelitian sejarah "pilihan" ini sangat menentukan. Pergilah ke arsip atau ke museum tanpa pilihan pertanyaan, anda hanya akan kebingungan saja atau mudah-mudahan saja hanya akan menikmati segala hal yang dipamerkan atau disimpan. Tetapi fungsi arsip dan museum sebagai penyimpan sumber sejarah telah hilang. Jadi pertanyaan yang jelas harus ada. Dengan pertanyaan inilah seorang peniliti bisa bekerja.

Tetapi apakah corak pertanyaan yang dinyatakan itu ? janganlah salahkan seorang peneliti kolonial, misalnya kalau ia merumuskan pertanyaan, "Apakah sumber kelemahan struktural dari masyarakat ini?". Pertanyaan seperti ini sesuai dengan tugasnya sebagai seorang ilmuwan yang bekerja demi kepentingan kolonialisme. Kalau demikian maka bisa dikatakan bahwa sejak awal penelitian sejarah sudah harus bertolak dari landasan etis yang jelas. Maka, bagaimanakah pertanyaan yang akan diajukan seorang sejarawan nasionalis, yang prihatin terhadap masa depan bangsanya? Integritas intelektual seorang ilmuwan telah mulai menghadapi test pertanyaan awal ini dirumuskan.

Pada tahap selanjutnya, seorang ilmuwan segera berhadapan dengan permasalahan kejujuran intelektual yang harus ditempa oleh kemampuan teknis, metodologis, dan teori. Tanpa kemampuan yang memadai, maka kejujuran dengan mudah bisa "berkompromi" dengan segala macam dorongan, bujukan, hasutan, dan sebagainya, yang berada di luar wilayah penelitian. Jika saya pembicaraan dikhususkan pada penelitian sejarah, maka bisalah dikatakan bahwa tanpa dukungan keterampilan teknis yang memadai, kejujuran untuk menemukan "kenyataan faktual", demi didapatkannya "kebenaran sejarah", dengan mudah bisa tergelincir pada rayuan "kewajaran sejarah", yang normatif dan ideologis, entah yang berasal dari keharusan kekuasaan, entah yang bertolak dari kepentingan golongan. Masalahnya semakin parah juga, karena "kompromi" menyebabkan landasan atau ukuran *significance* dan *relevance* yang dipakai sang sejarawan untuk *memilih* data sebagai bagian dari fakta sejarah akan berasal dari sikap yang anti-sejarah. Ketika inilah kemudian masyarakat bisa menuduh bahwa "pemalsuan sejarah" telah terjadi maksudnya ialah sang sejarawan

telah melupakan yang *significance* dan *relevance* dan menaikkan bobot dari yang lain kepada tingkat relevansi yang tinggi.

Adanya sebuah organisasi keilmuan yang fungsional dan aktif bisa diharapkan untuk jangan sampai terjadi pengingkaran dan pelecehan terhadap integritas intelektual. Dan tak kurang pentingnya organisasi profesi bisa diharapkan untuk menjaga agar kelemahan teknis dan teoritis para anggotanya tidak sampai tergelincir pada pengingkaran kejujuran intelektual. Tidak seorang sejarawan pun, bahkan yang paling berpengalaman dan berwibawa sekalipun, yang bisa dengan mudah terlepas dari jerat apa yang disebut Fischer sebagai "*historians' fallacies*" alias "kekonyolan sejarawan".

Kelima fungsi ini merupakan dari keharusan adanya organisasi seperti MSI. Sebagai apakah ilmu sejarah hendak diperlakukan? Sebagai ilmu sosial? Karena ia juga mencoba menerangkan peristiwa kemasyarakatan berdasarkan teori-teori yang hidup dalam lapangan ilmu-ilmu sosial lainnya? atau, sebagai ilmu kemanusiaan, karena ilmu sejarah tidak mencoba membuat ketentuan yang serba umum tetapi ingin memahami segala hal yang unik dan karena sejarah juga mencoba melakukan *verstehen*, bukan saja *erklaren*? Sebagai apapun akan diperlukan, ilmu sejarah adalah hasil kerja sejarawan dalam kesediriannya. Historiografi adalah hasil rekonstruksi dan renungan sang sejarawan ketika ia hanya bertanggung jawab pada masyarakat yang ditelitinya, masyarakat pembacanya, dan dirinya sendiri. Tetapi terlepas dari segala kesendirian ini, sejarawan memerlukan sebuah komunitas keilmuan yang akan bisa mengingatkannya akan segala kemungkinan kealpaan yang bisa dilakukannya. Ia, sang sejarawan, memerlukan komunitas, karena ia juga sadar bahwa hanyalah dengan organisasi keilmuan yang sehat ini ia lebih mungkin terhindar dari bujukan atau paksaan kekuatan anti-sejarah dalam usahanya mengadakan rekonstruksi dan interpretasi sejarah. Hanyalah *peers* yang akan dapat mengingatkannya pada jurang-jurang *historians' fallacies*. Demikian organisasi keilmuan yang merupakan sebuah komunitas yang sanggup memberikan suasana alternatif, forum dialog, saluran komunikasi, penjaga mutu dan wibawa keilmuan bukan saja akan memperkuat dan menyehatkan komunitas akademis tetapi

juga mempertinggi wibawa dalam memelihara fungsi kelima terjaganya integritas intelektual.

Beberapa kasus dalam dunia akademis akhir-akhir ini, seperti berita plagiat si A atau si B adalah contoh yang sangat jelas betapa masih tidak sehatnya *academic community* kita. Tuduhan itu tidak akan terjadi kalau saja komunitas akademis terjaga dengan baik. Seketika seseorang akan tergelincir melakukan perbuatan akademis yang tercela itu, *peer*-nya yang terdekat akan memberitahukannya. Jika saja berita plagiat itu ternyata hanyalah fitnah saja, maka semakin jelaslah betapa lemahnya komunitas itu. Mengapa persaingan dalam lapangan keilmuan harus diselesaikan dengan melakukan *character assassination*?

Fungsi 1-4 itu tadi adalah wilayah komunitas keilmuan untuk menguji keabsahan akademis dan etik dan untuk mencapai tingkat tertinggi dari fungsi kelima, yaitu pencapaian integritas intelektual, yang merupakan afinitas yang utuh dari kemampuan teknis dan teoritis dengan keharuan normatif pengerjaan keilmuan. Dalam menjalankan hal ini ada tiga corak kegiatan yang bisa dilakukan. Pertama, penentuan keabsahan akademis bisakah dipertanggungjawabkan validitas dari pertanyaan-pertanyaan baru yang dimunculkan? Kedua, menguji *new foeld of investigation*, yaitu wilayah penelitian baru mempunyai harapan bagi dibukanya vista baru keilmuan atau hanya sekadar bagian dari *fads dan fashion* atau mode saja dalam penelitian. Dan ketiga, memuji apakah *new approach*, pendekatan baru bahkan teori baru dalam usaha menerangkan peristiwa bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Di MSI hal ini dimungkinkan karena satu-satunya kewibawaan yang fungsional ataupun pangkat resmi jabatan fungsional atau yang lain. Maka begitulah dengan menjalankan keempat fungsi yang telah disebut di atas dengan baik mudah-mudahan MSI bisa membina fungsi kelima dengan sempurna.

Setelah berbicara mengenai fungsi ideal dan normatif dari MSI sebagai organisasi keilmuan dan profesi para sejarawan, maka timbul juga pertanyaan sesuatu yang memang diharapkan saya bicarakan bagaimanakah MSI dapat menyumbang perbaikan dalam sistim pengajaran sejarah? Pertama, kalau sekiranya keempat fungsinya

dapat memperkuat wibawa MSI dalam menjalankan fungsinya kelima yaitu memelihara dan meningkatkan integritas intelektual maka MSI pun telah mempunyai ramai. Barangkali inilah yang bisa berhadapan dengan masyarakat ramai. Barangkali inilah yang bisa disebut sebagai *fungsi* keenam dari MSI yaitu sebagai forum yang "mempersiapkan" (dalam pengertian analogis) sejarawan untuk memberikan sumbangannya kepada masyarakat ramai.

Fungsi kelima dari MSI adalah sesungguhnya tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu keutuhan integritas intelektual, yang merupakan afinitas yang harmonis antara keprihatinan intelektual, yang terikat dengan keprihatinan bangsa dan masyarakatnya dengan kejujuran dan kemampuan akademis. Maka dengan bermodalkan hal ini secara teoritis para anggota-anggota MSI dengan penuh kepercayaan diri telah bisa juga menerjunkan diri dalam usaha mengadakan popularisasi pengetahuan sejarah. Popularisasi pengetahuan sejarah yang akan diadakan ialah pengetahuan yang bertolak dari disiplin dan etik akademis, bukan yang bertolak dari keharuan politik. Kalau telah begini maka yang menjadi masalah hanyalah untuk apa popularisasi itu dilakukan. Dan tentang hal apa popularisasi diperlukan. Pada tahap yang paling awal menjadi masalah hanyalah "berkisah" tentang peristiwa dan hal-hal masa lalu yang ingin disebarluaskan. Maka biarlah masyarakat mendapatkan kearifan dari kisah-kisah itu. Maka, begitulah bertolak dari integritas etik dan keilmuan sejarawan bisa saja berkisah tentang sejarah dan makna hari-hari besar nasional atau agama, makna historis dari "hari jadi" kota, pahlawan bangsa, dan bahkan memberi latar sejarah dari lokasi yang ingin dibina sebagai bagian dari mata rantai peristiwa budaya, dan sebagainya. Secara teknis kesemuanya menuntut keterampilan retorika dan kejernihan bahasa serta kecanggihan dalam membentuk apa yang disebut dalam bahasa keren-nya *mode of emplotment*, gaya berkisah. Tetapi popularisasi yang lebih kompleks ialah ketika kesemuanya harus diarahkan kepada anak didik, mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Bagaimanakah sejarah harus diperlakukan ?

Sebagai pribadi saya telah beberapa kali menulis makalah, berceramah, dan bahkan juga memberikan wawancara tentang dua hal yang saya anggap penting. Pertama, keharusan memperlakukan sejarah

sebagai kegiatan akademis, sebagai cabang dari ilmu pengetahuan, bukan sebagai alat indotrinasi, dan sebagainya. Sejak awal saya sangat kritis terhadap interpretasi dari keputusan MPR yang menyatakan perlunya "pendidikan sejarah perjuangan bangsa" dengan membagi sejarah atas dua bagian, yang "normatif dan efektif" dan yang "kognitif". Hal yang kedua tentang pentingnya "strategi paedagogis" dalam menentukan pengetahuan sejarah kepada anak-didik. Sebagai pengetahuan seperti apakah sejarah diberikan kepada anak-anak SD ? SMP? SMU? Tanpa perlu akan sejarah sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan dan tanpa adanya "strategi paedagogis" yang mantap pelajaran sejarah hanya akan tampil sebagai indoktrinasi yang penuh nama-nama dan tanggal-tanggal yang membosankan dan yang sepantasnya dilupakan setelah ujian dilakukan. Bukankah hal ini yang sekarang terjadi ? Baiklah saya tak mengulang hal ini di sini. Tetapi kedua hal ini membayangi pembicaraan saya tentang kemungkinan MSI dengan peningkatan mutu pelajaran sejarah.

Pertama, kita harus menyadari benar komposisi keanggotaan MSI. Siapakah mereka ? Baiklah untuk mudahnya MSI bisa saja terdiri atas dua golongan besar, yaitu "pekerja sejarah" dan "peminat sejarah". Peminat sejarah bisa terdiri dari siapa saja, entah politisi, birokrat, pengusaha dan sebagainya. Tetapi siapakah "pekerja sejarah"? Siapakah mereka yang bergumul dengan dunia kesejarahan ? Barangkali saya tidak salah kalau sekiranya saya bisa membedakan, meskipun tak memisahkan, empat corak "pekerja sejarah", yaitu peneliti, pengajar, penulis dan pemikir. Tentu bisa seseorang menjalankan keempat fungsi itu sekaligus. Tetapi secara konseptual bisalah dikatakan bahwa *peneliti* adalah ia yang mencoba menggedor *the frontiers of knowledge*, yang menembus batas-batas pengetahuan atau yang ingin memperbesar *the body of knowledge*, perbendaharaan pengetahuan tentang sejarah. Jadi peneliti boleh juga disebut *the discoverers*, penemu. Adalah para peneliti yang diharapkan bisa mengadakan verifikasi dan keabsahan dari pengetahuan yang telah dipunyai. Jadi ada kalanya apa yang sudah kita dikatakan benar itu bisa ditinggalkan. Bisa juga *the body of knowledge* itu mengalami perubahan internal. Beberapa lamakah perdebatan berlangsung tentang lokasi dari pusat sriwijaya, sebuah kemaharajaan maritim yang

kehadirannya sekian abad dalam sejarah baru diketahui di tahun 1910-an ? Kalau pembicaraan ini dibolehkan agak menyimpang sedikit, maka saya pikir-pikir ada juga untungya orang yang sebelum mempelajari dengan mendalam Sejarah Indonesia sempat mempelajari dengan lumayan Sejarah Eropa. Sebab *the body of knowledge* sejarah Eropa sangat besar dan perubahan internal sudah sering terjadi sehingga perdebatan itu bisa dilihat sebagai usaha peningkatan kemampuan teknis dan metodologis. Sebaliknya perbendaharaan pengetahuan sejarah Indonesia relatif kecil dan proses pembesaran dan pembersihannya relatif lamban, sehingga perdebatan masih tahap kronikel saja, yang berkisar pada masalah "apa, siapa, dimana dan bila". Kurang sekali tentang "bagaimana". Hampir tak ada tentang "mengapa", yang tentu saja menyangkut masalah teori dan pendekatan.

Tentu saja setiap *peneliti* harus menulis. Teks adalah satu-satunya media yang tersedia bagi peneliti sejarah untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Tetapi siapakah *penulis* ? Dalam konteks pembicaraan saya ini *penulis* adalah ia yang mengadakan popularisasi pengetahuan. Ia mungkin tidak mencoba memperbesar perbendaharaan pengetahuan, tetapi ia menyebarkan isi dari perbendaharaan kepada masyarakat ramai. Penemuan yang pelik-pelik yang disampaikan peneliti disampaikan dengan populer oleh peneliti, *the disseminator of knowledge*. Tak jarang ia pun dapat pula menyampaikan kembali kepada masyarakat dan kepada para peneliti *ingatan kolektif* masyarakat tentang berbagai peristiwa di masa lalu. Jadi, ia juga bisa berperan sebagai *local historian*. Maka, iapun menjadi *brokers of knowledge*, yang akan menyampaikan kepada peneliti, bahwa realitas tak hanya bisa dibangun dari arsip-arsip dan sumber tertulis lain, tetapi juga dari ingatan kolektif yang masih hidup. Sang peneliti pun akan bisa juga menyadari berbagai corak realitas dalam kehidupan.

Tentu saja dalam kenyataan sosial sebagian besar peneliti sejarah adalah juga pengajar sejarah, terutama di perguruan tinggi, dan banyak juga dari *penulis*, tetapi yang saya maksud dengan *pengajar* dalam konteks pembicaraan sekarang ialah ia yang lebih mengkhususkan dirinya pada hubungan tatap muka dengan khalayaknya, khususnya para guru di sekolah menengah ke bawah. Kalau penulis berusaha menyebarkan penemuan yang disajikan oleh peneliti atau kalau

memakai bahasa penelitian sejarah maka sumber utama dari penulis adalah "sumber-sekunder" (yaitu hasil studi para sejarawan peneliti), maka pengajar bukan saja harus menyampaikan secara populer, tetapi juga menentukan dengan jelas apa yang harus disampaikan kepada anak didiknya. Tak kurang pentingnya ia juga harus menentukan cara yang terbaik untuk menyampaikannya sesuai dengan jenjang-jenjang pendidikan. Karena dunia pendidikan, yang merupakan wilayah kegiatan dari para pengajar, tak terlepas dari kebijaksanaan pendidikan yang bersifat nasional, maka masalah yang dihadapi oleh pengajar ialah mencari keselarasan antara tuntutan keilmuan dengan keharusan dinas.

Sudah pasti juga bahwa sebagian *peneliti* juga merenungkan masalah kesejarahan sebagai sebuah aktivitas kultural dan intelektual, tetapi bukankah banyak juga mereka yang berkecimpung di luar dunia sejarah yang merenungkan makna sejarah dan merumuskan visi kesejarahan? Maka, dalam pembicaraan saya ini *pemikir* bukanlah bertolak dari aktivitas seseorang, tetapi hasil yang dikeluarkannya. Pak Sartono adalah peneliti sejarah, ketika ia menghasilkan bukunya yang terkenal tentang pemberontakan Cilegon (1888), tetapi ia adalah pemikir ketika ia merumuskan pendekatan sejarah yang "multidimensional". Soejatmoko bukan peneliti, tetapi ia tampil sebagai salah seorang pemikir sejarah kita yang paling terkemuka, ketika ia keluar dengan berbagai gagasan tentang sejarah. Demikianlah pemikir mengadakan *reflection*, renungan terhadap *knowledge*, apakah artinya pengetahuan ini, apakah artinya semua bagi masa depan, dan sebagainya. Pemikir juga bisa mengadakan *reflection* terhadap ilmu itu sendiri apakah ilmu ini telah mendapatkan metodenya yang tepat atau belum. Karena itu para pemikirlah yang biasa mendapatkan pendekatan baru dan pertanyaan yang baru.

Kalau demikian komposisi keanggotaan MSI maka apa yang diharapkan dari organisasi ini bagi peningkatan pengajaran sejarah sudah jelas pula. Secara anekdotis bisa dibayangkan begini. Sang *peneliti* membentuk, memperbesar, dan memperbaiki "perbendaharaan pengetahuan" sejarah. Hal ini kemudian disebarkan oleh *penulis*. Sang *pengajar*-pun, dengan memakai "strategi paedagogis", menyampaikan hal-hal yang penting kepada anak didik mereka. Kesemua aktivitas ini

direnungkan oleh *pemikir* untuk disampaikan kembali kepada peneliti dan pengajar agar usaha bangsa "mencerdaskan kehidupan bangsa", sebagaimana dirumuskan Pembukaan UUD kita. Tetapi tentu saja masalahnya tidak semudah ini. Kalau begitu apakah yang bisa diharapkan dari MSI ?

Bertolak dari asumsi MSI dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan bahwa hubungan dari keempat peranan tersebut berjalan dengan baik pula, maka tentu kita mengharapkan MSI akan tampil dengan berbagai gagasan tentang hal-hal sebagai berikut. Masalah pertama yang bisa diharapkan dihasilkan oleh MSI ialah memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya, perencana pendidikan dan para pengajar, baik yang anggota MSI maupun yang bukan, sejarah bagaimanapun, juga harus diperlukan sebagai salah cabang ilmu pengetahuan, bukan alat indoktrinasi. Adalah sebuah sikap yang anakronistik yang masih tetap memperlakukan etik dan ilmu sebagai dua hal yang harus dipisahkan. Landasan etik yang "baik" akan mudah buyar tanpa dukungan ilmu dalam konteks masyarakat modern yang pluralistik. Baiklah kita tak perlu meneruskan perdebatan tentang perlunya pembedaan sejarah yang "kognitif" dan "efektif", tetapi tujuan pengajaran sejarah haruslah dengan jelas dinyatakan sebagai pemberian landasan ilmu dan kearifan sosial untuk membentuk anak didik menjadi *men/women of culture* dalam pengertian Inggris, artinya orang yang mempunyai wawasan budaya yang baik. Bukankah ini pula sebenarnya pesan dari Pembukaan UUD kita, yang mengatakan bahwa tujuan kita mendirikan negara yang merdeka adalah antara lain "*mencerdaskan kehidupan bangsa*" ? Artinya membawa bangsa pada tingkat peradaban yang selalu menaik.

Kalau landasan ini telah diterima dan seperti telah saya berkali-kali "strategi paedagogis" telah ditentukan, maka sebagai organisasi, yang dipelihara oleh para "pekerja sejarah" yang terdiri dari empat aktivitas itu, MSI bisa juga diharapkan memberi masukan dalam beberapa hal teknis. Pertama, penentuan pilihan materi tentang peristiwa, waktu, tempat, dan tokoh penting. Bagaimanakah bisa diterangkan *human nature* dalam berhadapan dengan berbagai tantangan yang dihadapinya ? Bagaimanakah bisa dijelaskan tentang dinamika sosial dalam rentangan waktu. Akhirnya bagaimanakah

segala yang tak selamanya rasional itu bisa dijelaskan secara rasional? Bagaimanakah "kebenaran sejarah" diterangkan dengan memakaikan alur logika yang terjaga? Contoh sederhana, biasakah "penjajahan 350" diterangkan dengan meyakinkan kalau logika sejarah dipakai dengan baik? Memang kedengaran seperti masalah berat, tetapi kesemuanya harus sesuai dengan "strategi paedagogis". Kesemuanya juga tergantung pada, dan ini adalah yang kedua *mode of emplotment* atau *style of narrative* dan *mode of discourse* yang dipakaikan. Bagaimanakah *kisah sejarah* disampaikan? Dan bagaimanakah *pengetahuan sejarah* dikisahkan? Bukankah sejarah bukan hanya "cerita", tetapi juga "berita pikiran". Kini masalahnya bagaimanakah keduanya disampaikan? Akankah para guru sejarah dan buku pelajaran sibuk terus dengan tumpukan peristiwa dan angka-angka tahun? Akankah guru dan teks sibuk terus dengan segala interpretasi ideologis terhadap peristiwa? Jawabnya sederhana. Tentu saja, tidak. Pengalaman selama ini telah memperlihatkan betapa "berhasilnya" gaya ini dalam menjauhkan anak didik dari pengetahuan sejarah. Tetapi bagaimana caranya? Dalam hal ini tahap-tahap pengenalan konsep kesejarahan telah mulai ditentukan. Dan dalam hal itu pula segala persoalan gaya kebahasaan telah semestinya pula menjadi perhatian. Akhirnya lagi-lagi sejalan dengan "strategis paedagogis" ialah penentuan yang tepat dari *levels of explanation* atau tingkat kompleksitas dari keterangan-peristiwa-sejarah. Kalau keterangan ideologis, entah politik, entah agama, harus dianggap pada tahap awal sebagai sebuah sikap yang pesimistik terhadap manusia, maka keterangan yang harus diberikan haruslah berdasarkan pada faktor-faktor yang secara sosiologis dan historis bisa dipahami. Maka yang menjadi masalah ialah menentukan tingkat-tingkat *common sense* yang terpelajar yang sesuai dengan perkembangan kematangan intelektual anak didik.

Jadi kalau begitu maka peranan yang mungkin bisa dijalankan MSI dalam usaha peningkatan pengajaran sejarah adalah sebagai mitra dari perencana kurikulum dan silabus sejarah serta penulis buku pelajaran sejarah. Meskipun begitu, barangkali timbul juga gugatan seakan-akan kesemua hal-hal yang dibicarakan tidak diketahui dan disadari oleh para penanggungjawab pelajaran sejarah selama ini.

Mungkin juga begitu keadaannya. Tetapi, bukankah MSI adalah forum alternatif yang membebaskan diri dari ikatan struktural dan formal. Dalam MSI tak ada kepentingan yang digugat dan tak pula ada kepentingan yang dipertahankan, selain kepentingan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan tertinggi bagi peningkatan ilmu dan pengetahuan sejarah. Di belakang peningkatan ilmu dan pengetahuan sejarah inilah MSI merumuskan idealismenya bagi bangsa, negara dan kemanusiaan.

Semoga demikianlah hendaknya.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN SEJARAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Prof. Dr. S. Hamid Hasan

1 Pendahuluan

Dalam kebijakan dan pelaksanaan Pendidikan Sejarah di jenjang persekolahan (SD, SMTP, SMTA) ada dua masalah besar dan mendasar. Kedua masalah tersebut adalah kebijakan tentang Pendidikan Sejarah di sekolah dan kedua adalah pelaksanaan Pendidikan Sejarah itu di lapangan. Kedua hal itu berkaitan erat dimana pelaksanaan Pendidikan Sejarah di lapangan merupakan suatu kondisi yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ada mengenai Pendidikan Sejarah. Kiranya, bukanlah sesuatu yang berlebihan jika dikatakan bahwa keberhasilan dalam pendidikan sejarah di sekolah sebagian terbesar ditentukan oleh kebijakan mengenai Pendidikan Sejarah.

Kebijakan Pendidikan Sejarah berkaitan dengan keputusan tertulis yang dikeluarkan pemerintah (di tingkat pusat, propinsi, wilayah) maupun keputusan tidak tertulis yang berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan Sejarah. Kebijakan Pendidikan Sejarah dapat berupa kebijakan yang langsung maupun tidak langsung mengatur mengenai pelaksanaan Pendidikan Sejarah. Keputusan-keputusan pemerintah mengenai tujuan kurikulum dan keseluruhan komponen kurikulum

sejarah merupakan kebijakan pemerintah yang langsung berkenaan dengan Pendidikan Sejarah. Keputusan-keputusan pemerintah yang berkenaan dengan cara, prosedur, dan kriteria penilaian kurikulum di mana sejarah termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang tidak langsung berkaitan dengan Pendidikan Sejarah. Kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan perencanaan dan pengembangan pelaksanaan pendidikan di sekolah melalui proyek-proyek pemerintah dapat berupa kebijakan langsung atau tidak langsung.

Pelaksanaan Pendidikan Sejarah di sekolah adalah kegiatan yang dilakukan guru sejarah dalam menterjemahkan dan menerapkan kurikulum dan kebijakan pendidikan lain dalam proses pendidikan sejarah. Dalam masalah terakhir ini termasuk kegiatan guru sejarah dalam merancang, baik dilakukan mandiri mau pun dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGW), pandangan dan kualifikasi ilmu sejarah yang mengajar sejarah, perpustakaan dan peralatan belajar yang dapat digunakan guru sejarah. Dalam kehidupan di sekolah guru sejarah berhubungan dengan guru lain dan pandangan serta kebijakan kepala sekolah tentang proses pendidikan di sekolah tersebut. Faktor-faktor ini membentuk kebiasaan kerja profesional guru sejarah dan kebiasaan kerja ini secara langsung menentukan pandangan dan tafsiran guru sejarah terhadap kurikulum sejarah dan bagaimana guru sejarah menterjemahkan pandangan tersebut dalam bentuk perencanaan dan proses belajar. Oleh karena itu, apa yang terjadi dalam proses pendidikan sejarah di sekolah secara langsung berada di bawah tanggung jawab guru sejarah tetapi apa yang dilakukannya tidak mungkin lepas dari suasana kerja di sekolah, kepemimpinan kepala sekolah dan pengaruh dari luar.

2 Model Analisa

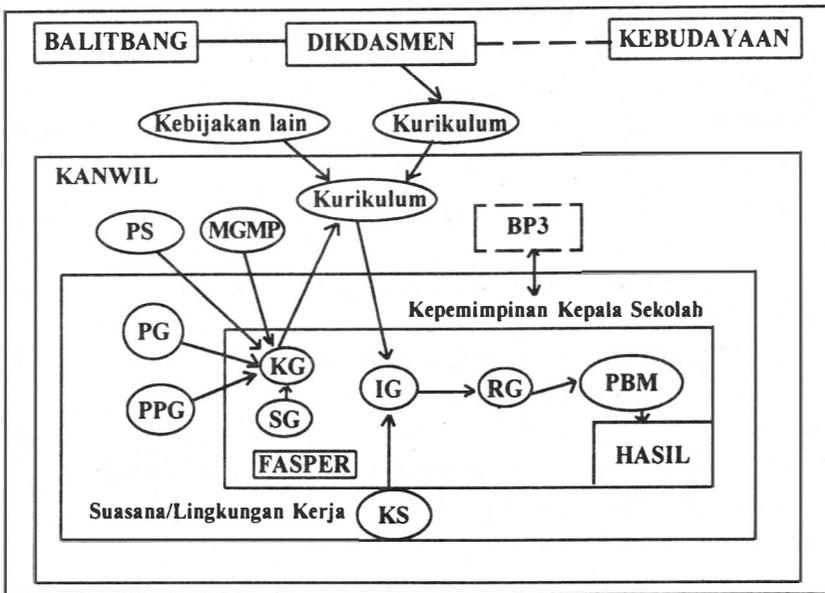
Untuk memahami keterkaitan berbagai faktor yang dikemukakan di atas diperlukan suatu cara pandang dalam melihat dan mengkaji masalah Pendidikan Sejarah. Cara pandang itu merupakan model yang menentukan apa yang harus dikaji, keterkaitan antar komponen kajian, dan analisis dan berkenaan dengan hal-hal yang makro dan mikro Pendidikan Sejarah. Secara makro model tersebut haruslah berkenaan dengan dunia Pendidikan Sejarah secara nasional pada tingkat

pemerintah pusat. Secara mikro model tersebut haruslah pula berkenaan dengan pemerintah tingkat propinsi (Kanwil Depdikbud) dan sekolah. Pembuat kebijakan pada ketiga jenjang ini berpengaruh dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan sejarah. Pembuat kebijakan pada tingkat kabupaten/kodya ataupun dibawahnya tidak dimasukkan dalam model karena kebijakan pada tingkat ini lebih banyak bersifat operasional yang tidak bertentangan dengan kebijakan di atasnya dan tidak secara langsung berpengaruh terhadap pelajaran pendidikan sejarah di sekolah.

Lembaga yang terkait pada tingkat pusat adalah Balitbangdikbud (secara khusus Pusbangkurandik dan Pusbanglitsisjian), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (terutama Dikdas, Dikmenum, dan Dikmenjur), dan yang barangkali harus juga berperan secara aktif adalah Ditjen Kebudayaan. Posisi lembaga-lembaga ini memang tidak sama dalam arti tugas pengembangan dari pembinaan yang mereka lakukan tetapi kebijakan yang dilakukan lembaga ini secara langsung dan juga tidak langsung menentukan kebijakan yang diambil oleh Kanwil, sekolah, dan apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara guru mengajar sejarah di tingkat sekolah.

Pada tingkat mikro terdapat dua jenjang yang mendasar berpengaruh terhadap apa yang dilakukan guru sejarah. Kebijakan yang dikeluarkan Kanwil karena kebijakan itu akan berpengaruh terhadap kegiatan guru sejarah antar sekolah dan di sekolah, dan kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah karena kebijakan tersebut langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan Pendidikan Sejarah di sekolah yang bersangkutan. Pada ujung tombak terakhir barulah guru sejarah sebagai variabel yang ditentukan oleh kebijakan di atasnya mengembangkan pendidikan dan harapannya mengenai Pendidikan Sejarah dalam suatu kegiatan perencanaan dan proses pendidikan.

Secara keseluruhan keterkaitan antar ketiga jenjang tersebut tergambar dalam diagram berikut ini :



PG = Pendidikan Guru; PKG = Pandangan Profesional Guru; KG = Kebiasaan Guru IG = Interpretasi Guru; RG = Rencana/Satpel Guru; PBM = Proses Belajar Mengajar; KS = Kemampuan Siswa; SG = Sejawat Guru; FASPER = Fasilitas dan Prasarana Mengajar; PS = Penilik Sekolah; MGMP = Musyawarah Guru Mata Pelajaran.

3 Kebijakan Kurikulum Tingkat Nasional

Pada tingkat nasional secara hukum, kenyataan, dan operasional kebijakan pengembangan kurikulum tingkat sekolah berada di bawah wewenang Balitbangdikbud, terutama Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Akademik (PUSBANGKURANDIK). Di lembaga ini, pemikiran dasar dan proses pengembangan kurikulum dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya merealisasikan tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan dalam GBHN, UUSPN tahun 1989, dan PP 28, 29 tahun 1990. Secara operasional, pikiran dasar dan landasan pengembangan mungkin saja berasal dari berbagai fihak yang menghubungi, dihubungi ataupun secara resmi berkaitan dengan tugas tersebut termasuk dalam hal ini adalah masukan dari pakar, masyarakat, dan tentunya kebijakan yang digariskan Mendikbud

(sebagai orang yang memiliki kewenangan tertinggi di departemen dan yang secara resmi menandatangani dokumen kurikulum). Pokok pikiran itu diolah dikembangkan dan dirumuskan sebagai ide kurikulum berupa landasan, tujuan, dan model pengembangan kurikulum.

Proses pengembangan kurikulum sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab dan kendali Pusbangkurandik. Walau pun harus diakui bahwa tanggung jawab serta kendali itu tidak mudah karena kurikulum sebagai suatu kebijakan politik-edukatif tidak lepas dari berbagai pengaruh kekuatan politis yang ada. Kenyataan ini bukan sesuatu yang unik karena di mana pun tidak ada proses pengembangan kurikulum yang dapat melepaskan dirinya dan pengaruh kekuatan politis dan hanya menggandalkan diri pada pandangan akademik-edukatif. Suatu kurikulum selalu merupakan produk "*interplay*" kekuatan politik dan pandangan akademik-edukatif

Proses "*interplay*" kekuatan politik dalam pengembangan kurikulum di Indonesia tidak berhenti ketika dokumen kurikulum dinyatakan selesai dan secara resmi ditandatangani Mendikbud serta diumumkan ke masyarakat. Proses itu berjalan terus sampai ketika kurikulum itu berada di tangan guru sejarah. Pada waktu itu tidak berarti proses "*interplay*" kekuatan politis berhenti tetapi berjalan terus dan berupa dalam bentuk yang birokrasi atau pun "*social pressure*".

Ketika kurikulum selesai dikembangkan sebagai dokumen dan dinyatakan resmi sebagai kebijakan Mendikbud, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih memiliki tanggung jawab besar yang tidak dapat dikatakan lebih kecil dibandingkan dengan tanggung jawab ketika dokumen dikembangkan. Tanggung jawab yang dimaksudkan adalah perbanyakan dan distribusi dokumen kurikulum serta sosialisasi. Tanggung jawab pertama lebih mudah dan dapat dilaksanakan dengan waktu singkat. Meskipun demikian, dalam perjalanan alur birokrasi berbagai perkembangan dapat terjadi. Ide kurikulum awal yang dikembangkan Balitbangdikbud dan sudah secara hukum dinyatakan resmi masih memiliki kemungkinan perubahan-perubahan direktorat teknis yang mungkin saja tidak selalu sepakat dengan ide yang dikembangkan dalam kurikulum akan

mendapatkan kesempatan untuk melakukan revisi. Pengaruh dari direktorat lain di dalam Depdikbud maupun di luar masih memiliki kemungkinan menggunakan "*power*" nya untuk mempengaruhi direktorat teknis yang bertanggung jawab dalam distribusi dan sosialisasi. Dalam kasus kurikulum 1994 kita ketahui misalnya tidak seluruh dokumen kurikulum (buku I, II, dan III) didistribusikan. Buku III mengalami perubahan dan distribusinya ke sekolah tidak dapat dikatakan sesuatu yang menguntungkan. Banyak guru sejarah yang tidak memiliki buku I dan III dan hanya sedikit guru sejarah yang memiliki buku II (GBPP) yang dicetak oleh departemen teknis. Kebanyakan guru sejarah hanya memiliki fotokopi buku II (yang juga sudah mengalami perubahan karena kebijakan kantor wilayah).

Sosialisasi kurikulum merupakan masalah hal yang kurang mendapatkan perhatian sebagaimana seharusnya. Dalam sosialisasi, ide kurikulum yang mendasari prinsip, tujuan, pengembangan materi, proses serta evaluasi dikomunikasikan kepada para pelaksana administrasi dan guru sejarah sehingga mereka dapat memahami ide baru kurikulum. Dalam sosialisasi itu apa yang diharapkan kurikulum dari para pejabat administratif dan guru sejarah dapat diketahui, dan berbagai ketrampilan baru yang berkaitan dengan implementasi kurikulum dilatih. Ketrampilan-ketrampilan yang baru tersebut harus diyakinkan para pelajar di direktorat teknis difahami dan dimiliki guru sejarah dan para pejabat yang terlibat dalam manajemen implementasi kurikulum.

Persoalan ini sangat kritis karena kesamaan bahasa antara para pejabat administrasi yang bertanggung jawab terhadap implementasi dengan guru sejarah merupakan tidak kritis yang dapat menggagalkan keberhasilan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Sejarah. Tafsiran yang berbeda antara para guru dengan pengawas mengenai cara mengembangkan kurikulum menimbulkan suasana kerja yang tidak harmonis dan tidak menguntungkan.

Kebijakan lain yang dikeluarkan Depdikbud mengenai pelaksanaan pendidikan memiliki pengaruh yang tidak dapat disepelekan dalam pelaksanaan pendidikan sejarah. Dalam hal ini tiga kebijakan besar yang menentukan adalah bentuk evaluasi akhir

pendidikan sejarah di SD sampai SMTA, kebijakan tentang penjurusan penjaluran di SMU, dan kebijakan DIKTI tentang mahasiswa perguruan tinggi. Evaluasi akhir untuk Pendidikan Sejarah ditetapkan sebagai : EBTA dan bukan EBANAS. Secara akademik kedua hal tersebut tidak perlu menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pendidikan sejarah. Secara akademik kedua bentuk evaluasi itu akan memberikan informasi yang sama mengenai kemampuan siswa yang belajar sejarah.

Secara politis dan sosial kedua evaluasi itu berbeda secara mendasar. Masyarakat dan siswa beranggapan bahwa mata pelajaran yang diuji secara EBANAS lebih penting dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan yang diuji melalui : EBTA. Siswa pun lebih memberikan perhatian dan upaya yang lebih tinggi dalam belajar untuk mata pelajaran EBANAS. Anggapan yang ada di masyarakat itu berpengaruh terhadap sikap belajar siswa dan menjadi beban tambahan bagi guru sejarah karena sejarah tidak diujikan dalam EBANAS.

Kebijakan mengenai posisi Pendidikan Sejarah di kurikulum berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengembangan kurikulum. Berbagai kegiatan pengembangan yang berkaitan dengan implementasi kurikulum diberikan terutama kepada mata pelajaran seperti MIPA dan bahasa (terutama bahasa Inggris). Posisi kurikuler pendidikan sejarah sebagai mata pelajaran yang wajib bagi semua siswa tidak memberi keuntungan dalam bentuk program pengembangan. Kegiatan penataran untuk guru yang dikenal dengan nama Pemantapan Kegiatan Guru (PKG) baik untuk guru SLTP dan SMU tidak satupun berkenaan dengan Pendidikan Sejarah. Sejak tahun 1984 PKG hanya mencakup mata pelajaran IPA, Matematika, Inggris, Indonesia, dan Geografi. Sejak tahun tersebut berbagai ahli sudah dikerahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam berbagai bidang tersebut tanpa memberikan hasil seperti yang diharapkan tetapi tidak ada satupun yang dirancang untuk merubah itu peningkatan mutu Pendidikan Sejarah.

Pengembangan proyek pengadaan bahan ajar bagi pendidikan sejarah satu-satunya adalah penulisan buku ajar. Proyek lain yang

berkenaan dengan penyediaan sumber belajar lain untuk Pendidikan Sejarah tidak menjadi kepedulian. Mock/model, peta sejarah, foto, kopi dokumen, dan berbagai sumber belajar sejarah lainnya tidak menarik perencana, pengambil keputusan, ataupun donatur untuk pengadaannya di sekolah. Filsafat, pandangan dan kebijakan tentang pendidikan yang tidak menempatkan Pendidikan Sejarah dalam daftar prioritas. Ada kesan kuat bahwa pandangan pendidikan yang dianut para pengambil kebijakan di tingkat nasional hanya memberi kesempatan yang besar kepada bidang MIPA dan bahasa.

Kenyataan lain yang tidak memberi dukungan bagi upaya membangkitkan minat siswa dan kualitas Pendidikan Sejarah adalah kebijakan yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang komposisi mahasiswa di masa mendatang, Ditjen Dikti menetapkan bahwa komposisi mahasiswa yang sekarang didominasi oleh banyaknya mahasiswa bidang sosial dan humaniora dibandingkan mahasiswa teknik dan MIPA (70 : 30) akan diubah menjadi dominasi jumlah mahasiswa bidang teknik dan, MPA (40 : 60). Ekonomi, akuntansi, dan manajemen akan merupakan bidang studi di bidang sasioal yang akan mendapat perhatian dan upaya pengembangan dalam jumlah mahasiswi sedangkan bidang studi lain (termasuk sejarah) bukan merupakan bidang yang dikembangkan.

Dengan kebijakan seperti ini siswa yang belajar sejarah dengan harapan agar dapat mendalami ilmu tersebut di perguruan tinggi akan mendapat hambatan. Artinya, kebijakan itu akan mempersempit kemungkinan siswa SMU mengembangkan minatnya terhadap sejarah atau bahkan jika proses hubungan karier berjalan baik di sekolah dengan orientasi sekolah untuk mempersiapkan pesertanya dengan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan di masyarakat maka kemungkinan siswa mengembangkan minatnya terhadap sejarah semakin kecil. Artinya, mereka yang berminat menjadi sejarawan akan semakin kecil dan apa yang dikatakan Christian (1997) akan menunjukkan bukti yang semakin kuat bahwa sejarah di Indonesia hanya ditulis oleh "*a handful of historians at Jakarta and Yogyakarta*".

Keadaan yang dikemukakan di alinea di atas tak pelak lagi akan menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan kebangsaan. Bangsa ini mungkin akan menjadi bangsa yang secara ekonomi dan teknologi

kuat tetapi kehilangan jati diri. Fenomena seperti itu sudah mulai muncul pada bangsa Jepang. Semangat Jepang sudah mulai meluntur sementara *Total Quality Management* yang semula diperkirakan sebagai karya Jepang dan berakar pada budaya Jepang ternyata berasal dari Amerika Serikat dan dibesarkan di Jepang.

4 Kebijakan Di Tingkat Propinsi

Kebijakan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Sejarah di suatu propinsi tidak mungkin dilepaskan dari kebijakan yang dikeluarkan Kantor Wilayah. Kebijakan tersebut dapat saja berupa keputusan yang langsung dikeluarkan oleh Kakanwil tetapi dapat juga berupa keputusan yang dikeluarkan oleh instansi dibawahnya seperti Kabid Dikmenum, Kabid Dikmenjur, dan sebagainya. Materi kebijakan dapat saja berkenaan dengan proses Pendidikan Sejarah tetapi dapat juga berupa hal-hal umum berkaitan dengan implementasi kurikulum.

Tiga hal pokok yang berkenaan dengan kebijakan tingkat propinsi adalah GBPP kurikulum, MGMT, EBTA, Supervisi dan kenaikan kelas. Kenyataan yang ada di lapangan tentang ketiga hal tersebut berbeda-beda di setiap propinsi walaupun terdapat kesamaan-kesamaan tertentu.

Pelaksanaan kurikulum 1994 berbagai propinsi telah mengalami perubahan terutama dalam karakteristik kurikulum yang tercermin dalam GBPP. Di berbagai propinsi tersebut, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta GBPP kurikulum 1994 telah diubah sedemikian rupa sehingga ia menjadi GBPP kurikulum sebelumnya (1984). Memang tujuan dan pokok bahasan masih berasal dari tujuan dan pokok bahasan GBPP kurikulum 1994 tetapi kebebasan guru dalam mengembangkan GBPP telah dibatasi dengan penentuan waktu, metode, dan sumber belajar. GBPP baru tersebut dikembangkan dalam pertemuan MGMP. Dengan perubahan tersebut secara prinsipil kurikulum yang berlaku bukan lagi kurikulum 1994 tetapi revisi dari kurikulum tersebut. Ketiadaan sosialisasi kurikulum tampaknya menjadi pendorong utama perubahan tersebut. Guru tidak siap melaksanakan kurikulum baru karena mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang pokok pikiran kurikulum dan tidak dilatih untuk melaksanakan GBPP yang ada.

Kegiatan MGMP dilaksanakan untuk menghasilkan GBPP Pendidikan Sejarah dan kisi-kisi untuk tes yang digunakan untuk seluruh guru sejarah. Strategi semacam ini tidak saja mengecilkan arti kurikulum Pendidikan Sejarah yang berlaku (1994) tetapi juga bertentangan dengan dasar dan prinsip pendidikan. Pendidikan yang harus disesuaikan dengan kemampuan siswa dan masalah yang dihadapi siswa tidak dapat dilakukan karena produk bersama yang dihasilkan dalam MGMP. Visi, pandangya tradisional dan akuntabilitas guru sebagai pemegang profesi dikurangi secara mendasar oleh kegiatan yang ada. Tentu saja, keadaan seperti ini tidak menguntungkan karena hasil belajar sejarah sudah dapat dikatakan tidak akan mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kurikulum. Guru kehilangan kemampuan individualnya untuk secara profesional menentukan apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.

Kegiatan pelatihan Pementapan Kerja Guru (PKG) tidak pula mengarahkan permasalahannya pada pelatihan ketrampilan yang dimaksudkan. Untuk Pendidikan Sejarah, kenyataan tentang PKG ini memang tidak membuat perbedaan karena tidak ada PKG Pendidikan Sejarah. PKG tidak mampu mengangkat kualitas pendidikan di Indonesia walaupun PKG dalam bentuk kegiatan dapat dikatakan sebagai suatu keberhasilan.

Permasalahan dalam implementasi kurikulum Pendidikan Sejarah pada tingkat propinsi tergambar pula dalam kenyataan tentang EBTA. EBTA dikembangkan oleh guru sejarah dengan panduan yang jelas. Ini sesuatu yang mengunungkan karena guru dapat melakukan tugasnya dengan jelas pula. Sayangnya, sebagai akibat dari tujuan pelajaran sejarah yang dikembangkan guru dalam MGMP bersifat penguasaan fakta sejarah maka EBTA sebagai suatu uji untuk apa yang sudah dipelajari siswa juga mengarah kepada penguasaan fakta-fakta sejarah. Kemampuan-kemampuan lain yang dapat dikembangkan melalui Pendidikan Sejarah seperti kemampuan berfikir, daya nalar, dan ketrampilan prosedural sejarah dalam ranah kognitif, semangat kebangsaan serta rasa cinta sejarah dalam ranah afektif tidak teruji karena tidak juga dikembangkan.

Adanya EBTA dan syukur jika dapat ditingkatkan menjadi EBANAS adalah sesuatu penting untuk mengukur kualitas Pendidikan Sejarah di tanah air. Di banyak negara Pendidikan Sejarah telah memiliki suatu standar nasional. Di Amerika Serikat, misalnya, telah dikeluarkan suatu standar kurikulum baik bagi sosial studies maupun Pendidikan Sejarah. *National Council for Social Studies* (1994) misalnya telah menghasilkan sepuluh tema yang menjadi standar kurikulum yaitu *"culture; time, continuity, and change; people, places, and environments; individual development and identity; individuals, group, and institutions; power, authority, and governance, production, distribution, and consumption; science, technology, and society; global connections; civics ideals and practices"*.

National Center for History in the Schools (1996) mengeluarkan *"National Standards for History"* yang terbagi atas *"Standards in Historical Thinking"*, *United States History Standards for Grades 5 -- 12*, dan *World History Standards for Grades 5--12*". Dalam *historical thinking* dikatakan sebagai kemampuan *"to differentiate past, present and future; raise questions; seek and evaluate evidence, compare and analyze historical stories, illustrations and records from the past; interpret the historical record; and construct historical narratives of their own"* (NCHS, 1996:2). Sedangkan tentang sejarah Amerika Serikat dan sejarah dunia, NCHS mengemukakannya sebagai standar dalam *"historical understandings"* yang diartikan sebagai apa yang harus diketahui siswa tentang keluarganya, masyarakatnya, negara bagiannya dan dunia. Selanjutnya dikatakan *"these understandings are drawn from the record of human aspirations, strivings, accomplishments, and failures in at last five spheres of human activity: the social, political, scientific/technological, economic, and cultural (the philosophical/religious/aesthetic), as appropriate for children"*,(NCHS, 1996:2).

Sebagian (besar) dari standar yang dikemukakan oleh NCHS dikembangkan dalam kurikulum Pendidikan Sejarah tahun 1994. Memang dalam kurikulum tersebut tidak disebut sebagai suatu standar dan dijelaskan dalam buku III kurikulum. Sayangnya, buku III kurikulum yang menjelaskan tentang berbagai hal yang baru mendapat perhatian guru, termasuk kemampuan berfikir dan prosesual,

tidak sampai ke guru sejarah. Guru sejarah tidak tahu apa yang ada dalam buku III padahal buku tersebut akan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang, diperlukan untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Sejarah yang berlaku. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, direktorat teknis tidak "berminat" memperbanyak dan mendistribusikan buku tersebut. Kanwil Depdikbud dapat mengambil alih tugas tersebut tetapi dalam kenyataannya hal itu pun tidak terjadi. Dalam kondisi di mana guru tidak mendapatkan sosialisasi kurikulum secara sebagaimana seharusnya, tidak memiliki panduan yang tercantum dalam buku III, serta keadaan bimbingan yang seharusnya menjadi hak profesional guru, guru sejarah dibiarkan sendiri melaksanakan kurikulum yang berlaku. Dengan keadaan yang demikian maka tidaklah heran jika MGMP mengarahkan kegiatannya kepada hal yang teknis dan langsung berkaitan dengan persiapan siswa menghadapi EBTA.

5 Pelaksanaan Pendidikan Sejarah di Sekolah

Dalam keadaan seperti yang dikemukakan di atas guru yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan sejarah memang berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Tuntutan yang ada berdasarkan kebijakan serta kekurangan yang mereka hadapi dalam melaksanakan kurikulum 1994 menempatkan mereka dalam posisi yang sangat tertekan. Mereka tidak dalam posisi yang baik untuk mengembangkan wawasan profesional mereka dalam pendidikan sejarah. Mereka harus bergelut dengan kondisi yang tidak mendukung pengembangan kurikulum secara maksimal. Oleh karena itu, kenyataan proses pendidikan sejarah memang belum menggembirakan dan guru sejarah dalam posisi yang lemah sehingga semua kelemahan dialamatkan sebagai kesalahan mereka.

Dari studi survei yang dilakukan penulis akhir-akhir ini diketahui bahwa di SMP hanya 49% guru yang mengajar sejarah memiliki latar sejarah. Sebagian terbesar dari mereka adalah tamatan jurusan lain di lingkungan IPS dan bahkan ada yang tidak memiliki latar ilmu-ilmu sosial. Untuk SMU sebagian terbesar guru sejarah memiliki latar sejarah (90%). Angka ini cukup menggembirakan karena dengan latar pendidikan itu mereka memiliki dasar yang cukup baik untuk

mengembangkan kurikulum walaupun harus diakui pula mereka yang memiliki pendidikan SI hanyalah 65%. Dengan kondisi yang demikian jika sosialisasi kurikulum terjadi, prinsip dan ketentuan kurikulum mereka punyai dan dalam pelajari, mereka dalam posisi yang kuat untuk melaksanakan kurikulum dibandingkan sejawatnya yang ada di SMP.

Pada dasarnya guru yang mengajar sejarah memahami tujuan yang akan dicapai oleh kurikulum pendidikan sejarah tetapi mereka menghadapi kendala yang klasik yaitu waktu. Kekurangan waktu dirasakan sebagian terbesar guru (70%) sebagai sesuatu yang tak dapat mereka selesaikan dalam hal ini mudah dipahami jika disadari bahwa mereka harus menyelesaikan keseluruhan target kurikulum berdasarkan tuntutan EBTA. Mereka tidak memiliki alternatif lain untuk menyelesaikan target kurikulum kecuali hanya dengan kriteria EBTA karena mereka akan dituntut pertanggungjawabannya terhadap siswa. Guru akan mendapat masalah besar jika ada bahan yang diujikan dalam EBTA belum diajarkan kepada siswa.

Sementara sebagian besar pertanyaan yang diajukan dalam EBTA berkaitan dengan pengetahuan tentang fakta sejarah maka sebagian besar guru sejarah (71,4%) mengarahkan pengajarannya kepada pencapaian tujuan ini. Jumlah guru yang mencoba mengembangkan tujuan lain sebagai tujuan utamanya sangat kecil (mencotoh perjuangan 10%; mengembangkan semangat kebangsaan 12%, dan mengembangkan kemampuan berfikir 6%). Kenyataan ini merupakan masalah akut dan harus segera mendapatkan perhatian para pengelola dan pengambil kebijakan dalam pelaksanaan pendidikan sejarah. Guru sejarah harus segera dapat dibebaskan dari kondisi yang mencekam ini jika keseluruhan spektrum tujuan kurikulum sejarah hendak dicapai, apalagi jika tujuan itu berkaitan dengan kemampuan berfikir, prosesusal, dan juga sikap diri sebagai pribadi, anggota bangsa, dan anggota masyarakat dunia.

Kesulitan lain yang juga klasik dan dikemukakan guru sejarah sebagai faktor penghambat bagi mereka untuk mengembangkan tujuan pendidikan sejarah sebagaimana yang dituntut kurikulum dan juga yang mereka ingin capai berdasarkan pandangan profesional mereka (berfikir, minat terhadap sejarah menarik pelajaran dari masa lampau,

penghargaan terhadap perjuangan, membangkitkan semangat kebangsaan, untuk kehidupan masa depan) adalah kesulitan dalam buku sumber alat belajar-mengajar (75,71%) sementara lainnya beranggapan bahwa faktor minat (12%) dan jadwal (8%). Sementara yang menjawab buku sumber dan alat belajar-mengajar ada yang mengatakan bahwa buku sumber yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan mereka untuk mengembangkan proses pendidikan yang sesuai untuk mencapai tujuan belajar sejarah seperti kemampuan berfikir dan prosesual (60%) sebagian lain menjawab bahwa buku sumber serta alat belajar-mengajar tersedia bahkan tidak mampu mencapai tujuan yang tertuang dalam kurikulum.

Sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepada guru sejarah keterbatasan yang mereka miliki dalam sumber dan waktu maka sebagian terbesar guru sejarah (95,71%) menggunakan metode ceramah dan ceramah bervariasi dalam proses mengajar sejarah. Metode ini memang mampu memberikan informasi yang banyak dalam waktu yang singkat tetapi metode ini tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan tujuan kurikulum sejarah dalam aspek kognitif tinggi dan efektif.

Meskipun demikian harus diakui pula dengan metode ceramah guru dapat menghemat tenaga. Pemanfaatan metode lain seperti ketrampilan proses, inkuiri, *discoveri*, bermain peran, dan lainnya memerlukan persiapan yang memakan waktu banyak dan evaluasi yang memerlukan waktu banyak pula. Guru sejarah tidak memiliki kemewahan seperti itu. Sebagian besar (70%) guru sejarah mengajar 18 jam atau lebih dan hanya 27% yang mengajar di bawah 12 jam. Untuk itu artinya mereka harus mengajar antara 4--9 kelas walaupun ada yang lebih bahkan ada yang mengajar sampai 12 kelas.

Evaluasi hasil belajar yang dilakukan guru sejarah sebagian besar masih dalam bentuk "*pencil and paper test*" walaupun sudah ada variasi dalam bentuk objektif dan uraian. Evaluasi ini masih ditujukan kepada pengetahuan sejarah siswa berdasarkan apa yang telah dibahas di kelas. Pengetahuan sejarah di luar yang diajarkan di kelas belum masuk dalam kisi-kisi evaluasi guru. Demikian pula evaluasi terhadap kemampuan berfikir dan prosesual siswa masih belum mendapat tempat sebagaimana mestinya.

Beban kerja yang demikian tentu melelahkan dan dengan demikian tidaklah heran jika guru mengambil jalan yang terbaik dalam mengatasi keterbatasan yang ada. Sebagai gambaran beban kerja yang seharusnya dilakukan guru dapat diambil contoh guru yang mengajar sebanyak 9 kelas dengan masing-masing kelas memiliki 40 siswa. Jika guru tersebut harus melakukan tugas profesinya sebagaimana mestinya maka ia harus menyediakan waktu setiap minggu sebagai berikut :

a. Persiapan mengajar	=	9 jam
b. Kegiatan kelas	=	15 jam
c. Bimbingan siswa	=	9 jam
d. Kegiatan penilaian 360 x 20 menit	=	120 jam
e. Kegiatan administrasi	=	4 jam
	<hr/>	
	Jumlah	148 jam

Jumlah itu mengandung arti bahwa setiap hari guru harus bekerja selama 16 jam. Tidak akan ada orang yang mampu bekerja setiap hari 24 jam apalagi lebih. Jika ada orang mampu bekerja selama 12 jam satu hari maka itu adalah suatu prestasi yang cemerlang dan kebanyakan kita hanya mampu bekerja selama 8--10 jam sehari secara efektif. Dengan demikian, berdasarkan jam kerja yang ada tidak mungkin guru sejarah melaksanakan tugas profesionalnya seperti sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk meringankan beban kerja walaupun upaya itu *at the cost of* pendidikan sekolah yang diharapkan. Ini kenyataan pahit yang tidak menyenangkan, membahayakan, dan tidak seharusnya terjadi tetapi pengambil kebijakan baik tingkat pusat, daerah apalagi sekolah tidak memiliki jalan keluar yang nyata.

Kenyataan lain yang menjadi hambatan bagi guru sejarah untuk mengembangkan pendidikan sejarah sebagaimana yang diharapkan kurikulum adalah keterbatasan/ketiadaan dana. Direktorat teknis, Kanwil maupun sekolah tidak menyediakan dana khusus untuk pelaksanaan kurikulum sejarah. Kurikulum yang ada menghendaki adanya fasilitas-fasilitas belajar tertentu dan biaya operasional tertentu baik untuk guru mau pun untuk siswa. Guru harus membeli buku baru dari kantong sendiri, sekolah tidak menyediakan alokasi khusus untuk mengisi kebutuhan kurikulum sejarah, dan proyek di tingkat Kanwil

dan Pusat tidak ada yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum sejarah.

Dukungan masyarakat yang kurang merupakan keluhan lain yang dihadapi guru. Pada dasarnya orang tua tidak terlalu merisaukan anaknya yang tidak dapat nilai baik dalam sejarah walaupun pengetahuan tentang sejarah nasional merupakan persyaratan bagi warganegara. Orang tua akan bertanya dan risau jika anaknya dapat nilai jelek dari matematika, bahasa Inggris, atau pun IPA. Ini dianggap utama dan menjadi kepedulian utama.

Kondisi kerja yang tidak mendukung pengembangan suatu lingkungan profesional mendidikan di sekolah merupakan sesuatu yang cukup menggelisahkan. Selain dalam MGMP antara guru sejarah, komunikasi guru sejarah dengan sejarah dari bidang lain di sekolah dapat dikatakan tidak terjadi. Komunikasi profesional yang ada, hanyalah bersifat *accidents* secara kebetulan seorang guru bertanya kepada guru lain. Komunitas profesional tidak berkembang di sekolah yang mungkin disebabkan karena kejelasan, beban mental, atau hal lainnya. Dialog yang tetap antar guru berkenaan dengan hal-hal yang di luar kegiatan profesi.

6 Penutup

Pelaksanaan kurikulum pendidikan sejarah di lapangan masih banyak menghadapi masalah yang mendasar. Masalah tersebut berkaitan dengan kebijakan yang tidak menguntungkan dan suasana kerja yang tidak memberi kesempatan kepada guru untuk mengembangkan visi dan kemampuan profesionalnya secara baik.

Dalam keadaan seperti sekarang ini upaya perbaikan pendidikan sejarah haruslah diarahkan pada upaya pendidikan dalam berbagai sektor dan jenjang yang terkait. Kesenambungan kebijakan, dukungan fasilitas dan dana, serta jam kerja yang lebih riil sudah harus mendapatkan perhatian utama dalam upaya perbaikan mutu Pendidikan Sejarah di tanah air, dan mungkin pendidikan lainnya.

Daftar Bacaan

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1991). *Buletin PKG/SPKG Pendidikan Menengah*. Tahun Anggaran 1990/1991, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1993). Dengan Pemantapan Kerja Guru Kita Siapkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Untuk Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. Jakarta.
- Faust, D.G. *What Do We Want History To Do?* The National Council for History Education.
- Hasan, S.H. (1997a). Problema dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. *Makalah* disajikan di forum Dikmenum.
- Hasan, S.H. (1997b). Pengembangan Pendidikan Sejarah Kawasan dalam kurikulum 1994. *Makalah* disajikan pada forum Pertemuan Guru Sejarah di Tasikmalaya.
- Hasan, S.H. (1996). Pandangan Dasar Mengenai Kurikulum Pendidikan Sejarah, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Bandung : IKIP Bandung.
- Hasan, S.H. (1990). Evaluasi Implementasi Kurikulum Sejarah di SMA. Bandung. *Laporan Penelitian*.
- National Center for History in the Schools (1996), *National Standards for History*. Los Angeles : UCLA
- National Council for the Social Studies (1994), *Curriculum Standards for the Social Studies Expectations of Excellence* Washington DC. NCSS.

DASAR FILOSOFIS KURIKULUM SEJARAH¹

Hafid Abbas²

1 Rasional

Ada beberapa kenyataan yang mendesak kita untuk segera melakukan kajian filosofis kurikulum dan pengajaran sejarah yang dilaksanakan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan.

Pertama, akhir-akhir ini kultur keteladanan tampaknya semakin memudar dalam khasanah kehidupan bermasyarakat di tanah air kita. Tokoh-tokoh panutan di masyarakat tampaknya semakin langka. Semangat nasionalisme, heroisme, patriotisme dan sejenisnya oleh berbagai kalangan yang sering menulis di koran-koran dinyatakan semakin memudar.³ Sebaliknya, nilai-nilai baru seperti : *individualisme, konsumerisme, alkoholisme, sadisme* dan berbagai isme-isme lainnya tampak cenderung begitu cepat merasuk ke sendi-sendi dasar kebudayaan nasional kita. Sekiranya kecenderungan ini tetap terjadi, berbagai kerawanan sosial, ekonomi dan politik akan timbul dan akan sangat mempengaruhi kemampuan daya saing bangsa dalam memasuki era persaingan bebas yang semakin kuat intensitasnya di penghujung abad ini.

Kedua, akhir-akhir ini pengajaran sejarah yang dilaksanakan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan memberi kesan yang kuat hanya bersifat kognitif dan cenderung bersifat hafalan. Anak didik dengan

prestasi akademik yang tinggi terutama di bidang sains dalam berbagai hal cenderung melihat pendidikan sejarah sebagai kajian yang kering dan tidak bermanfaat untuk menyangga proses kemandirian mereka dalam memasuki era iptek yang semakin kuat intensitasnya menjelang era baru milenium ketiga.

Ketiga, pendidikan sejarah tampaknya dilakukan secara terisolasi dari kenyataan kekinian. Ia dibahas sebagai suatu disiplin yang terpisah dari psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan sebagainya. Pendidikan sejarah cenderung dilakukan dengan pendekatan konformitas sesuai dengan kepentingan muatan politik tertentu. Akibatnya, pendidikan sejarah sering memberi makna *his story* bukan *history*. Sejarah sesungguhnya bukanlah peristiwa melainkan orang. Dan sejarah bukan hanya sekedar mengingat masa lampau, tetapi ia adalah cerminan aktivitas kehidupan manusia di masa lampau pada masa kini. Sejarah ibarat kompas bagi kehidupan atau dasar bagi seorang pilot untuk mengambil keputusan, karena ia adalah kristalisasi dari semua pengetahuan, semua ilmu, dan semua yang telah dipelajari sejak manusia ada.⁴

2 *Filosofi Kurikulum Sejarah*

Pada hakikatnya dasar filosofis kurikulum sejarah dapat disoroti dari berbagai perspektif. *Pertama*, landasan filosofis pendidikan sejarah seyogyanya difokuskan pada bagaimana sejarah mengungkapkan dimana kebudayaan yang mendasari cara berpikir manusia, bagaimana imajinasi manusia berkembang tanpa batas, melawati batas ruang dan waktu antar generasi. Dalam perspektif ini, sejarah merupakan transmisi tingkah laku dan sumber dinamika untuk perubahan, kreativitas, kemerdekaan dan kebangkitan (*awakening*) untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada secara inovatif. Bagi banyak kalangan terutama di dunia akademik, dan kemungkinan masyarakat luas suasana seperti itu merupakan kekuatan, sumber inspirasi dan proses pemberdayaan, yang dapat mengantarkan mereka untuk menanjak setahap demi setahap atau meloncat tiba (*quantum leap*) dalam perolehan ilmu dan teknologi baru⁵ dan penumbuhan kearifan terhadap kebhinekaan.

Demikian pula upaya untuk membangun perdamaian dan perwujudan nilai-nilai demokratis, hak asasi, pendidikan sejarah tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial ekonomi dan politik pendidikan sejarah seyogyanya mengangkat nilai-nilai universal yang terkandung dari setiap bentuk budaya manusia. Penekanan pada nilai-nilai pendidikan sejarah yang berdimensi ekonomi dan politik akan kering apabila terpisah dari nilai-nilai dan hak-hak sosial manusia secara universal.

Kedua, pendidikan sejarah seyogyanya bersentuhan dengan nilai-nilai baru. Nilai-nilai baru ini merupakan akumulasi dari suatu proses panjang yang terjadi sebelumnya. Ia multikompleks, bergerak terus menerus sehingga sesuatu yang baru sangat nisbi dan bersifat temporer. Dalam perspektif ini, pendidikan sejarah mengungkapkan tantangan kemanusiaan yang dihadapi secara terus menerus, yakni bagaimana cara manusia menyesuaikan diri terhadap perubahan melalui pembaruan cara berpikir, pembaruan cara bertindak, pembaruan dalam menempatkan diri di tengah-tengah kehidupan masyarakat, singkatnya cara baru menjalani kehidupan. Inilah tantangan kemanusiaan yang harus disentuh pendidikan sejarah untuk mendorong terjadinya perbedaan dan saling ketergantungan dalam semua spektrum kehidupan. Sehingga pada gilirannya, proses penajakan manusia dalam ilmu, teknologi dan kebudayaan terjadi karena inspirasi perbedaan. Inspirasi ini pula perlu disentuh oleh pendidikan sejarah agar masyarakat dapat membangun harapan-harapan masa depannya sendiri dan berupaya mencari jalan untuk mewujudkan impian-impian itu.

Sejarah kemanusiaan telah melewati perjalanan yang sangat panjang. Namun kita belum dapat, sepenuhnya mengakui perbedaan, saling menghargai dan menghormati perbedaan itu, belum sepenuhnya mampu bekerja sama dan saling membantu di atas perbedaan itu. Pengalaman panjang ini seyogyanya mengilhami kita semua untuk memahami makna kehidupan yang sebenarnya. Paradigma lama yang menerima kearifan kehidupan apa adanya, perlu dikaji tilang dan direkonstruksi kembali. Imajinasi, visi dan kreativitas baru diperlukan untuk memberi maksud baru kehidupan. Ini berarti bahwa, pikiran harus terbuka, hati harus dilapangkan dan kesediaan mencari definisi

baru, rekonsiliasi terhadap perbedaan-perbedaan, dan membantu memetakan alam kejiwaan baru.

Ini berarti pendidikan sejarah seyogyanya diarahkan untuk menumbuhkan kesediaan berintrospeksi yang pada gilirannya dapat menyentuh rasa kemanusiaan pada pengalaman pahit dan manis orang lain. Sentuhan nilai kemanusiaan ini pada suatu saat dapat menjadi konstelasi terwujudnya keselarasan kepentingan individu dan kepentingan kemanusiaan secara keseluruhan. Inilah menjadi agenda, pendidikan sejarah yang memasukkan empati dan menghargai keseluruhan spektrum perbedaan dalam kehidupan manusia.⁶

Ketiga, kenyataan baru terjadi secara global, manusia berinteraksi sangat dinamis melewati batas-batas kelembagaan. Batas-batas geografis suatu negara, dan batas-batas ideologi dan politik, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain kenyataan juga menunjukkan meningkatnya ketimpangan global secara sosial, ekonomi dan politik yang dapat mempertajam dikotomi utara dan selatan, barat dan timur, dan sebagainya. Meskipun struktur *bipolar* dunia telah runtuh, namun kenyataan menunjukkan dominasi negara maju dalam memperebutkan sumber-sumber alam yang semakin terbatas tampak amat menyolok. Penguasaan teknologi kekuatan ekonomi dan sistem nilai yang melekat pada tatanan kehidupannya telah mempersempit ruang gerak kehidupan masyarakat di negara dunia ketiga. Akibatnya masyarakat negara dunia ketiga tetap berjuang untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih adil sehingga dominasi negara maju terhadap perebutan sumber-sumber tersebut akan mengalami stagnasi. Dalam situasi seperti ini tetap akan muncul berbagai bentuk ketegangan (*tensions*) secara okonomi, sosial dan politik secara global.

Dalam kaitan ini, pendidikan sejarah perlu mentransfer nilai-nilai etik dan moral yang mendasari cara berpikir, cara sikap dan cara berperilaku seseorang untuk mewujudkan keharmonisan kehidupan individu, kelompok masyarakat atau bangsa dalam membangun perdamaian, toleransi dan kesediaan menerima perbedaan.

3 *Kurikulum Pendidikan Sejarah*

Pendidikan sejarah sebagai bagian dari proses penanaman nilai-nilai yang fungsional untuk menanamkan pengetahuan. Sikap dan tingkah laku yang lebih rasional dalam diri individu untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan alamnya secara universal, maka kurikulum tersebut berkaitan dengan berbagai aspek disiplin lainnya. Sejarah bukan hanya sekedar catatan untuk mengenang masa lampau, tetapi ia adalah cerminan aktivitas kehidupan manusia di masa lampau yang dapat dipelajari pada masa kini. Sejarah adalah kristalisasi dari semua pengetahuan, semua ilmu, dan semua yang telah dipelajari sejak manusia ada.

Dengan demikian pendidikan sejarah tidak hanya diarahkan untuk menanamkan pemahaman masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa tentang adanya perkembangan masyarakat kebangsaan dan cinta tanah air serta masa bangga sebagai warga bangsa Indonesia dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antarbangsa di dunia, namun ditekankan pula pada berbagai kegiatan yang dapat memberi pengalaman yang dapat menubuhkan rasa kebangsaan dan kecintaan pada manusia secara universal. Dengan demikian akan terdapat perubahan cara berpikir, bernalar, kematangan emosional dan sosial, serta meningkatkan kepekaan perasaan dan kemampuan mereka untuk memahami dan menghargai perbedaan.

Bertolak dari dasar pertimbangan tersebut, tampaknya penting kurikulum pendidikan sejarah dilakukan dengan pendekatan metadisiplin.

Pertama, pendidikan sejarah dalam perspektif ekonomi diarahkan pada pemberian pengetahuan konsep-konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi secara kritis dan obyektif untuk mata pencaharian ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada anak didik mengenal beberapa konsep dan teori ekonomi sederhana untuk menjelaskan fakta peristiwa dan masalah ekonomi yang dihadapi. Selain itu, kegiatan proses belajar mengajar dapat ditekankan pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan penguasaan konsep-konsep ekonomi dan

menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya secara kritis dan obyektif.

Kedua, pendidikan sejarah dalam perspektif sosiologis diarahkan pada pemberian kemampuan memahami secara kritis berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang muncul seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya, menanamkan kesadaran perlunya ketentuan hidup bermasyarakat, dan mampu menempatkan diri di berbagai situasi sosial-budaya sesuai dengan kedudukan, peran, norma, dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Selain itu, kegiatan Proses Belajar Mengajar dapat menekankan pada kegiatan yang dapat meningkatkan penguasaan siswa memahami secara kritis berbagai persoalan sosiologis dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari.

Ketiga, pendidikan sejarah dalam perspektif geografi diarahkan pada pembekalan kemampuan dan sikap rasional yang bertanggung jawab dalam menghadapi gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta permasalahannya yang timbul akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Selain itu, kegiatan proses belajar mengajar dapat ditekankan pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan penguasaan siswa memahami secara kritis berbagai persoalan geografis dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari.

Keempat, pendidikan sejarah dalam perspektif antropologis bertujuan untuk membekali siswa, pengetahuan mengenai proses terjadinya kebudayaan, pemanfaatan dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari; menanamkan kesadaran perlunya menghargai nilai-nilai budaya suatu bangsa, terutama bangsa sendiri, menanamkan kesadaran tentang peranan kebudayaan dalam perkembangan dan pembangunan masyarakat serta dampak perubahan kebudayaan terhadap kehidupan, bermasyarakat. Selain itu, kegiatan yang dapat ditekankan pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan penguasaan siswa memahami secara kritis berbagai persoalan soantropologis dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari.

4 Pengembangan Kurikulum Pendidikan Sejarah

Dalam pengembangan kurikulum pendidikan sejarah perlu dilakukan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan yang sesuai

dengan ciri fleksibilitas, realistik dan berorientasi pada kepentingan ke depan. Kriteria tersebut diturunkan secara konsisten dari tujuan masing-masing bidang studi atau matapelajaran. Topik-topik ini mempunyai ciri bahwa topik tersebut cukup representatif, esensial, multivalensi, dan menarik. Dengan demikian suatu topik akan dipilih dan dikembangkan apabila memenuhi kriteria berikut :

Pertama, seberapa jauh suatu topik yang ada dalam kurikulum tersebut diperlukan sebagai bekal baik untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dasar untuk memperoleh pengetahuan baik untuk kepentingan melanjutkan pelajaran ke jenjang pendidikan menengah, maupun untuk kondisi tertentu kemampuan tersebut dapat digunakan apabila terjun ke masyarakat.

Kedua, seberapa jauh suatu topik yang ada dalam kurikulum tersebut berperan sebagai prasyarat dan/atau tumpuan bagi topik-topik lain tidak hanya dalam rangka pembentukan dan pemilihan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang fungsional untuk memperoleh mata pencaharian melainkan juga topik tersebut diperlukan sebagai dasar untuk belajar di jenjang pendidikan menengah. Meskipun tidak merupakan prioritas untuk kepentingan melanjutkan pelajaran, kemungkinan suatu topik diperlukan sebagai dasar untuk memberikan nilai tambah bagi topik-topik lain.

Ketiga, seberapa jauh suatu topik yang ada dalam kurikulum tersebut mewakili keterpakaian (*applicability*) yang amat luas sehingga memberi kemungkinan penggunaan yang lebih besar untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang selalu berubah/berkembang apabila terjun ke tengah-tengah masyarakat.

Keempat, seberapa jauh suatu topik yang ada dalam kurikulum tersebut dapat menumbuhkan minat dan daya tarik yang besar untuk mempelajarinya sehubungan kaitannya dengan pengembangan pengetahuan dasarnya ataupun kegunaannya yang bersifat praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu diindahkan dalam proses pengidentifikasian topik-topik inti dalam rangka menjamin adanya relevansi keutuhan dan keterpakaian materi pendidikan sejarah di semua jenis dan jalur pendidikan.

5 *Proses Belajar Mengajar (PBM)*

Dalam rangka pengembangan pendidikan sejarah agar lebih fungsional dan terintegrasi dengan berbagai bidang keilmuan lainnya maka terdapat berbagai bidang yang seyogyanya mendapat perhatian.

Pertama, untuk menjawab tantangan masa depan, kreativitas diperlukan agar bangsa Indonesia bukan sekedar menjadi pengguna IPTEK. Konsumen budaya maupun menjadi penerima nilai-nilai luar secara pasif, melainkan memiliki keunggulan komparatif dalam penguasaan iptek. Oleh sebab itu, kreativitas perlu dikembangkan melalui penciptaan situasi proses belajar mengajar yang kondusif di mana pendidik mendorong vitalitas keingintahuan peserta didik untuk mencipta, dan memberi fungsi baru terhadap sesuatu yang telah ada. Dengan demikian, kreativitas harus dipupuk terus melalui berbagai kegiatan belajar yang dapat memacu pengembangan berpikir kreatif itu. Misalnya, pusat didik dilatih untuk menguasai taknik-teknik bertanya sedini mungkin.

Selanjutnya peserta didik perlu diberi kesempatan untuk melakukan berbagai eksperimen dalam arti luas. Rangsangan-rangsangan diberikan peserta didik melalui pertanyaan maupun penugasan, sehingga mereka dapat melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang dan dapat menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Alternatif-alternatif tersebut dapat berupa kemampuan menggambarkan suatu skenario tentang masa depan.

Di sisi lain peserta didik dituntut pula belajar disiplin melalui proses belajar yang kondusif terhadap pembentukan sikap tersebut. Melalui proses belajar mengajar yang erat dengan penanaman sikap dan kebiasaan menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, sikap disiplin tersebut dapat terbentuk. Oleh sebab itu peserta didik perlu diberi kesempatan untuk menyelesaikan berbagai tugas seperti membuat ringkasan mencari informasi melalui bacaan pengamatan, wawancara, menerapkan konsep dalam bentuk latihan, praktikum, eksperimen, berdiskusi, praktikum sosial, latihan berorganisasi, kepemimpinan dan sebagainya dengan disiplin kerja yang ketat. Melalui rangsangan dan pembiasaan ini peserta didik memperoleh internalisasi nilai yang menopang terbentuknya sikap disiplin yang tangguh.

Kedua, peserta didik akan dapat berprakarsa secara kreatif apabila PBM dilakukan secara terencana untuk membangkitkan prakarsa kompetitif tersebut. Oleh sebab itu kegiatan proses belajar mengajar yang memberi peluang kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas secara kompetitif perlu diberikan, pemberian penghargaan kepada mereka yang berprestasi akan berdampak positif terhadap terbentuknya rasa percaya pada diri sendiri. Pengalaman ini selanjutnya dapat menyangga proses pembentukan kemandirian.

Selanjutnya di sisi lain, peserta didik perlu pula dilibatkan pada PBM yang memberi pengalaman bagaimana bekerjasama untuk menyelesaikan suatu tugas, misalnya, peserta didik diberikan tugas membuat ringkasan, mencari informasi melalui bacaan, pengamatan, wawancara menerapkan konsep dalam bentuk latihan, praktikum, eksperimen, berdiskusi, praktikum sosial, latihan berorganisasi, kepemimpinan dan sebagainya untuk dikerjakan secara berkelompok. Pengalaman belajar seperti ini selanjutnya akan dapat membentuk sikap kooperatif dan ketahanan bersaing dengan pengalaman nyata untuk menghargai segala kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Ketiga, kemampuan pikir holistik, sistemik dan imajinatif dapat dibentuk melalui kegiatan proses belajar mengajar yang dapat memacu pengembangan kemampuan berpikir tersebut oleh sebab itu peserta didik perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang diarahkan untuk memecahkan masalah melalui kemampuan melihat persoalan dalam kaitannya dengan berbagai komponen lain secara holistik dan dapat mendudukan persoalan itu dalam konteks yang lebih sistemik.

Selanjutnya di sisi lain, peserta didik perlu pula dipacu pengembangan kemampuan berpikirnya secara logis, sistematis, linear dan atomistik. Artinya kegiatan proses belajar mengajar tersebut diarahkan agar peserta didik dapat memecahkan suatu persoalan dengan hanya satu jawaban yang benar. Oleh sebab itu mereka perlu dilibatkan dalam kegiatan proses belajar mengajar melalui pemberian tugas. Misalnya peserta didik ditugaskan membuat ringkasan mencari informasi melalui bacaan, pengamatan, wawancara, menerapkan konsep dalam bentuk latihan, praktikum, eksperimen, berdiskusi, praktikum sosial, latihan berorganisasi, kepemimpinan dan

sebagainya. Tugas-tugas tersebut diarahkan sedemikian rupa sehingga peserta didik melatih berpikir atomistik, logis dan amat sistematis untuk memecahkan sesuatu persoalan.

Keempat, salah satu aspek yang amat penting dalam kegiatan proses belajar mengajar adalah bagaimana peserta didik dapat terlatih berpikir secara induktif. Artinya, kegiatan proses belajar mengajar diarahkan sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat mempelajari suatu materi pelajaran melalui pengalaman. Dengan cara seperti ini mereka dapat secara langsung diterjunkan pada situasi nyata di lapangan. Misalnya, peserta didik disediakan mata pelajaran ekstra seperti dasar-dasar ilmu mantik (logika), falsafah ilmu pengetahuan dan penerapan dalam lingkungannya, diberikan tugas membuat ringkasan, mencari informasi melalui bacaan, pengamatan. Wawancara menerapkan konsep dalam bentuk latihan, praktikum, eksperimen, berdiskusi, praktikum sosial, latihan berorganisasi, kepemimpinan dan sebagainya yang diarahkan untuk menarik suatu kesimpulan induktif dari sesuatu persoalan yang dihadapi.

Selanjutnya, peserta didik diarahkan pula untuk menarik deduksi dari konsep-konsep yang telah dipelajari. Oleh sebab itu, kegiatan proses belajar mengajar perlu memberi kesempatan kepada mereka untuk terlatih berpikir deduktif, misalnya dengan memberikan tugas berupa membuat ringkasan, mencari informasi melalui bacaan, pengamatan, wawancara, menerapkan konsep dalam bentuk latihan, praktikum, eksperimen, dan sebagainya yang diarahkan untuk memecahkan sesuatu persoalan dengan analisis deduktif .

Kelima, untuk kondisi tertentu peserta didik akan dapat berperan aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar apabila mereka diberi tuntutan melalui pembiasaan, dan keteladanan. Kondisi seperti dalam hal-hal tertentu ini dapat membentuk semangat loyalitas, toleransi, dan kemampuan adaptabilitas yang tinggi oleh sebab itu pendekatan seperti ini harus diselaraskan dengan kegiatan proses belajar mengajar yang memberi peluang kepada mereka untuk berprakarsa secara dinamis dan kreatif. Dengan demikian tugas-tugas yang diberikan kiranya diarahkan sedemikian rupa sehingga kegiatan belajar yang diperoleh berupa membuat ringkasan, mencari informasi melalui

bacaan, pengamatan, wawancara, menerapkan konsep dalam bentuk latihan, praktikum, eksperimen, berdiskusi, praktikum sosial, latihan berorganisasi, kepemimpinan dan sebagainya dapat menyelaraskan aspek tuntutan dan prakarsa tersebut. Dengan cara seperti ini tuntutan tersebut tidak akan mematikan kreativitas mereka. Dengan demikian akan tercapai kualitas proses belajar mengajar yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas, dengan melibatkan siswa secara maksimal melalui berbagai kegiatan sehingga, pengalaman tersebut dapat mengantarkan mereka memasuki suatu proses belajar dalam bentuk *a joy of discovery*.

Jakarta, 17 Desember 1997

Catatan

1. Disajikan pada Simposium Nasional : Pengajaran Sejarah : Kearifan Masa Lalu untuk Menyongsong Tantangan abad ke 21, Jakarta 26--28 Desember 1997
2. Konsultan UNESCO dan UN ESCAP untuk Asia dan Pasifik, 1994--1996, dan saat ini Pembantu Rektor Bidang Akademik IKIP Jakarta.
3. kami bicara padamu dalam hening di malam sepi.....
kami sudah beri kami punya jiwa.....
kerja belum selesai, belum apa-apa.....
berjagalah di garis perbatasan dan impian.....
4. *History is not events, but people. And it is not just people remembering, it is people acting and living their past in the present. History is the pilot's instant act of decision, which crystallises all the knowlegde, all the science, all that has been learned since man began* (J. Bronowski, *The Ascent of Man*, 1971). p. 438
5. Max Born memperoleh inspirasi terhadap teori-teori fisika modern yang menggugurkan teori-teori fisika klasif pada saat ia di atas kereta api dalam perjalannya dari Gabungan University menuju Berlin. Demikian pula Leo Zilard yang memperoleh hak paten terhadap teori reaksi berantai (*chain reaction*) yang mendasari sistem kerja bom atom dan reaksi nuklir itu diperoleh

saat jalan kaki dari tempat tinggalnya di London Barish Hospital di London.

6. *Johnny van Newmann was in love with the aristocracy of intellect. And that is a belief which can only destroy the civilisation that we know. If we are anything. We must be a democracy of the intellect. We must not perish by the distance between people and government, between people and power, by which Babylon and Egypt and Rome failed and that distance can only be conflatd, can be closed, if knowledge sies in the homes and heads of people with no ambition to control others and not up in the isolatedof power (J Bronowski, The Ascent of Man, 1974), p. 435.*

LANDASAN FILOSOFIS KURIKULUM PENGAJARAN SEJARAH (SMU) TANTANGAN DAN HARAPAN

Rochiati Wiriaatmadja

1 Pendahuluan

Pendidikan sebagai upaya sadar untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup secara bermakna, mengembangkan dirinya dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan dirinya dan masyarakat bangsanya tidak terlepas dari falsafah dan pandangan hidup manusia Indonesia, yakni Pancasila. Di dalam GBHN 1993 kebijakan di sektor pendidikan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijabarkan sebagai berikut :

"Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan".

Rumusan tentang landasan dan tujuan pendidikan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sebagai akibat pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, perkembangan di bidang perekonomian, kemajuan cepat di bidang ilmu dan teknologi, serta dunia yang semakin sempit dan ditandai oleh

ketergantungan antar bangsa (globalisasi) menimbulkan permasalahan dan tantangan baru.

Pendidikan harus dapat mengantisipasi perubahan dan pertumbuhan tersebut, dan dalam konteks ini kurikulum sebagai program pendidikan dapat menjawab tuntutan-tuntutan yang dihadapi peserta didik dalam kehidupannya, dengan mengembangkan isi pendekatan yang sesuai, dan menentukan strategi pelaksanaannya.

2 Pendidikan Sejarah : Antisipasi Masa Kini

Pembelajaran sejarah di sekolah merupakan salah satu wahana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seperti diuraikan di atas, terutama sebagai upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan peserta didik. Bagi para pelajar SMU, landasan dan tujuan pembelajaran sejarah lebih jelas lagi dipaparkan dalam SK. MenDikBud Nomor 061/TJ/1993 lampiran 1, tentang peranan Kurikulum SMU, bahwa :

"Mata Pelajaran Sejarah Nasional dan Umum dimaksudkan untuk menanamkan pemahaman tentang adanya perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dan memperluas hubungan masyarakat antar bangsa di dunia"

Pengetahuan dan pengalaman peserta didik mengenai perkembangan masyarakat dari masa ke masa diharapkan akan menumbuhkan kemampuan dan kearifan untuk menghadapi kehidupan masa kininya, sesuai dengan ungkapan John Seeley yang mempertautkan masa lampau dengan sekarang dalam pemeonya "*We study history, so that we may be wise before the event*". Sedang kesadaran akan kebangsaannya akan memberikan kepribadian yang tegar karena pengenalan jatid dirinya, dan menumbuhkan kemauan dan kesediaan untuk bekerja keras bagi dirinya dan bangsanya.

Perkembangan masyarakat dari masa lampau hingga kini, pembelajarannya memperkenalkan konsep perubahan kepada peserta didik. "*Change is the primal experience of life, a basic experience entirely new in the history of mankind - not simply change, but change*

at an increasing rapidation" (Lapp, dkk.,1975:86). Perubahan, yang merupakan konsep penting sejarah perlu diketahui, dipahami dan diraih maknanya sebagai alat hidup dan survival peserta didik di dalam menghadapi kehidupan masa kininya, mengingat temponya yang berlangsung semakin cepat.

Peserta didik mengalami perubahan tersebut melalui pengamatan kehidupan bahwa beban belajar semakin berat, bahwa selesai pendidikan kesempatan kerja sangat terbatas, sementara tuntutan kehidupan semakin tinggi, dan ia terbawa kepada arus urbanisasi. Kemampuan dan ketrampilan yang perlu ia miliki untuk menghadapi berbagai tuntutan ini menyadarkan ia akan kebutuhan kemahiran untuk berkompetisi, untuk berkooperasi dalam menyatukan daya dan upaya, menjalin hubungan atau relasi interpersonal, serta ketrampilan-ketrampilan praktis dalam mencari, menerima dan mengolah informasi.

Bekal yang diperlukan dari pembelajaran sejarah untuk memenuhi semua tuntutan ini adalah belajar sejarah yang berorientasi kepada pengembangan potensi berpikir peserta didik, yang menyentuh emosinya dalam hubungan antar manusia, menyadarkan dirinya akan bangsa dan tanah air, dan menghargai keranekaragaman bangsa-bangsa dan kebudayaan-kebudayaan di dunia di dalam melengkapkan kemanusiaannya. Pelayanan pendidikan yang memenuhi kriteria tersebut harus berdasarkan program atau isi pendidikan yang didasari landasan yang memungkinkan tercapainya tujuan.

3 *Landasan Program Pendidikan Sejarah yang Diperlukan*

Kurikulum sejarah untuk tingkat SMU cukup mengacu kepada prinsip *fleksibilitas* (Sukmadinata, 1997:150--151), yaitu kecuali rancangan pembelajarannya memperhatikan persiapan peserta didik dalam memahami masa lampaunya agar mampu menghadapi persoalan hidupnya di masa kini, juga memperhatikan di mana siswa berada, dan mengingat kepada potensi atau kemampuannya yang berbeda. Prinsip ini dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang lingkup bahan pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum yang cakupannya cukup luas melalui rentangan ruang yang meliputi tanah

air dan dunia, dan menelusuri rentangan waktu mulai zaman prasejarah sampai masa kini, serta lintas bidang mulai dari arkeologi, antropologi, sosiologi, politik, ekonomi.

Program pendidikan sejarah yang luas ini harus direncanakan dan dikembangkan, dan guru memegang peranan penting. Ialah yang mengembangkan kurikulum ini bagi kelasnya. Untuk-melaksanakannya, guru kecuali memerlukan arahan dan pedoman yang disediakan dalam GBPP dan petunjuk teknis, ia juga perlu memahami landasan dasar bagi ilmu yang akan dikembangkannya, untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan pendidikan yang dihadapinya.

Landasan filosofis Pancasila yang tercantum dalam GBHN dan Sistem Pendidikan Nasional merupakan payung bagi pemahaman ilmunya secara umum. Namun demikian diperlukan landasan-landasan khusus dan pendekatan-pendekatan baru di dalam pelaksanaan tugasnya.

Pembelajaran sejarah yang dikembangkan untuk meningkatkan potensi berpikir peserta didik jelas diutamakan dalam bagian tentang pengertian dan fungsi pelajaran sejarah sebagai "memahami pengetahuan" dan "mengembangkan pengetahuan lanjutan" (lihat Petunjuk Teknis, Bab II tentang GBPP, hlm. 5). Kemampuan berpikir peserta didik melalui sejarah dikembangkan tidak hanya dengan cara menghafal siapa, kapan dan di mana (*who, when and where*) saja, melainkan yang perlu lebih mantap dan sering dilakukan adalah memaparkan bagaimana (*how* atau proses) dan mengapa (*why*) nya dari sebuah peristiwa sejarah sehingga peserta didik dilatih dalam aspek kognitif yang lebih tinggi dari pengetahuan saja.

Membelajarkan sejarah kepada peserta didik berarti menyentuh proses belajar. Apakah di kalangan peserta didik yang belajar sejarah perlu dikembangkan berpikir analitik yang lebih bersifat kongkrit seperti belajar *science* atau matematika (Sukmadinata, 1997 132-341), atau berfikir intuitif yang bersifat abstrak? Bukankah cara berpikir intuitif menunjang *heuristik*, pencarian pemecahan masalah data sejarah yang lebih fleksibel dan *holistik* yang dibuktikan dan diuji kebenarannya melalui kritik terhadap sumber fakta sejarah?

Mungkin juga belajar bermakna dari Ausubel (1969) baik dipakai data belajar sejarah. Peserta didik terlebih dahulu memiliki konsep-konsep yang telah dipelajarinya terlebih dahulu. Pada waktu belajar pengetahuan baru, peserta didik menghubungkannya dengan konsep yang telah dimilikinya, dan terbentuklah kebermaknaan logis. Tergantung kepada peserta didik untuk memberi makna terhadap bahan yang dipelajarinya, apabila ia siap dengan kegiatan menghubungkannya dengan konsep siswanya, maka ia telah belajar bermakna (Ausubel dalam Sukmadinata, 1997 : 135--139).

Berbagai bentuk belajar bermakna dapat disesuaikan padanan kategori belajar dengan *taksonomi Bloom*. menghafal tahun, nama, tempat termasuk *role learning*, jadi menghargai sesama dalam kesederajatan yang bertujuan mengembangkan aspek intelektual dari emosi peserta didik dalam kemanusiaannya.

Secara teoritik, di dalam penjabaran operasionalnya, atau di dalam kurikulum secara aktual, pembelajaran peserta didik dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan ke perubahan tingkah laku yang mencakup pengetahuan pemahaman, sikap dan cita-cita, ketrampilan dan kebiasaan (Sudjana, 1996:6). Bloom (1964) juga mengemukakan bahwa sebagai hasil pembelajaran, perubahan tingkah laku peserta didik dibedakan dalam tiga ranah (*domain*), yaitu ranah kognitif (aspek intelektual), ranah afektif (aspek sikap), dan ranah psikomotor (ketrampilan). Perubahan laku, diperoleh peserta didik juga dari pengalaman, yang merupakan hasil interaksi sosialnya dengan lingkungan. Dengan demikian proses pembelajaran peserta didik bukan semata-mata terbatas kepada pengembangan potensi intelektualnya saja, melainkan menyentuh juga aspek-aspek lain termasuk mengkondisikan lingkungan belajar sehingga peserta didik dapat mengembangkan interaksi sosialnya dengan baik.

Apabila sejarah dipandang sebagai pendidikan nilai, maka nilai yang diharapkan diraih akan terjadi dalam proses yang berlangsung secara *gradual* (Kratwohl, Bloom dan Masia, 1964). Peserta didik akan belajar mengetahui nilai-nilai, kemudian diperkirakannya secara reaktif untuk dipahami, diproses dengan pikiran yang matang untuk kemudian dipilih dan diterima. Nilai yang diinternalisasi ialah yang

selanjutnya akan ditampilkan di dalam tingkah lakunya, dan komitmen peserta didik terhadap nilai yang dipilihnya itu akan membekali dirinya pada setiap saat ia harus melakukan pilihan yang di dalam sasaran afektif merupakan rentangan (*continuum*) sepanjang pendidikannya menghasilkan pengetahuan (*knowledge* saja). Tetapi mulai pemahaman sampai evaluasi termasuk belajar bermakna; maka doronglah peserta didik belajar sejarah dengan belajar konsep-konsep sejarah karena dengan demikian ia mencapai pemahaman, atau biasakanlah belajar sejarah pemecahan masalah karena dengan demikian ia meraih tingkat, dan lain sebagainya.

Apabila potensi berpikir sejarah peserta didik ingin ditingkatkan lebih dari sekadar menghafal tahun saja, maka ada baiknya apabila mereka dibiasakan dengan belajar konsep dan dengan berpikir intuitif menghubungkan satu dengan lainnya. Sebagai contoh, peserta didik mempelajari konsep-konsep seperti waktu, kronologi, kausalitas perubahan dan kompleksitas untuk dijelaskan, dianalisis dan dicari hubungannya di antara pola-pola pembahasan dan kontinuitas dalam sejarah dengan menggunakan bahan dari GBPP Sejarah (Schneider, dkk., 1994:113).

4 Domain Afektif yang Terabaikan

Kegiatan berpikir seperti diuraikan di atas menunjukkan ranah kognitif dalam belajar sejarah padahal muatan nilai begitu besar dalam sejarah. Memang eksplisit dijabarkan dalam kurikulum sejarah nasional adalah ditumbuh-kembangkannya nilai kesadaran kebangsaan (*national identity*), nilai kebanggaan sebagai warga bangsa Indonesia (*sense of pride*), dan rasa cinta tanah air (*sense of belonging*). Namun demikian, tidak ada pesan-pesan secara eksplisit untuk pengembangan nilai-nilai kemusiaan yang universal seperti mengembangkan rasa *empathy*, toleransi, menghormati perbedaan.

Kepedulian untuk secara eksplisit diformulasikannya muatan nilai dalam bagian pengertian fungsi atau tujuan pada kurikulum sejarah juga mengingat kesan terpuruknya sejarah, seperti juga ilmu-ilmu sosial lainnya, dalam pandangan umum seakan-akan belajar sejarah itu hanya menghafal tahun Perang Diponegoro saja.

Evaluasi belajar yang dilakukan guru pada umumnya ditekankan pada aspek kognitif saja yang berorientasi produk, dan jarang melakukan asesmen yang menilai peranan peserta didik dalam partisipasi aktif pembelajaran, kontribusi pikiran atau pendapat, yang berorientasi proses. Padahal dengan cara ini, guru akan langsung menjangring bukan hanya potensi berpikirnya saja, akan tetapi juga nilai yang diraih peserta didik misalnya dalam pembentukan sikap demokratis dengan mendengarkan pendapat kawan lain, menggunakan hak bicaranya, tanggung jawabnya, atau kepemimpinannya.

Maka dalam menghadapi kehidupan kekiniannya, dan data mengantisipasi masa depan, peserta didik tidak hanya perlu dikembangkan potensi berpikirnya melalui pengetahuan, pemahaman, sistesis, analisis, evaluasi, dan aplikasi, kretivitas dan imajinasi didalam mencari solusi berbagai permasalahan, namun ia juga membutuhkan ketegaran, keuletan, kesetiaan, kemampuan berinteraksi sosial, dan kemanusiaan.

5 Pendekatan Multikultural Dalam Sejarah

Ada beberapa landasan khusus atau pendekatan yang belum atau tidak banyak disebut-sebut atau ditampilkan didalam mencari atau memukan jawaban dasar atau kerangka berpikir di dalam membahas beberapa thema di dalam kurikulum sejarah, misalnya didalam mengkaji kebinekaan atau dunia.

Kondisi geografis negara Indonesia yang terdiri atas kepulauan didampingi oleh kondisi lingkungan fisiografis yang beraneka ragam, telah menghasilkan masyarakat yang heterogen. Perkembangan historis memperkuat heterogenitas masyarakat dan budaya tersebut, sehingga lahirlah ratusan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Keragaman ini sesudah pro kemerdekaan menyatakan bersatu dalam keanekaan atau "*Bhinneka Tunggal Ika*".

Setelah pembangunan, heterogenitas ini ditambah lagi dengan pergeseran dalam stratifikasi sosial kemampuan ekonomi pendidikan, kota dan desa. Namun demikian mobilitas penduduk dan bahasa Indonesia telah mempersatukan kemajemukan ini. Di kota besar batas-batas antar etnik menjadi semu dan persamaan kepentingan

membentuk solidarita. Bagaimana pendidikan sejarah mendekati kemajemukan ? Dalam kurikulum sejarah tidak secara eksplisit dituliskan tentang pendekatan multikultural, yang tidak jelas penampilannya dianjurkan.

Pendidikan multikultural (*multicultural teaching*) menghargai kebinekaan etnik atau budaya. Upaya-upaya sadar ke arah integrasi bangsa dan budaya tidak diartikan sebagai peniadaan atau *negasi* terhadap identitas diri dan budaya. Pelajaran sejarah dengan pendekatan multikultural ditandai oleh berbagai sikap guru yang menghargai setiap perbedaan etnik atau budaya di kalangan peserta dididiknya. Ia akan menghindari ucapan perilaku, atau sikap yang mengarah kepada "*stereotyping*", dengan mengelompokkan "kita" (*ingroup*) dan "mereka" (*outgroup*). Ia juga akan melakukan seleksi bahan pembelajaran yang mewakili secara adil setiap wilayah bahasa, kultur, atau etnik.

Pendekatan multikultural dalam pembelajaran sejarah akan membawa peserta didik kepada perkembangan dirinya dalam "berbagi kemanusiaan" (*shared humanity*), mencoba memahami diri sendiri dan orang lain, mempelajari perbedaan dan persamaan dari zaman ke zaman serta menghormatinya, mempertanyakan "*stereotyping*" dirinya dan orang lain, mampu membedakan fakta dan dugaan/desas-desus, menyadari kompleksitas sejarah dan sebab-sebabnya, menyadari bahwa tidak setiap permasalahan ada solusinya, mempersiapkan diri bahwa dalam kehidupan adakalanya faktor kebetulan atau irrasionalitas sering terjadi, serta kuatnya peranan gagasan (*ideas*) atau integritas seseorang; (tokoh) dalam sejarah (Tiedt din Tiedt, 1994:267).

6 Perspektif Global

Keanekaragaman dalam sejarah umum sudah lama dipelajari peserta didik, pada kurikulum sejarah manapun (1975, 1984, 1994). Tetapi landasan khusus untuk program pendidikan sejarah umum ini baru berkembang setelah arus globalisasi terjadi, akibat revolusi transportasi, komunikasi dan informasi.

Perspektif global ditandai oleh tiga wilayah Consensus, yaitu :

- a) menyadari keanekaragaman dan persamaan budaya, perbedaan perspektif dan keragaman kesadaran;
- b) kesadaran dunia sebagai satu sistem, kesadaran akan interdependent dan interkoneksi di antara negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia;
- c) pengambilan keputusan lokal yang peserta didik besar kemungkinan dipengaruhi oleh perkembangan global dan timbal balik, keputusan lokal itu akan mempengaruhi perkembangan global (Merryfield, 1997:5).

Dengan perspektif global sebagai pendekatan pembelajaran sejarah umum, peserta didik dipersiapkan untuk memahami perbedaan, persamaan, dan keterhubungan komunitasnya di tempat ia hidup dengan dunia. Ia akan selalu memperbarui caranya memandang dunia, yang berbeda dengan dunia yang selama ini ia lakukan. Dinamika dari cara pandang ini antara lain disebabkan karena bertambahnya pengetahuan dan akses kepada informasi. Zaman informasi ini menambah tanggung jawab guru dengan selalu mengekspos peserta didiknya kepada dunia yang baru, informasi baru dan teknologi baru.

7 *Simpulan*

Landasan filosofis Pancasila dan UUD '45 yang mendasari Kurikulum SMU menjadi payung juga sebagai landasan filosofis program pendidikan Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Namun demikian diperlukan jawaban atau arahan yang mendasar untuk menjawab permasalahan tentang tujuan, isi, dan proses interaksi pendidikan khusus mengenai materi sejarah yang baru atau mutakhir; atau diperlukan pendekatan-pendekatan baru agar proses pembelajaran efektif. Pengetahuan berkembang dan teknologi menyampaian pengetahuan ini ke seluruh pelosok dunia. Pendekatan-pendekatan baru dapat dipelajari dan dipilih, yang mana yang sesuai untuk memberhasilkan pembelajaran sejarah.

Daftar Pustaka

- Eckermann, Arme-Katrin. 1994. *One Classroom Many Cultures*. Sydney : Allen & Unwin.
- Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II. 1994. *Kurikulum Untuk Abad ke-21*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana.
- Lapp, Diane. et. al. 1975, *Teaching and Learning. Philosophical, Psychological Curricular Applications*. New York : Macmillan Publ. Co., Inc.
- Merryfield, Marry M., Jarchow, Elaine., and Pickert, Sarah. 1997. *Preparing Teachers to Teach Global Perspectives*. California : Corwin Press, Inc.
- Nana Sudjana. 1996, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 1997, *Pengembang Kurikulum, Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Schneider, Donald. et. al. 1994, *Curriculum Standardsfor Social Studies Expectotions of Excellence*. Newark: NCSS.
- Tiedt, Pamela L. and Tiedt, Iris M. 1994. *Multicultural Teaching*. Boston: Allyn and Bacom

Dokumen

- DepDikBud. 1995. Kurikulum Sekolah Menengah Umum. GBPP. Matapelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Kelas I, II, III. Jakarta.
- DepDikBud. 1996/1997, Kurikulum Sekolah Menengah Umum. Petunjuk Teknis. Mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Jakarta.
- SatPel. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. 1997. SMU VII. Bandung
- SatPel. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. 1997. SMU Taruna Bakti, Bandung.

PENULISAN BUKU TEKS SEJARAH : KRITERIA DAN PERMASALAHANNYA

Helius Sjamsuddin

1 Kriteria

Dalam pertumbuhan dan perkembangan *historiografi* di Indonesia setelah kemerdekaan, salah satu *genre* yang cukup menyita perhatian khusus selain "sejarah populer" dan "sejarah ilmiah" ialah sejarah untuk kepentingan pendidikan yang diajarkan di sekolah-sekolah untuk setiap jenjang pendidikan. H.A.J. Klooster menyebutnya "*de populaire geschiedschrijving*" untuk yang pertama, "*de wetenschappelijke geschiedschrijving*" untuk yang kedua, dan ketiga "*het geschiedenisonderwijs*." (1985 : 1). Bentuk yang ketiga ini umumnya diwujudkan dalam buku-buku ajar atau buku-buku teks sejarah. Kedudukan, fungsi dan peranan buku-buku teks sejarah amat strategis karena menyangkut pembentukan aspek-aspek kognitif (intelektual) dan afektif (apresiasi, nilai-nilai) semua peserta didik dari setiap jenjang pendidikan. Sejarah Nasional khususnya dianggap mempunyai nilai *didaktif-edukatif* bagi pembentukan jati diri bangsa dan mempersatu berdasarkan atas pengalaman kolektif bernegara dan berbangsa.

Penulisan buku teks sejarah untuk setiap jenjang pendidikan tidak semudah yang dibayangkan oleh para pakar sejarah dan/atau pakar pendidikan apalagi oleh orang awam. Banyak faktor yang perlu mendapat perhatian khusus dan oleh karena itu amat menentukan :

- 1) Substansi faktualnya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (ilmiah). Penulisan ideal menggunakan sumber-sumber pertama (*primary sources*) atau paling tidak sumber-sumber kedua (*secondary sources*). Akan tetapi pada kenyataannya banyak penulis menggunakan sumber ketiga atau sumber keempat dan seterusnya.
- 2) Penafsiran dan/atau penjelasan selain harus logis dan sistimatis yang secara akademis harus pula dapat dipertanggungjawabkan. Juga harus memperhatikan visi atau kebijakan pendidikan dan/atau politik yang berlaku secara nasional. "Semangat zaman" (*Zeitgeist*) dari tujuan kebijakan pendidikan dan/atau politik mewarnai buku-buku teks sejarah.
- 3) Penyajian dan retorikanya harus sesuai dengan jenjang usia peserta didik menurut teori psikologi perkembangan yang umum dikenal. Untuk siswa-siswa Sekolah Dasar, misalnya cerita-sejarah (narasi) harus sederhana dan mudah dipahami oleh mereka yang berusia di bawah umur 12 tahun. Untuk SMP (sekarang SMTP), narasi harus sesuai untuk siswa-siswi yang berusia antara 12--15 tahun. Untuk SMA (sekarang SMU), retorikanya harus sesuai untuk siswa-siswi berusia antara 15-18 tahun. (C.P. Hill, 1956 : 58-134). Dasar teoritis psikologi perkembangan ialah bahwa siswa-siswa mulai dengan berpikir kongkrit di SD meningkat kepada berpikir abstrak di jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya.
- 4) Pengenalan konsep-konsep sejarah (Indonesia dan Umum) perlu menggunakan pendekatan "*spiral*", dimulai dari konsep-konsep sederhana dan kongkrit di SD, kemudian meningkat naik ke konsep-konsep yang lebih kompleks dan relatif abstrak di SMTP dan SMU. Untuk itu perlu inventarisasi konsep-konsep sejarah yang signifikan dan relevan dan ditempatkan dalam semacam matriks SD, SMTP, dan SMU. Signifikansi dan relevansi perlu menjadi "prinsip pembimbing" bagi setiap penulis buku teks dalam melakukan seleksi materi/konsep sejarah (Indonesia dan Umum).

- 5) Secara teknis-konseptual buku-buku teks mengikuti GBPP (Garis-Garis Besar Program Pengajaran) menurut Kurikulum 1994. Format GBPP memuat TK (Tujuan Kurikuler), TTU (Tujuan Instruksional Umum), TIK (Tujuan Instruksi Khusus), Pokok Bahasan, dan/atau Sub-Pokok Bahasan. Dalam paket yang sama, terdapat juga latihan-latihan untuk evaluasi (dalam bentuk tes esei atau tes objektif).
- 6) Kelengkapan ilustrasi, gambar, foto, peta-peta sejarah dalam *setting* dan *lay out* yang informatif dan atraktif.

2 *Kajian Kritis Terhadap Buku-buku Teks Sejarah*

Dalam waktu kira-kira sela dua dasawarsa telah dilakukan paling tidak dua kajian kritis terhadap penulisan dan penggunaan buku-buku teks sejarah (khusus Indonesia). Pertama oleh sejarawan R. Moh. Ali (almarhum) awal tahun 1960an dan kedua oleh sejarawan Belanda Klooster tahun 1980an.

Moh. Ali adalah salah seorang dari sedikit sejarawan Indonesia yang pertama kali melakukan kritik terhadap berbagai buku teks Sejarah Indonesia yang beredar sampai pada akhir tahun 1950an dan awal tahun 1960an. Ia telah menandai sehingga merupakan karakteristik atau kecenderungan para penulis sejarah (Indonesia) sebagaimana yang terdapat pada buku-buku mereka yaitu tidak atau kurang mempunyai apa yang disebutnya (menurut ejaan baru, HS) :

- a. Dasar kejakinan sejarah tentang Sejarah Indonesia
- b. Masalah-masalah pokok daripada ceritera Sejarah Indonesia.
- c. Pengetahuan tentang sumber-sumber dan bahan Sejarah Indonesia.
- d. Pendapat-pendapat baru tentang Sejarah Indonesia.
- e. Pengertian tentang ilmu sejarah (R. Moh. Ali, 1963 : 104).

Mengenai yang pertama, masih "Belanda-sentris" atau "daerah asal pengarang" seperti M. Endo Hardjosoewito (Jawa Tengah), A.D. Rangkuti (sumatra), H.J.v.d. Berg dkk/ (Belanda). Oleh sebab itu Moh. Ali secara anonim mencoba memulai melalui kursus tertulis BPG untuk B I/B II Sejarah menulis menurut visi "Indonesia-sentris" dengan "manusia Indonesia" sebagai intinya.

Problem kedua tentang periodisasi sejarah Indonesia dengan kompleksitas masalah yang ditimbulkannya. Ia mempertanyakan apakah benar istilah-istilah "zaman Hindu", "zaman Islam", "zaman Belanda", dan "zaman Jepang?" atau "Indonesia-Hindu", "Hindu-Jawa", "kerajaan-Hindu", "kerajaan Islam". Apa benar kita sebagaimana yang ditulis oleh Dr. Soetjipto Wirjosuparto (almarhum) mengalami dari lima zaman pendjadjahan menuju zaman kemerdekaan ? Atau menurut Prof. Muh. Yamin bangsa Indonesia mengenal "tiga keperabuan" (kerajaan) : Sriwijaya, Majapahit, dan Republik Indonesia sekarang?

Tentang ketiga, belum ada himpunan "buku sumber" mengenai bahan-bahan sejarah Indonesia (atau menurut istilah yang umum kita kenal dengan *primary sources*) karena masih tersebar di berbagai jurnal ilmiah, prasasti atau arsip-arsip (nasional ataupun internasional) Keterbatasan ini maka para penulis masih mengutip buku-buku yang ditulis oleh N.J. Krom, F.W. Stapel, H.J. de Graaf, dan B.H. Vlekke bagi yang masih menguasai bahasa Belanda. Atau dari penulis-penulis Indonesia sendiri seperti Sanusi Pane, Anwar Sanusi, atau dari Moh. Ali sendiri (masih anonim). Akibatnya setiap penulis mengutip dari sumber-sumber yang sama sehingga substansinya tetap sama dengan variasi di sana-sini.

Mengenai kritik keempat, para penulis tidak atau kurang mengikuti pendapat atau teori-teori baru tentang Sejarah Indonesia dari pakar-pakar seperti G. Coedes, Brandes, Kern, C. Van Leur, CC. Berg, dan G.J. Resink yang dapat mempengaruhi cerita sejarah. Pendapat-pendapat mereka justru penting untuk menyempurnakan cerita Sejarah Indonesia. (R. Moh. Ali, 1963 : 108).

Mengenai yang kelima, Moh. Ali tidak menjelaskan tetapi perkembangan kajian ilmu sejarah sampai pada tahun 1960an memang masih baru sampai pada tahap-tahap kendala tersebut di atas. Kajian serius ilmu sejarah masih sedang dimulai di berbagai Jurusan Sejarah (B I/B II, FKIP, dan Universitas). Oleh sebab itu para penulis buku-buku teks Sejarah Indonesia (dan Sejarah Umum atau Sejarah Dunia) untuk SMP dan SMA masih sangat terbatas pada dosen-dosen atau guru-guru "sejarah" yang mendapat pendidikan Belanda.

Kira-kira dua dasawarsa kemudian Klooster dalam disertasinya tahun 1980an. *Indonesiers Schrijven Hun Geschiedenis. De ontwikkeling van de Indonesische Geschiedbeoefening in Theorie en praktijk, 1900--1980*, menulis antara lain mengenai penulisan sejarah Indonesia oleh orang-orang Indonesia sendiri pada zaman kolonial Belanda dan pendudukan Jepang; perkembangan kajian sejarah ilmiah dan populer sesudah tahun 1945; dan pendidikan/pengajaran sejarah serta buku-buku teks sejarah di sekolah-sekolah. Mengenai yang terakhir ini Klooster membagi-bagi dalam periode-periode politik serta menganalisisnya sejak masa-masa kolonial, tahun-tahun pertama sesudah 1945, masa demokrasi terpimpin, sepuluh tahun sejak 1965, dan tahun-tahun sesudah 1975.

Pada masa-masa pasca Kemerdekaan terdapat sejumlah buku pelajaran sejarah yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit swasta. Akan tetapi para penulis buku-buku tersebut masih mengambil begitu saja materi-materi dari buku-buku sekolah Hindia Belanda karena ketika itu sedikit atau sama sekali belum ada materi sejarah baru yang tersedia. Isinya kebanyakan berasal dari P.J.M. van den Berg. Dari jumlah penulis diantaranya Zahari (Pematang Siantar, 1946), Rasjid (penerbit Wolters di Groningen, 1950, 1952); Van den Berg, Broeskamp, dan (penerbit Woltens di Groningen, 1950, 1952); Van den Berg, Kroeskamp, dan Simanjoentak (1950--1951), kemudian menyusul Prijohutomo menjadi empat serangkai (1952); penulis-penulis Katolik Mariatimo dan Mitramartopo, dan Soetjipto Wirjosuparto. Dari sekian penulis buku, hanya Soetjipto Wirjosuparto, menurut Klooster, yang melakukan pendekatan "lebih nasionalistis" terhadap masa lalu Indonesia. (Klooster, 1985 : 196--203). Bukunya yang semula berjudul *Dari Lima Zaman Pendjadjahan Menuju Zaman Kemerdekaan* pernah dipertanyakan oleh Moh. Ali apakah karena itu atau sebab-sebab saran pihak lain buku tersebut diganti judulnya menjadi *Sedjarah Indonesia Djilid II* tetapi dengan isi dan sistimatik yang sama. Dalam bukunya ini Soetjipto berusaha mengupas secara tajam setiap konflik yang pecah antara bangsa Indonesia dan kekuasaan imperialis (Belanda). Sejarah Indonesia harus dilihat dari "sudut kesatuan". Atau dalam kalimat Soetjipto sendiri : ".....peristiwa yang terjadi di Indonesia ditilik dari tjita-tjita kesatuan

Indonesia atau kesatuan dari sebagian Indonesia." Buku yang disusun untuk SMA itu berpedoman kepada anjuran Presiden Soekarno, "bahwa apabila seorang guru memberi peladjaran Sedjarah Indonesia djangan memberikan abunya melainkan apinya yang menyala." (Soetjipto, 1960).

Pada zaman Demokrasi Terpimpin, kebanyakan penulis dalam Pengantar buku-buku teks mereka menyebutkan politik baru Manipol-USDEK sebagai dasar. Tekanan penulisan pada patriotisme dan Proklamasi-sentris. Di antara penulis-penulis periode ini ialah Anwar Sanusi, Suhaimi, A. Muis dan M. Nazir St. Radjo Wan (1964). Moh. Ali meskipun menulis dalam periode ini namun ia dianggap sebagai figur sejarawan yang mandiri. Sejarah nasional menurutnya dapat ditulis menurut fakta perkembangan orang-orang Indonesia menjadi suatu bangsa. Ia menulis bagi pembaca-pembaca muda dengan tekanan pada romantika dan kepahlawanan. (Klooster, 1985 : 205).

Sesudah tahun 1965, terdapat penulis-penulis buku teks untuk sekolah-sekolah seperti Mattori (3 jilid untuk SMA, 1966--1969) yang melihat sejarah penting bagi *nation-building and character-building*, Suwarno Kartawiraputra (untuk SD sejak kelas 4, 1967) yang mencoba menulis "Indonesia-sentris"; Pitono, Njoman Dekker dan Hugiono (untuk SMA, 1967) yang menekankan sikap kebangsaan atas dasar Pancasila; Tumanggor, Sitorus dan Sembiring (untuk SMP, 1975).

Setelah tahun-tahun 1975, terdapat penulis-penulis buku teks seperti Suyono, Hapsoro dan Soetarno (untuk SMP, 1977), Idris dan Tugiyono (untuk SMP, 1979); Nugroho Notosusanto dan Yusmar Basri yang menulis *Sejarah Nasional Indonesia* (untuk SMP, 1976; SMA, 1979). Buku-buku pelajaran ini ditulis berdasarkan enam jilid buku babon dengan judul yang sama yang terbit pertama kali 1975. (Klooster, 1985: 206--213).

Tampak sekali bahwa dalam sejarah dari penulisan buku-buku teks untuk sekolah-sekolah sejak tahun 1945 sampai tahun 1980an ada usaha para penulis untuk menulis buku-buku yang berdasarkan kebangsaan, pembentukan bangsa dan watak bangsa atas dasar persatuan dan kesatuan setelah melalui perjuangan lama dan berat

melawan imperialisme Barat. Meskipun pada praktiknya tidak semua berhasil, namun paling tidak meraka sebutkan dalam Kata Pengantar maksud dan tujuan dari buku-buku yang mereka tulis, termasuk di dalamnya sebutan dasar-dasar Pancasila. Kendati pada masa Demokrasi Terpimpin ada penyimpangan berupa Manipol-USDEK, "sosialisme Indonesia", tetapi perubahan politik sesudah tahun 1965 dengan berbagai pergantian serta penyempurnaan Kurikulum-kurikulum Sejarah sesudahnya kembali "meluruskan" kalau tidak lebih mengarah kepada penulisan buku-buku teks yang lebih bermutu untuk berbagai jenjang pendidikan.

3 Kebijakan Pendidikan dan Politik Tentang Sekolah dan Kurikulum.

Pasang surut pengajaran sejarah di Indonesia dan pada gilirannya penulisan buku-buku teks sejarah sekolah-sekolah erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pendidikan dan/atau politik, Sekolah serta Kurikulum. Secara umum, sejak tahun 1946 Mr. Soewandi yang ketika itu menjadi menteri PP dan K menetapkan suatu pedoman bagi guru-guru yang memuat sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran dan pendidikan yang berintisarikan Pancasila. *Pewarta PPK*. No. 2 tahun 1951 : Helius Sjamsuddin, et. al., 1996 : 6) Kemudian dalam UU No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia, yang lalu dikukuhkan dalam UU No. 12 Tahun 1954, tentang pernyataan berlakunya UU No. 4 Th. 1950 tersebut, disebutkan yang menjadi dasar pendidikan dan pengajaran : ".....asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia." Adapun tujuan pendidikan dan pengajaran : "membentuk manusia susila yang cakap dan warga-warga yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air." (Sjamsuddin, et. al., 1993 : 116--117). Atas dasar ini semua sistem persekolahan pun mengalami perubahan. Sampai tahun 1962, SR (Sekolah Rakyat, kemudian menjadi Sekolah Dasar) menjadi enam tahun; SMP tiga tahun dan SMA tiga tahun. Di SR sejak kelas IV telah diajarkan Sejarah Indonesia. Di SMP yang dibagi atas bagian A (Sastra) dan bagian B

(ilmu Pasti), diajarkan Sejarah Indonesia dan Sejarah Umum/Dunia. Di SMA yang dibagi atas bagian A (Bahasa & Sejarah), B (Ilmu Pasti & Alam), dan C (Ilmu Ekonomi, Hukum, Dagang) diberikan Sejarah Indonesia dan Sejarah Umum. Umum di tahun pertama, kemudian dikelas-kelas selanjutnya di bagian A diberikan tambahan Sejarah Budaya dan Sejarah Kesenian, bagian C Sejarah Ekonomi, sedangkan di bagian B tidak lagi diberikan sejarah. (Klooster, 1985:175).

Sejak tahun 1962 SMP dan SMA mengalami pembaruan sehingga dikenal dengan "SMP dan SMA gaya Baru" atas dasar apa yang disebut dengan Pancawardhana Pembagian A dan B di SMP dihapuskan. Sejarah Indonesia dan Sejarah diajarkan masing-masing data apa yang disebut Kelompok Dasar (Sejarah Indonesia, Geografi Indonesia, Bahasa Indonesia dan Civics) dan Kelompok Cipta (Sejarah Dunia dan Geografi Indonesia). Kemudian di SMA kelas I mendapat sejarah Indonesia dan sejarah Umum/Dunia, masing-masing data Kelompok Dasar (Sejarah Indonesia dan Geografi Indonesia) dan Kelompok Khusus (Sejarah Dunia, Geografi, Ekonomi, Sejarah Budaya). Di kelas dua dan selanjutnya dijuruskan menjadi empat : Budaya, Sosial, Pasti, dan Alam. Di jurusan Budaya dan Sosial, selain Sejarah Indonesia dan Sejarah Umum/Dunia, diajarkan pula Sejarah Kebudayaan dan Sejarah Ekonomi dengan tekanan pada Indonesia, sedangkan di jurusan Pasti dan jurusan Alam hanya diberikan Sejarah Indonesia saja.

Dalam periode "Gaya Baru" ini dikenal Kurikulum 1964 yang diwarnai oleh Pancawardhana dan Manipol-USDEK. Setelah terjadi perubahan politik mendasar tahun 1961 disusun Kurikulum 1966 dan dan disempurnakan lagi dalam Kurikulum 1968. (S. Hamid Hasan, 1997: 29--361). Dengan sendirinya Pancawardhana dan Manipol-USDEK dihapuskan.

Dalam periode sesudah tahun 1965, dikenal Kurikulum 1966 dan Kurikulum 1968, Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984. Sekarang sedang berlaku Kurikulum 1994. Dalam Kurikulum 1968, kedudukan pendidikan sejarah pada tiga sekolah tidak mengalami perubahan mendasar, kecuali di SD, Sejarah merupakan salah satu komponen dari payung: Pendidikan Kewargaan Negara (Ilmu Bumi, Sejarah, Pengetahuan Kewargaan Negara).

Dalam Kurikulum 1975, kedudukan pendidikan Sejarah mengalami perubahan. Pada setiap jenjang sekolah, Sejarah tidak lagi merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri melainkan menjadi komponen dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), meskipun materi Sejarah sendiri tetap ada seperti Sejarah Indonesia, Sejarah Dunia, Sejarah Kebudayaan dalam kedudukan yang berbeda. Dalam semester 1, materi Sejarah Nasional yang merupakan mata pelajaran inti wajib diikuti oleh semua siswa. Baru pada semester 2, 3, dan 4, mata pelajaran Sejarah sudah menjadi mata pelajaran khusus untuk Jurusan IPS, semester 4, 5, dan 6 untuk Jurusan Bahasa. Bagi siswa yang masuk Jurusan sudah tidak lagi menerima pelajaran Sejarah. (Hasan, 1990).

Sebagai catatan, pendekatan disiplin ilmu yang mandiri telah ditinggalkan dalam Kurikulum 1975, digantikan dengan apa yang disebut pendekatan integratif. Pendekatan ini tidak hanya berlaku untuk IPS saja tetapi juga untuk IPA (Hasan, 1990). Untuk tingkat Perguruan Tinggi Pendekatan ini dapat disejajarkan dengan "interdisiplin."

Dalam Kurikulum 1984 yang disebut juga Kurikulum 1975 yang disempurnakan terdapat semacam dualisme yang unik untuk pendidikan Sejarah. Sejarah di SD meskipun masih merupakan bagian dari IPS tetapi terpisah dari IPS (umum) lainnya yang mencakup materi Geografi, Politik, Pendidikan, Sosiologis dan Ekonomi. Di SD, IPS Sejarah baru diberikan pada kelas IV, sedangkan IPS umum telah diberikan sejak kelas III. Di SMP terdapat pula susunan yang sama yaitu ada IPS Sejarah dan IPS "umum." Hanya saja materi Sejarah IPS dan materi umum IPS di SMP telah diberikan bersama-sama sejak kelas 1 Di SMA lain lagi. Dalam Kurikulum 1984 pendidikan Sejarah merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri yang mendapat kedudukan mata pelajaran inti untuk enam semester. Setiap siswa SMA yang memilih jurusan apapun (A1: Pasti; A2: Alam-Fisika; A3: Sosial, A4: Bahasa) wajib belajar Sejarah. Khusus untuk jurusan A4, para siswanya mendapat mata pelajaran khusus Sejarah Kebudayaan. (Hasan, 1990).

Kelebihan lain dari Kurikulum 1984 ialah adanya mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang meskipun

menggunakan label "sejarah" tetapi dengan misi khusus. (Hasan, 1990) PSPB ini diberikan untuk setiap jenjang pendidikan tetapi karena materinya dianggap "*redundant*" dengan materi Sejarah Nasional umumnya (termasuk menyita waktu tersendiri) dalam Kurikulum 1994 kemudian "dilebur" dan kembali ke dalam induknya Sejarah Nasional.

Akhirnya dalam Kurikulum 1994 juga terjadi semacam reorganisasi, perubahan atau penyempurnaan dalam jenjang pendidikan maupun program. Pendidikan Dasar menjadi sembilan tahun yang terdiri atas jenjang SD dan SLTP (sebelumnya dikenal SMP). Begitu pula di jenjang Sekolah Menengah Umum (sebelumnya SMA) terdapat tiga program di kelas III. Adapun isi Kurikulum Pendidikan Dasar antara lain memuat mata pelajaran IPS yang didalamnya terdapat ilmu Bumi dan Sejarah (Nasional dan Umum). Fungsi IPS ialah mengembangkan kemampuan dan sikap rasional mengenai fenomena sosial serta perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia di masa lalu dari masa kini. IPS mempelajari kenyataan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari Ilmu Bumi, Ekonomi, Sejarah, Antropologi, Sosiologi dan Tata Negara. Sebagai mata pelajaran IPS diajarkan di SD sejak kelas III yang mencakup pengetahuan tentang lingkungan Sosial, ilmu Bumi, Ekonomi, Pemerintahan dan Sejarah (perkembangan masyarakat Indonesia dari masa lalu hingga masa kini). Di SLTP, IPS menekankan pengertian-pengertian dasar dari Ilmu Bumi (Geografi), sejarah (Nasional dan Umum), serta Ekonomi. Mengenai lamanya jam pelajaran : di jenjang SD sejak kelas III sampai dengan kelas VI berturut-turut 3, 5, 5, 5 jam @ 40 menit; untuk jenjang SLTP kelas I, II, III, masing-masing 6 jam @ 45 menit. (Kurikulum Pendidikan Dasar, 1993: 6, 9, 10, 14, 15):

Untuk jenjang SMU, posisi Sejarah (sebagai *humaniora*) dan ilmu-ilmu sosial erat hubungannya dengan pengajarannya dibagi dua yaitu apa yang disebut dengan Program Pengetahuan Umum (PPU) untuk kelas I dan kelas II dan Program Pengajaran Khusus (PPK) untuk kelas III. PPU wajib diikuti oleh semua siswa kelas I dan kelas II. Program ini dimaksudkan untuk meninggalkan kemampuan dan minat siswa sebagai dasar untuk memilih PPK di kelas III. Di antara 10 mata pelajaran dalam PPU, terdapat antara lain mata pelajaran Sejarah

(Nasional dan Umum) dan mata pelajaran IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi). Jadi di sini Sejarah lepas dari IPS dengan rincian jam : Sejarah 2 jam @ 45 setiap tingkat, sedangkan IPS Ekonomi 3 jam @ 45 menit setiap tingkat, IPS Sosiologi hanya diberikan di kelas II sejumlah 2 jam pelajaran @ 45 menit dan IPS Geografi diberikan di kelas I dan kelas II masing-masing 2 jam @ 45 menit.

Dalam PPK di kelas III yang terdiri dari tiga program : Program Bahasa, Program IPA, dan Program IPS, mata pelajaran dibagi atas dua kelompok yaitu masing-masing kelompok mata pelajaran umum dan mata pelajaran khusus. Persamaan antara ketiga program itu ialah diberikannya enam mata pelajaran yang sama. Salah satu di antaranya Sejarah (Nasional dan Umum). Perbedaan pada masing-masing program itu pada empat mata pelajaran khusus. Pada Program Bahasa, selain tiga bahasa (Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lain), diberikan khusus. Sejarah Budaya Pada Program IPA, mata pelajaran khususnya sesuai dengan jurusannya (Fisika, Biologi, Kimia, Matematika). Pada Program IPS, empat mata pelajaran khususnya berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial seperti Ekonomi, Sosiologi, Tata Negara, dan Antropologi.

Jadi berdasarkan kurikulum 1994, pendidikan Sejarah dan pendidikan ilmu-ilmu sosial menetapkan posisi yang relatif baik meskipun dengan jumlah jam yang kecil (rata-rata 2 jam) dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. (Heliuss Samsuddin, 1996 : 9).

Pergantian dan perubahan berturut-turut pada susunan sekolah-sekolah dan kurikulum-kurikulum yang berdasarkan atas kebijakan pendidikan dan/atau politik di atas tidak selalu disusul segera atau sejalan dengan kecepatan pengadaan buku-buku pelajaran sejarah. Dari kajian yang dilakukan oleh Klooster mengenai buku-buku pelajaran sejarah yang digunakan antara tahun 1945--1980an, tampak bahwa ketersediaan buku-buku pelajaran sejarah tidak selalu terpenuhi para penulis dan penerbit selalu berusaha mengejar "ketertinggalannya." Akan tetapi agak lain dengan pengadaan buku-buku menurut Kurikulum 1994.

4 Kurikulum-GBPP 1994 dan Penulisan Buku Teks

Tahun 1990an sebagai dasawarsa terakhir abad ke-20 ini merupakan tahun pelaksanaan Kurikulum 1994. Agak berbeda dengan tahun-tahun dan Kurikulum-kurikulum sebelumnya, dalam tahun 1990an terjadi "boom" dalam pengadaan buku-buku teks. Antara penulis dan penerbit terjadi semacam "*simbiosis mutualistis*". Penulis memberikan jasa-jasanya dan penerbit membayarnya. Pengarang tidak lagi seorang atau dua orang tetapi tiga sampai sepuluh orang berkumpul dalam satu tim, belum termasuk seorang atau dua orang penyunting yang merangkap sebagai Tenaga Ahli (Dokter Sejarah atau Pendidikan Sejarah). Buku-buku cepat ditulis, selain karena menggunakan komputer, juga karena banyaknya penulis yang "mengeroyoknya" sesuai dengan pembagiaan kerja yang telah ditetapkan. Apalagi semua dipermudah oleh GBPP yang secara rinci menetapkan pokok-pokok bahasan, pembagian kelas dan catur wulan. Yang tidak kalah menariknya dalam penulisan ini terjadi tarik-ulur antara kebutuhan untuk memenuhi tuntutan pendidikan (akademik) di satu pihak dengan tuntutan keuntungan bisnis dari penerbit-penerbit di lain pihak. Di satu pihak para penulis buku-buku teks sejarah SLTP (di bawah payung IPS) dan SMU telah berusaha keras untuk menulis sesuai dengan tuntutan Kurikulum 1994 dan lain pihak setiap penerbit karena mengejar waktu untuk memenangkan tender "Bank Dunia" mem"pool" para penulisannya masing-masing di satu tempat atau hotel tertentu. Anggota-anggota tim penulis diambil dari guru-guru sejarah, dosen-dosen sejarah, dan pejabat-pejabat P & K, setempat. Naskah buku-buku teks itu harus mereka selesaikan dalam waktu satu atau dua bulan menurut jadwal yang ketat. Kerja keras di bawah *time pressure* mengajar *deadline* semacam ini di mana para penulis juga mempunyai pekerjaan pokok lain yang rutin harus diselesaikannya bersamaan dengan proyek penulisan buku-buku teks tersebut menghasilkan sebageian besar dari buku-buku teks sejarah yang sedang beredar saat ini. Dapat kita bayangkan bagaimana kualitas produk akhir dari kerja tergesa-gesa semacam itu, lepas dari segi kuantitas produk akhir dari kerja tergesa-gesa semacam itu, lepas dari segi kuantitas buku-buku dari setiap penerbit yang menghasilkan buku-buku yang sama. Para penerbit berkompetisi menjajakan

buku-bukunya yang telah terbit dengan cara *door to door* ke sekolah-sekolah.

Saya mungkin terlalu mendramatisir situasi dan kondisi perbukuan teks sejarah pada saat ini seolah-olah tidak ada buku-buku teks sejarah yang berkualitas baik. Memang ada buku-buku teks yang ditulis lebih serius, umumnya oleh perorangan atau penulis-penulis dalam jumlah yang lebih kecil. Mereka menulis tanpa dikejar waktu dan dilakukan lebih profesional. Naskah-naskah mereka sudah ada sebelum ketentuan Kurikulum 1994. Begitu Kurikulum 1994 berlaku, mereka tinggal menyesuaikan diri. Apalagi jika naskah-naskah mereka sudah ada dalam disket-disket sehingga mereka tinggal menerapkan teknik penyuntingan "tambah sana buang sini, tambal sana sulam sini."

Masalah sebenarnya mengenai buku-buku teks sejarah ini sebenarnya lebih kompleks daripada apa yang saya sebutkan di atas. Inilah saya kira yang perlu kita diskusikan dan mendapat perhatian kita bersama. Lepas daripada "kelemahan" yang saya sebutkan di atas, secara umum saya mencoba melihat buku-buku teks yang telah terbit menurut Kurikulum-GBPP 1994 sebagai catatan tanpa harus menyebutkan nama penulis atau penerbitnya.

- 1) Dari penampilan fisik, buku-buku teks sudah dilengkapi dengan banyak ilustrasi, foto, gambar, peta-peta sejarah yang menarik dan informatif. Kertas yang digunakan cukup luks (HVS), meskipun ada juga penerbit yang masih menggunakan kertas koran untuk lebih menghemat. Teknik penggunaan huruf-huruf sudah canggih, *bold* dan *italic* digunakan untuk memberikan aksent, begitu pula *signpost* yang ditempatkan di pinggir-pinggir halaman untuk memudahkan rujukan bagi siswa. Ukuran buku juga bervariasi. Ada yang menggunakan ukuran buku standar, ada juga ukuran lebar model "diktat".
- 2) Sistematika penulisan cukup baik. Mungkin karena para penulis setia menggunakan GBPP 1994, lengkap dengan pembagian kelas, catur wulan meyakinkan pembaca bahwa yang ditulis adalah sesuai dengan Kurikulum GBPP 1994, maka pada sampul luar dan dalam buku disebutkan berdasarkan atas Kurikulum-GBPP yang sedang berlaku, termasuk mencantumkan seluruh isi Kurikulum Sejarah. Kepatuhan kepada GBPP menyebabkan

tulisan cenderung menjadi ensiklopedis. Semua materi mau dimasukkan karena khawatir bersisa tanpa memperhitungkan apakah cukup signifikan atau relevan dalam menyebutkan nama-nama orang, tanggal, atau peristiwa.

- 3) Secara faktual ada yang sudah memenuhi persyaratan akademik jika dilihat dari buku-buku rujukan yang digunakan. Tetapi sekali yang menggunakan sumber-sumber pertama atau sumber kedua berupa disertasi dan sebagainya. Masih banyak penulis merujuk kepada literatur lama atau dari sumber-sumber ketiga. Di sana-sini masih ada kesalahan faktual yang tidak perlu disebutkan secara rinci di sini. Di sinilah benar-benar diperlukan ketelitian pakar yang menjadi editor dari buku-buku tersebut.
- 4) Begitu banyak fakta sejarah yang disodorkan dan harus dipelajari oleh para siswa sehingga besar kemungkinan mereka terbenam dalam samudra fakta itu. Oleh sebab itu perlu dipikirkan suatu tema sentral (misalnya untuk sejarah Nasional mengenai negrasi bangsa), sehingga meskipun kepada siswa diberikan sejumlah besar fakta tetapi mereka akan tahu ke mana mereka menuju.
- 5) Pendekatan "spiral" belum dilakukan. Kadangkala sebuah konsep yang sama dijelaskan lebih panjang lebar untuk SLTP daripada untuk buku-buku SMU.
- 6) Yang masih belum dapat diteliti ialah tahap-tahap narasi menurut jenjang usia dan jenjang kelas. Apakah di SLTP lebih sederhana bahasanya daripada di SMU, atau sebaliknya atau sama sekali tidak terpikir oleh para penulis.
- 7) Dicermati secara menyeluruh, kualitas buku-buku teks sejarah menurut Kurikulum 1994 lebih maju daripada sebelumnya, hanya dalam kecermatan menggunakan bahasa tulisan, karena mungkin ditulis oleh banyak orang, maka tidak seragam. Justru di sini kelebihan penulis-penulis buku teks sejarah sebelumnya karena jumlah mereka sedikit maka bahasa mereka lebih terpelihara dan konsisten.

Daftar Pustaka

- Asmid Kamal Chaniago, dkk. (1997) *IPS Sejarah*. SLTP. Dikembangkan dan Disesuaikan dengan Kurikulum SLTP/ GBPP 1994, 3 Jilid Jakarta : Yudhistira
- Dadah Subandi, dkk. (1995). *Pelajaran Sejarah (IPS)*. Untuk SLTP. Disusun Berdasarkan Kurikulum 1994-GBPP 1994. 3 Jilid. Bandung : Penerbit Lubuk Agung.
- Dicknson, A.K. & Lee, P.J., ed. (1978). *History Teaching and Historical Understanding*. London : Heineman.
- Dickenson, A.K, et. al. (1984). *Learning History*. London : Heineman Educational Books.
- Garvey, Brian & Krug, Mary. (1977). *Model of History Teaching in the Secondary School*. Kidlington, Oxford : Oxford University Press
- Hasan S.H. (1990). "25 Tahun Pendidikan Sejarah." *Seminar Sejarah Nasional V di Semarang*, 20--22 Agustus 1990.
- Hasan S.H (1996). *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta Depdikbud Dirjen Dikti. P2TA.
- Helius Sjamsuddin, et. al. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonsia Zaman Kemerdekaan (1945--1966)*. Jakarta: Depdikbud. Dirjen Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek IDSN.

- Helius Sjamsuddin. (1993). "*Pola Tarik-ulur Sentripetal dan Sentrifugal Dalam Sejarah Indonesia.*" *Mimbar Pendidikan* No. 3 Tahun Hal. 53-56.
- Helius Sjamsuddin. (1996). Pendidikan Humaniora dan Ilmu-ilmu Sosial selama 5 Dasawarsa Terakhir. *Konvensi Nasional Pendidikan di Ujung Pandang*, 4--7 Maret 1996.
- Hill. C.P. (1956) *Saran-saran Tentang Mengadjarkan Sedjarah.* Djakarta : Perpustakaan Perguruan Kem. P. P. dan K.
- Kansil, C.S.T. (1997) *IPS Sejarah.* Untuk SLTP 3 Jilid Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Karso, dkk. (1997) *Sejarah Nasional dan Sejarah Umum.* Untuk SMU Berdasarkan Kurikulum 1994. 3 Jilid Bandung : Penerbit Angkasa.
- Karso dan Amrin Imran. (1995). *IPS Sejarah*, Untuk SLTP, Kurikulum 1994, 3 Jilid, Bandung : Penerbit Angkasa.
- Klooster, H.A.J. (1985). *Indonesiers Schrijven hun Geschiedent. De Intwikkeling van de Indonesische Geschiedbeoefening in Theorie en Praktijk, 1900--1980.* Dordrecht-Hollood/Cinnaminson-USA : Foris Publictions.
- Kurikulum 1964. SD, SMP, SMA.
- Kurikulum 1968. SD, SMA.
- kurikulum 1975, SMA.
- Kurikulum 1984. SMA.
- Kurikulum Pendidikan Dasar (1994), Landasan Program dan Pengembangan (1993). Jakarta : Depdikbud.
- Kurikulum Sekolah Menengah Umum (1994), Landasan Program dan Pengembangan (1993). Jakarta : Depdikbud.
- Nugroho Notosusanto & Yusmar Basri (1980) *Sejarah Nasional Indonesia*, 3 Jilid Untuk SMA. Jakarta : Depdikbud.
- R.M. Sutjipto Wirjosuparto. (1960). *Sedjarah Indonesia Djilid II. Abad ke-XVI Sampai Sekarang.* Buku Peladjaran Sedjarah Untuk

- S.M.A. Bag. A.B.C dan Sekolah jang Sederajat Djakarta : Indira.
- R. Moh. Ali. (1963). *Pengantar Ilmu Sedjarah Indonesia*. Djakarta : Bharata
- Siti Waridah Q. dkk. (1997). *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*. Untuk SMU Berdasarkan Kurikulum GBPP 1994. 3 Jilid Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Sri Wanto A. Wijoyo, dkk. (1996) *Pegangan Belajar Sejarah*. Kurikulum 1994. 3 Jilid. Jakarta : PT Galaxy Puspa Mega.

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PELAJARAN SEJARAH

Nina Febriana

1 Pendahuluan

Untuk mengetahui asal-usul terciptanya sesuatu seseorang memerlukan bukti-bukti nyata yang dapat dipercaya. Seseorang juga memerlukan sejarah atau riwayatnya terlebih dahulu. Dan ini sangat perlu, karena tanpa adanya "Sejarah atau riwayat" tentang sesuatu hal, maka darimana dan bagaimana mungkin kita mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya terjadi dan hal-hal apa sajakah yang dapat kita ambil sebagai hikmat dan juga hal-hal apa sajakah yang dapat kita lakukan sebagai langkah lebih lanjut agar sesuatu tersebut dapat dijadikan sebagai sesuatu yang berguna serta dijadikan sebagai suatu pengalaman yang berharga. Sekaligus untuk menumbuhkan rasa sayang dan memiliki sehingga akan dapat memberikan motivasi kepada kita untuk selalu mengingat dan menjaganya. Seperti pepatah yang mengatakan "Tidak kenal maka tak sayang". Bila pengenalan dan pemahaman akan sejarah ini kurang, maka akan dapat memungkinkan seseorang atau sesuatu bangsa itu lupa akan siapakah ia dan nenek moyangnya sendiri. Akibatnya ia tidak akan pernah memiliki rasa bangga dan tekad untuk lebih maju. Oleh karena itulah kita harus mengetahui sejarah.

Ilmu sejarah adalah ilmu yang menceritakan mengenai asal mula terjadinya sesuatu peristiwa. Di dalam ilmu sejarah, terdapat banyak

hal yang dapat dijadikan contoh, pedoman, serta sebagai Pandangan terhadap perkembangan yang akan dihadapi di masa-masa yang akan datang. Adanya ilmu sejarah diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pola berpikir dan perkembangan tingkat pola pikir. Sajaah juga merupakan suatu hal yang mendasar. Sebagai sesuatu yang mendasar, sebaiknya dapat dipelajari dan dijadikan terapan bagi kegiatan manusia untuk dapat mengetahui langkah-langkah perkembangan. Hingga saat ini pelajaran sejarah tetap dijadikan sebagai mata pelajaran disekolah karena dengan adanya pelajaran sejarah diharapkan generesi muda sebagai generasi penerus bangsa dapat mencontoh dan menerapkan ilmu sejarah yang bermanfaat bagi perkembangan bangsa.

2 *Persepsi Pelajar Terhadap Pelajaran Sejarah*

Pelajar adalah generasi penerus bangsa, yang menentukan langkah-langkah apa sajakah yang dapat ditempuh demi kelangsungan suatu pembangunan. Langkah-langkah tersebut tentu saja yang berguna dan bermutu. Untuk dapat menentukan jalan mana yang harus ditempuh diperlukan adanya pedoman mengenai hal-hal apa sajakah yang perlu dilaksanakan. Dengan demikian, kita wajib untuk mengetahui sejarah terlebih dahulu. Hal ini merupakan suatu manfaat mengapa pelajaran sejarah diberikan kepada para pelajar. Dengan adanya pelajaran sejarah, para pelajar dapat mengetahui peradaban kebudayaan bangsa-bangsa di dunia, pola pikir masyarakat pada zaman dahulu, perjuangan para pahlawan, sehingga pada akhirnya kita dapat mengetahui apa sebenarnya tujuan dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan. Dari peristiwa-peristiwa sejarah seseorang dapat mengerti hal-hal mana sajakah yang harus dicontoh serta diteladani dalam usaha untuk meningkatkan diri pribadi yang nantinya juga dijadikan sebagai acuan untuk "bergerak".

Di era yang modern saat ini, segala sesuatu terjadi dimana saja pastilah sangat berbeda dengan peristiwa sejarah pada zaman dahulu. Bahkan saat ini remaja lebih suka terhadap sesuatu yang bersifat "instant". Begitu pula berlaku bagi para pelajar, baik dalam pola berfikirnya; maupun cara pelaksanaannya. Dalam menerima pelajaran, siswa saat ini cenderung suka menerima penjelasan dari guru dengan

jelas, tepat, dan tanpa bertele-tele dan menginginkan segala sesuatunya serba praktis. Hal ini sangatlah berbeda dengan keadaan orang tua kita dahulu. Dimana untuk mendapatkan sesuatu benar-benar diperlukan adanya kerja keras termasuk cara belajarnya. Hal ini disebabkan karena fasilitas masih terbatas. Sedangkan saat ini semua fasilitas sudah tersedia. Perkembangan ini akibat pengaruh dari berbagai macam perkembangan yang terjadi lebih mudah dan praktis.

Dengan adanya perkembangan seperti ini, maka siswa diharapkan dapat lebih aktif dalam menerima pelajaran begitu pula dengan guru. Guru diharapkan saat ini tidak hanya sebagai informator terus menerus yang hanya menerangkan dari awal hingga akhir bab pelajaran, tetapi seorang guru juga harus berfungsi sebagai fasilitator. Dengan guru sebagai fasilitator maka dalam hal ini siswa diharapkan dapat lebih aktif. Siswa tidak hanya mendengarkan, mencatat, dan menghafalkan pelajaran saja tetapi juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis sehingga nantinya pengetahuan menjadi lebih luas. Dan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentu saja seorang siswa harus membaca terlebih dahulu. Dengan demikian, secara tidak langsung tiap-tiap siswa telah dapat memahami pelajaran. Dan guru tidak menerangkan pelajaran secara lengkap, hanya pokok-pokoknya. Tetapi dalam hal ini, apabila siswa tidak dapat bersikap aktif maka peran guru sejarah sebagai fasilitator tidak dapat berfungsi. Ini dapat diterapkan pada pelajaran seperti halnya pelajaran sejarah.

Saya sendiri telah merasakan bagaimana peran guru sejarah sebagai fasilitator. Dan ini sangat bermanfaat bagi saya. Karena dalam hal ini saya harus membaca terlebih dahulu mengenai materi yang akan dibicarakan; lalu sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana persepsi pelajar terhadap pelajaran sejarah dan bagaimana guru sejarah yang dapat menciptakan suasana menyenangkan serta dapat pula meningkatkan semangat belajar bagi siswa sehingga siswa tidak menganggap bahwa pelajaran sejarah adalah pelajaran yang bersifat hafalan dan menjadi momok. Bagi saya pribadi, sebagai seorang pelajar merasakan menyenangkan atau tidaknya pelajaran sejarah untuk dipelajari tergantung kepada guru yang mengajar. Apabila guru yang mengajar membosankan, maka pelajaran tersebut menjadi tidak menyenangkan. Ada buktinya apabila seorang guru

dalam mengajar diselingi oleh humor, akan tetapi jangan sampai humor tersebut mengganggu pelajaran. Ada kalanya apabila diselingi dengan humor, apa yang diterangkan oleh guru dapat lebih mudah diterima oleh murid dan gampang diingat. Karena siswa terkadang lebih mudah mengingat sesuatu yang menyenangkan/lucu. Sehingga secara tidak langsung akan ingat terhadap pelajaran tersebut. Dan seorang guru dalam mengajar hendaknya memahami kemampuan siswanya serta dapat mengetahui situasi kelas dalam membawakan pelajaran sejarah ke dalam nuansa baru yang lebih menarik dan juga menghubungkan peristiwa-peristiwa sejarah tersebut dengan peristiwa dan kondisi saat ini sehingga murid dapat "terajak" untuk menggali lebih jauh pengetahuan ilmu sejarah yang didapat, bukannya "diajak" sehingga dengan demikian murid dapat memiliki motivasi yang lebih mantap dan nantinya murid dapat benar-benar membutuhkan sejarah serta dengan mempelajari sejarah seperti itu, secara otomatis guru dalam mengajar dapat membuat siswa berfikir kritis dan rasional karena sebelum mereka menerima pelajaran sejarah, mereka terlebih dahulu sudah tertarik dengan cara dan penampilan guru dalam mengajar. Untuk mempelajari pelajaran tersebut maka siswa tidak akan merasa bosan dan enggan.

Ilmu sejarah yang diberikan kepada para pelajar dapat digunakan sebagai pembanding antara masa dahulu dan masa sekarang yang mana pembangunannya lebih kompleks dan sangat berbeda dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Untuk itu dalam mempelajari sejarah diperlukan adanya kerjasama antara murid dan guru untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang mendukung pengajaran ilmu sejarah bagi para pelajar. Bila ada kerjasama yang baik antara murid dan guru, secara tidak langsung murid akan tertarik dan menyukai pelajaran sejarah yang merupakan pendidikan dasar yang perlu diketahui oleh generasi muda. Dengan demikian diperlukan pula adanya guru pembimbing yang benar-benar memahami sejarah. Tidak hanya guru sejarah yang menerangkan ilmu sejarah yang tertulis pada buku paket saja, tapi lebih dari itu ada baiknya menerangkan ilmu sejarah yang lebih luas lagi. Sehingga para pelajar dapat lebih luas pula pandangannya terhadap ilmu sejarah.

3 *Simpulan dan Saran*

3.1 *Simpulan*

Ilmu sejarah adalah ilmu yang menceritakan cerita-cerita masa lalu. Ilmu sejarah sangat dibutuhkan setiap orang, karena dengan ilmu sejarah kita dapat mengerti segala perkembangan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan. Untuk itu, ilmu sejarah sangat penting dipelajari oleh generasi penerus bangsa. Akan tetapi sebagian besar para pelajar menganggap bahwa pelajaran ilmu sejarah itu membosankan karena bersifat hafalan. Agar pelajaran dapat mengena didalam pikiran para pelajar dan dijadikan sebagai ilmu untuk berfikir kritis dan rasional dalam menghadapi pembangunan agar lebih maju, diperlukan adanya kerjasama yang baik antara guru sejarah sebagai pembimbing dan para pelajar.

3.2 *Saran*

Ada pepatah mengatakan "pengalaman adalah guru terbaik" dan sejarah adalah suatu pengalaman yang sangat berharga bagi suatu bangsa terutama bagi generasi muda bangsa.

Kerjasama yang baik antara guru dan murid dapat tercapai bila guru dapat memahami ilmu yang akan diajarkannya kepada para pelajar dengan baik dan berwawasan sangat luas serta mengetahui situasi dan kondisi siswanya dalam memahami materi pelajaran. Selain itu, para pelajar juga harus dapat memahami bahwa Pelajaran Sejarah sangat perlu dipelajari agar tidak mengulangi kesalahan pada zaman dahulu dan juga ilmu sejarah dapat dijadikan ilmu acuan untuk berfikir rasional menghadapi masa depan.

UPAYA STANDARIDISASI KOMPETENSI GURU SEJARAH

Diana Nomida Musnir

1 Pendahuluan

Bahwa pendidikan sejarah merupakan unsur penting dalam pendidikan anak bangsa nampaknya sudah tidak ada dan tidak akan ada yang meragukan. Hal ini dibuktikan dengan sudah cukup banyak pendapat para tokoh terkait yang sempat terangkat kepermukaan dan berterima. Namun di sisi lain, yaitu sisi pengajaran sejarah, khususnya dari produk pembelajaran, sampai dengan waktu ini tidak kurang-kurangnya keluhan keprihatinan dari berbagai pihak yang menuntut segera adanya perbaikan yang mendasar.

Kita semua meyakini bahwa sampai saat ini keberhasilan pembelajaran suatu mata pelajaran masih terkait erat dengan kualitas guru. Dalam hal pembelajaran sejarah, kita telah mendengar dan menyaksikan betapa keadaan ketidakberdayaan guru Sejarah dalam menjalankan fungsinya. Namun satu hal yang barangkali kita seyogyanya menyadari adalah bahwa ketidakberdayaan guru Sejarah itu bukanlah karena kesalahan guru sejarah itu sendiri mengingat pendidikan merupakan kinerja bersistem yang secara sinergis dan kolaboratif menuju pencapaian tujuan bersama dari seluruh komponen sistem.

Dalam upaya pemberdayaan guru Sejarah, mungkin sudah tiba waktunya untuk mewujudkan tanggung jawab bersama para pihak

yang terkait, khususnya menggugah dan memanfaatkan kesediaan para pakar terkait untuk dapat dan mau duduk bersama, melihat dengan jernih secara terbuka masalah yang sesungguhnya, dan selanjutnya memberikan kontribusi kepakarannya masing-masing terhadap upaya pemecahan masalah pembelajaran Sejarah ini. Sehubungan dengan kualitas guru secara lebih khusus, mungkin sudah waktunya dilakukan upaya bersama bagi seluruh pakar terkait untuk menetapkan standardisasi kompetensi guru Sejarah. Makalah ini mencoba mengajukan alternatif model upaya tersebut yang mengacu kepada rumusan esensi masalah sebagai berikut.

Upaya mensinergikan visi kesejarahan para ahli sejarah visi kesejarahan para sejarawan visi kependidikan para ahli pendidikan, dan pesan-pesan pendidikan dari UUD serta Undang-undang di bawahnya, ke dalam suatu kompetensi pembelajaran dan pendidikan sejarah bagi guru mata pelajaran sejarah yang pengembangannya dilaksanakan di LPTK.

2 *Keadaan Guru Sejarah Saat Ini*

Telah disadari bahwa pembelajaran sejarah sesungguhnya juga untuk berbagai mata pelajaran yang lain, masih mengandung kelemahan-kelemahan yang mendasar. Sampai dengan waktu ini pula, sasaran pertama penyebab adanya kelemahan ini adalah pihak pengajar atau gurunya. Sasaran kedua adalah penghasil guru atau LPTK. Banyak sudah para pihak yang sudah berhasil, baik secara terbuka maupun tidak, melemparkan kekecewaannya kepada guru dengan berbagai dalih yang kalau dicermati berakar pada bentuk arogansi disiplin atau arogansi lembaga masing-masing. Mereka tampak begitu yakin bahwa pendapat mereka itu memiliki kebenaran mutlak. Jarang diantara mereka yang dapat melihat secara jernih permasalahan yang sesungguhnya sehingga dapat menemukan letak penyebab yang mendasar dari munculnya kelemahan tersebut.

Dalam keadaan negara seperti yang sekarang ini, sasaran yang paling empuk sebagai sumber kesalahan adalah memang guru dan LPTK. Namun, kalau siapapun mau jujur serta arif mengamati dan menganalisis masalahnya secara sistematis sistemik, lebih-lebih bila yang bersangkutan memahami benar arti penting sinergi semua pihak

dan lembaga yang terkait dalam pemecahan masalah manusia dan kemanusiaan, maka semangat pengkambinghitaman guru dan LPTK tersebut tidak perlu terjadi dan bahkan memalukan kalau tidak dapat dikatakan sebagai memalukan karena hal itu tidak lebih dari pada aktualisasi arogansi disiplin dan atau arogansi kelembagaan serta melepas bagian tanggungjawabnya baik sebagai warga bangsa, lebih-lebih lagi sebagai warga masyarakat intelektual (masyarakat berpikir).

Guru dan LPTK adalah produk bangsa dan atau sistem kebangsaan serta sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya. LPTK dan guru memang belum pernah mendapat perhatian yang memadai dalam seluruh rentang waktu kemerdekaan Indonesia. Guru dan LPTK dituntut habis-habisan untuk berperan dan berbuat yang terbaik bagi pendidikan anak bangsa, namun profesi guru dan kehidupan LPTK tidak cukup mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang sejalan dengan tuntutan tersebut. Guru dan LPTK masing-masing adalah makhluk dan lembaga yang dinomorduakan oleh masyarakat oleh lembaga-lembaga lain, dan mungkin juga oleh pemerintah atau setidak-tidaknya oleh sejumlah cukup banyak orang-orang di pemerintahan. Guru dan LPTK pada waktu ini sangat mungkin merupakan faktor pendidikan yang paling lemah dan paling buruk, namun kelemahan dan atau keburukan itu tidak dapat diartikan sebagai yang paling bersalah, apalagi kalau dikatakan yang paling bertanggungjawab. Siapa sesungguhnya yang paling bertanggungjawab terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia ini? Semua yang arif, berakal, berpendidikan dan mampu berfikir sistemik pasti sudah tahu jawabannya. Yang jelas, jawabannya pasti dan harus bukan guru dan LPTK, karena guru dan LPTK bukanlah sistem utuh yang mandiri dan berdiri sendiri. Tidakkah?

Dilihat atau ditimbang dari era atau prioritas kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai bangsa dan negara yang relatif muda setelah menempuh rentang penjajahan selama juga setengah abad, mungkin memang harus diterima adanya kenyataan bahwa pendidikan belum dijadikan faktor yang terdepan dalam pembangunan bangsa dan negara, walaupun hal itu sangat memprihatinkan. Namun bila mau berpikir hakiki konseptual filosofis semua akan sadar bahwa tumpuan harapan terhadap ketahanan berbangsa dan bernegara adalah pada

upaya pendidikan dalam arti yang luas, dan hal pendidikan yang mendasar dan fundamental tersebut pastilah hal pendidikan anak-anak bangsa.

Tidak ada satupun tokoh ataupun ahli langsung dapat menjadi tokoh atau ahli tanpa melalui periode pendidikan dasar dan umum, seperti halnya pula mereka tidak mungkin dapat langsung menjadi dewasa atau tua tanpa melalui masa bayi dan kanak-kanak. Pada periode kanak-kanak dan masa remaja yang sangat menentukan itu, andalan pendidikannya justru terletak pada orang tua dan guru yang rata-rata pendidikannya juga tidak tinggi dan mungkin memang tidak perlu tinggi-tinggi.

Ibu-ibu di dalam keluarga dan guru-guru di sekolah dasar dan menengah yang sederhana, yang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan konseptual yang mungkin diajukan oleh para ahli, baik ahli iptek, ahli-ahli pendidikan, ahli penelitian, apalagi ahli kurikulum dan atau ahli-ahli kurikulum bidang studi, termasuk bidang studi sejarah justru menjadi penentu-penentu keberhasilan pendidikan anak-bangsa.

Pada waktu ini, guru-guru adalah penerima hujatan dan cemoohan yang paling tidak dapat menjawab atau membalas apa yang dituduhkan kepadanya. Mereka begitu kecil dan begiu empuk untuk dijadikan bulan-bulanan sasaran organsi disiplin dan kelembagaan lain serta orang-orang yang justru mempunyai kemampuan berfikir intelektual yang jauh lebih tinggi.

Namun, adakah di dunia ini negara maju yang tidak disertai oleh kemajuan pendidikan, khususnya kemajuan guru-gurunya dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya. Untuk mendapat guru yang baik bukanlah menunggu kelahirannya, melainkan harus dididik, dilatih, dan dibina dengan fasilitas dan akomodasi yang memadai dalam arti yang seluas-luasnya. Siapa yang bertanggung jawab untuk mendidik, melatih, membina dan memfasilitasi guru. Jawabnya entah berada di mana. Sebagian jawabannya mestinya harus dapat muncul di forum simposium yang sangat terhormat dari mulia yang sedang kita jalani sekarang ini.

3 *Keadaan Guru Sejarah yang Diharapkan*

Terkait dengan harapan pengembangan kualitas dan kuantitas guru GBHN (TAP MPR No. II/1988, Bab IV: Pendidikan) menyatakan bahwa :

"Pendidikan dan pembinaan guru serta tenaga pendidikan lainnya pada semua jenjang dan jenis pendidikan di dalam dan di luar sekolah perlu ditingkatkan dan diselenggarakan secara terpadu untuk menghasilkan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu dan dalam jumlah yang memadai, serta perlu terus ditingkatkan pengembangan karier dan kesejahteraannya termasuk pemberian penghargaan bagi guru dan tenaga pendidikan lain yang berprestasi."

Pada bagian III Bab 20 (mengenai Kebijaksanaan dan langkah) tentang guru, Keppres No. 13 tahun 1989 menyatakan :

"Menata kembali sistem pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya agar mampu menyediakan guru dan tenaga kependidikan yang bermutu dan dalam jumlah yang memadai sesuai dengan keperluan berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Disamping itu akan dilakukan usaha penyempurnaan, perencanaan, pengangkat, penempatan, pembinaan karir, dan peningkatan kemampuan Profesional guru serta tenaga kependidikan lainnya."

Selanjutnya, Kep.Men. P dan K No. 046/U/1990 menetapkan tentang adanya dan fungsi Forum Koordinasi Penanganan Sistem Pengadaan, dan Pengembangan Tenaga Kependidikan antara lain berbunyi :

Forum Koordinasi Penanganan Sistem Pengadaan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan (SPPTK) merupakan forum konsultasi instansi terkait di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kotamadya dalam penanganan masalah yang berkenaan dengan berbagai aspek dan tahap proses pengadaan pendayagunaan peminan dan pengembangan tenaga kependidikan

Di sisi lain, terkait dengan fungsi pendidikan sejarah, para pakar menyatakan bahwa pendidikan sejarah mempunyai fungsi fundamental dalam pendidikan nasional. Sejarah nasional merupakan sumber inspirasi dan aspirasi anak bangsa dalam pembangunan dan etos kerja bangsa.

Dengan fungsi pendidikan sejarah seperti tersebut program pendidikan sejarah bagi anak bangsa dituntut untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sistematis, dan sistemik. Dengan demikian, pengingkaran terhadap ketiga prinsip ini akan menyebabkan terjadinya bias tujuan pendidikan sejarah yang mendasar.

Ditinjau dari sisi kurikulum, Hasan (1996) memaparkan bahwa kurikulum mata pelajaran sejarah harus memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan berbagai dimensi kemampuan individunya yang sesuai dengan sifat yang terkandung dalam isi materi sejarah, cara berfikir sejarah, dan keterampilan proses sejarah yang dapat digunakan pada waktu yang bersangkutan berfungsi penuh sebagai warga masyarakat. Kurikulum tersebut harus memberi kesempatan pada siswa untuk mempelajari dan belajar dari peristiwa sejarah untuk kehidupan mereka pada saat sekarang dan masa mendatang. Kurikulum sejarah tersebut terus mampu mengembangkan kualitas manusia Indonesia masa mendatang, yaitu (1) semangat yang kuat (2) kemampuan berfikir baik yang bersifat proaktif maupun reaktif (3) memiliki kemampuan mencari, memilih, menerima, mengolah, dan memanfaatkan informasi melalui berbagai media, (4) mengambil inisiatif, (5) tingkat kreativitas yang tinggi, dan (6) kerjasama yang tinggi.

Dari seluruh paparan di atas tampak bahwa pendidikan sejarah merupakan salah satu tumpuan harapan pendidikan yang mendasar bagi anak bangsa. Selanjutnya, terhadap seluruh harapan tersebut tentu saja dituntut adanya upaya pencapaian. Namun sampai waktu ini, bentuk mekanisme kerja pencapaian harapan tersebut tampaknya belum ada atau belum jelas adanya. Dengan demikian perlu atau wajib diadakan atau diperjelas keberadaannya. Makalah ini mencoba untuk menawarkan alternatif dasar kerja para pihak yang terkait sesuai dengan keahlian dan tingkat kepakaran masing-masing sebagai berikut :

- 1) Para ahli Sejarah diharapkan untuk bisa menyarikan nilai-nilai kesejarahan universal (global) yang perlu ditanamkan pada anak didik (selaku manusia warga dunia dengan fungsi manusia sebagai pemecah masalah hidup dan kehidupannya) sekaligus

memberikan rambu-rambu dan atau contoh upaya/mekanisme kerja penanamannya terhadap anak didik.

- 2) Para sejarawan diharapkan agar dapat menyarikan nilai-nilai kesejarahan Indonesia (*nasionalisme*) yang perlu ditanamkan kepada anak didik dalam rangka membentuk nasionalisme anak didik dan sekaligus memberikan rambu-rambu atau contoh upaya/mekanisme penanamannya.
- 3) Para ahli pendidikan diharapkan dapat mengintegrasikan visi kesejarahan universal (bagi anak dunia) dan visi kesejarahan intelektual (bagi anak bangsa Indonesia) agar dapat diinternalisasikan ke dalam diri anak didik secara proposional dan bertanggung jawab.
- 4) Guru, sebagai ujung tombak upaya penginternalisasian pesan-pesan visi kesejarahan Universal dan visi kesejarahan nasional yang masing-masing telah dapat dipertanggungjawaban keberadaannya oleh masing-masing ahlinya, melaksanakan tugas pembelajaran bagi anak didik secara edukatif penuh, menggunakan bahan ajar Sejarah beserta perlengkapan yang sudah teruji di dan atau Puskur serta dan atau Pusbuk.
- 5) LPTK membangun dan mengembangkan kemampuan guru (calon guru) untuk memfungsikan dirinya selaku agen penginternalisasi pesan-pesan kesejarahan universal maupun nasional kepada anak didik.

4 Sinergi Upaya Standardisasi Kompetensi Guru Sejarah

Mungkin perlu benar-benar dicanangkan, disosialisasikan, dan disadari dahulu oleh para pihak terkait, khususnya para pakar terkait, dan lebih khususnya para ahli sejarah, sejarawan, dan ahli pendidikan bahwa konsep pembelajaran dan atau pendidikan sejarah sudah dengan sendirinya merupakan sistem yang bersifat sinergis. Konsep ahli sejarah tidak mencakup keahlian bidang pendidikan, dan sebaliknya konsep ahli pendidikan tidak mencakup keahlian bidang sejarah. Konsep ahli pendidikan tidak mencakup pula keahlian bidang kesejarahan seperti yang dimiliki sejarawan, dan sebaliknya, sejarawan

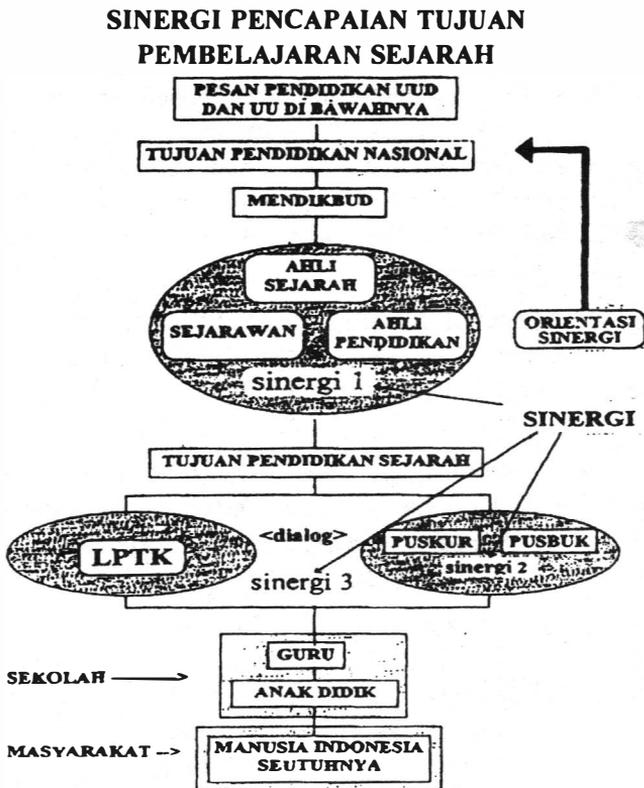
mempunyai keahlian dan visi serta kepentingan yang berbeda terhadap hubungan kesejarahan dan pendidikan. Singkatnya, ketiga kelompok pakar termaksud, yaitu ahli sejarah, sejarawan, dan ahli pendidikan, tidak ada yang secara utuh menguasai bidang garapan yang terkandung dalam konsep pembelajaran dan atau pendidikan sejarah. Pembelajaran dan atau pendidikan sejarah bukan bidang garap hanya ahli sejarah, sejarawan, atau ahli pendidikan. Keahlian pembelajaran ahli atau pendidikan sejarah menuntut lebih dari hanya keahlian ahli sejarah, sejarawan, dan ahli pendidikan. Pembelajaran dan atau pendidikan sejarah membutuhkan ketiganya yang berpadu, bukan yang terpisah sendiri-sendiri. Pembelajaran dan atau pendidikan sejarah bukanlah campuran visi ketiga kelompok ahli terkait, melainkan perpaduan, bahkan perpaduan yang bersinergi. Dengan demikian, tiga kelompok keahlian termaksud juga tidak berhak dan tidak pernah berhak untuk mengklaim bahwa keahlian masing-masing lebih penting atau diperlukan atau harus dominan dalam konsep pembelajaran dan atau pendidikan sejarah. Ketiganya harus bersatu, bersinergi, dan bahu-membahu mempertanggungjawabkan kepakaran masing-masing dalam kerja bersama pembangunan sumber daya manusia dalam proses pendidikan sejarah. Dalam pembelajaran dan atau pendidikan sejarah tidak ada peluang moral, apalagi hak moral untuk berarogansi bahwa bidang ilmu masing-masing lebih penting, lebih menentukan, atau lebih berguna bagi pendidikan anak bangsa dalam pembentukan visi kesejarahan. Ketiganya perlu dan harus bersinergi.

Disisi lain, dalam kerja senyatanya di lapangan, yang sesungguhnya melaksanakan pembelajaran dan atau pendidikan sejarah bukanlah para ahli tersebut, melainkan guru, yang justru tidak tergolong ahli. Gurulah yang paling menentukan berhasil tidaknya pembelajaran dan atau pendidikan sejarah. Guru, yang tergolong praktisi dan bukan ahli tersebut, menjadi tumpuan harapan para ahli untuk menanamkan semua gagasan para ahli termaksud bagi penanganan anak didik dalam bidang pendidikan sejarah. Coba kita bayangkan, semua gagasan konseptual para ahli yang memang ahli harus dicerna dan direalisasikan ke dalam program kerja nyata di lapangan oleh guru yang justru bukan ahli. Pertanyaannya adalah di mana, dari mana, dan bagaimanakah kemampuan guru sebagai ujung

tombak pembawa pesan para ahli terkait ditumbuhkan ? Jawabnya tidak lain di dan oleh LPTK.

Masalah selanjutnya adalah dapatkah LPTK mengorganisasikan seluruh tuntutan para ahli yang terkait dengan pembelajaran dan atau pendidikan sejarah termaksud ke dalam kurikulum pendidikan guru sejarah. Jawabnya, mungkin saja kalau LPTK termaksud memang dikembangkan dan dibangun serta difasilitasi secara benar dan memadai. Sudahkah hal ini terjadi atau benar-benar terjadi ? Jawabnya masih perlu kita cari dan renungi.

Para ahli sejarah sejarawan, dan ahli pendidikan memang harus bersinergi dalam garapan pembelajaran dan atau pendidikan sejarah. Dalam bentuk skema, alternatif sistem sinergi termaksud adalah sebagai berikut :



Setelah sinergi visi ahli sejarah, sejarawan dan ahli pendidikan, sinergi 1, seperti termaksud terjadi terumuskan dan tersedia, maka langkah selanjutnya adalah hasil sinergi 1 tersebut diserahkan kepada LPTK untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pengintegrasian ke dalam sistem kerja kurikulum LPTK dalam rangka transfer kompetensi kesejarahan dan pembelajaran kesejarahan ke dalam diri calon guru yang terkait melalui berbagai diskusi dan pelatihan penanganan pembelajaran. Untuk guru-guru yang sudah berada di lapangan dapat dilakukan hal yang sama melalui jalur Puskur-Pusbuk-Ditmenum-Kanwil-MGNT, baik sebagai kegiatan rutin terstruktur maupun pada kegiatan-kegiatan penataran dan pelatihan, bekerjasama pula dengan pihak LPTK.

Hasil sinergi 1 juga harus dikirimkan kepada Puskur dan Pusbuk untuk pengembangan dan penyempurnaan implementasi kurikulum dan isi buku ajar agar antara keduanya benar-benar dapat terjadi sinergi 2.

Hasil sinergi 1 perlu juga disampaikan kepada semua pihak dalam struktur dirjen (?) dan sesjen (?) untuk dijadikan referensi dalam membuka dan melaksanakan dialog berlanjut dengan pihak LPTK agar dapat terjadi sinergi 3. Bukankah selama ini kedua pihak termaksud berjalan sendiri-sendiri dan bahkan mengukuhkan program masing-masing secara terpisah?. Aneh !?

Pengaturan kerjasama antara LPTK dan lembaga-lembaga di bawah dirjen (?) dan sesjen (?) ini perlu dikembangkan tersendiri dan bukan menjadi kewenangan kerja simposium ini.

Selanjutnya, hasil sinergi 1 harus digunakan untuk mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem standarisasi kompetensi guru sejarah. Dalam merumuskan standar kompetensi guru tersebut perlu pula dicapai kesepakatan konseptual bagi Mata Pelajaran Sejarah dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kapasitas dan bobot masing-masing ranah. Artinya untuk mata pelajaran sejarah perlu adanya penegasan porsi dan proporsi antar ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotor atau ranah-ranah pengetahuan, sikap, ketrampilan. Porsi dan proporsi ranah pada pembelajaran matematika, fisika, bahasa Inggris mestinya masing-masing berbeda dengan pembelajaran sejarah

- 2) Kepastian fokus dan bobot fokus kerja pembelajaran. Artinya, pembelajaran sejarah mengutamakan proses atau produk pembelajaran. Hal ini perlu ditegaskan, karena selama ini, keberhasilan pembelajaran sejarah diidentikkan dengan keberhasilan menjawab pertanyaan atau soal-soal yang cenderung pada penguasaan bahan (fakta dan konsep) dan hanya pada tataran kognitif saja, dan itupun hanya sebagian besar mencapai tingkat kompetensi C1 dan C2, sedikit C3 dan C4 dalam taksonomi Bloom. Bila fokus kerja pembelajaran sejarah adalah pada proses yang dirancang untuk menumbuhkembangkan visi kesejarahan pada anak didik, maka sistem evaluasi, baik formatif maupun sumatif seperti yang selama ini terjadi digunakan menjadi tidak relevan, kalau tidak dapat dikatakan mengacaukan atau bahkan menghancurkan hakikat sasaran dan tujuan pembelajaran sejarah itu sendiri. Tidakkah ?
- 3) Kepastian hubungan tujuan dan bahan ajar. Artinya bagi pembelajaran dan atau pendidikan sejarah ditegaskan antara "tujuan menentukan bahan" atau "bahan menentukan tujuan" dan juga bobot hubungannya. Hal ini perlu ditekankan karena selama ini, dalam pengembangan Tujuan Instruksional Khusus (TIK), guru-guru sengaja dilatih menurunkan TIK hanya mengacu pada bahan ajar (fakta dan konsep sejarah) dan bukan mengacu pada tujuan dan tujuan-tujuan antara yang diturunkan dan tujuan yang dipesankan oleh UUD dan Undang-undang serta yang dipesankan (masih pada tataran terasakan namun belum terumuskan) oleh para ahli terkait.
- 4) Rambu-rambu sinergi ketiga kepastian. Artinya, agar hal yang menjadi gagasan para ahli yang sudah tersinergi tersebut benar-benar dapat direalisasikan ke dalam pembelajaran dan atau pendidikan sejarah, maka harus tersedia contoh-contoh bagi ketiga ketentuan kepastian termaksud di atas sehingga penafsiran kerja dan pengerjaan tugas bagi unsur-unsur di bawahnya, mempunyai tingkat kejelasan dan kepastian sedemikian sehingga tidak akan terjadi kesalahan tafsir dalam pelaksanaan kerja seperti yang selama ini dan masih terus terjadi.

Keempat hal tersebut akan sangat memberi warna kepada karakteristik kompetensi guru sejarah dalam melaksanakan tindak pembelajarannya.

Akhirnya, kepada guru-guru yang telah terkena upaya standardisasi inilah yang nanti dapat diharapkan untuk menghasilkan pembelajaran sejarah seperti yang selama ini dirindukan oleh semua pihak yang terkait.

Kapankah itu tercapai ? Hanya waktu saja yang dapat membuktikannya.

5 Penutup

Apapun yang kita rancang sebagai upaya perbaikan menuju peningkatan mutu guru Sejarah sangat ditentukan oleh adanya tindak lanjut yang berkelanjutan sesudah selesainya simposium ini. Harapan jadinya kelanjutan upaya para pihak terkait setelah simposium ini sangat tergantung oleh komitmen yang bersangkutan. Adakah dan akan berfungsikah komitmen itu !? Semoga.

Jakarta, Desember 1997

Lampiran I

RUMUSAN HASIL SIMPOSIUM PENGAJARAN SEJARAH

1 Pengantar

Simposium Pengajaran Sejarah dengan tema : "Pengajaran Sejarah: Kearifan Masa Lalu Untuk Menyongsong Tantangan Abad ke-21" diselenggarakan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, bertempat di Hotel Ria Diani, Cibogo, dari tanggal 25 s.d. 28 Desember 1997. Simposium diikuti oleh 60 orang peserta yang berasal dari lingkungan pendidikan tinggi, pusat penelitian, departemen terkait, tokoh masyarakat peminat sejarah dan budaya, dan undangan khusus.

Pendidikan Sejarah merupakan suatu "*Conditio Sine Qua Non*" baik dalam pengembangan kurikulum sosialisasi kurikulum dan dalam menyediakan "*professional support*" bagi tenaga pendidik sejarah yang ada di sekolah. Simposium bertujuan menghasilkan suatu pemikiran baru mengenai pengajaran sejarah dalam kurikulum dilandasi suatu pemikiran filosofis, kebijakan-kebijakan yang mencerminkan kordinasi yang baik antar instansi terkait di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

2 Hasil

Setelah mendengar arahan Direktur Jenderal Kebudayaan pada acara pembukaan, serta membaca dan membahas makalah-makalah :

- "Pengajaran Sejarah Sebagai Wahana Pendidikan Nilai dan Sikap" dari Prof Dr. H. Soediarto
- "Dasar Filosofis Kurikulum Sejarah: Bersifat Lebih Khusus" dari Prof Dr. Taufik Abdullah
- "Dasar Filosofis Kurikulum Sejarah : Bersifat Lebih Umum" dari Dr. Hafid Abbas
- "Landasan Filosofis Kurikulum Pengajaran Sejarah (SMU): Tantangan dan Harapan" dari Prof Dr. Rochiyati Wiriaatmaja
- "Kebijakan Filosofis Kurikulum Pengajaran Sejarah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan" dari Prof. Dr. S. Hamid Hasan
- "Penulisan Buku Teks Sejarah : Kriteria dan Permasalahannya" dari Prof Dr. Helius Sjamsuddin
- "Upaya Standarisasi Kompetensi Guru Sejarah" dari Dr. Diana Nomida Musnir
- "Persepsi Pelajar Terhadap Pelajaran Sejarah" dari Nina Febriana

para peserta Simposium Pengajaran Sejarah mencapai kesepakatan berupa (1) temuan, (2) simpulan, dan (3) rekomendasi sebagai berikut :

1) Temuan

- a. Pelajaran sejarah jangan terlalu banyak dibebani dengan pendidikan nilai
- b. Kurangnya kordinasi antar instansi terkait dalam penyusunan kebijakan kurikulum dan pelaksanaannya di lingkungan Depdikbud
- c. Mata pelajaran sejarah tidak diujikan secara nasional (EBTANAS) sehingga tidak dianggap penting oleh pelajar
- d. Buku Pedoman yang mendukung pelaksanaan pengajaran (GBPP) kurang tersebar
- e. Masih terdapat banyak kesalahan faktual dalam buku-buku ajar
- f. Buku ajar kurang menarik dalam hal : isi maupun penampilannya
- g. Guru banyak yang tidak menguasai materi dengan perkembangan ilmu sejarah mutakhir dan berpenampilan kurang menarik
- h. MSI sebagai organisasi profesi sejarawan sampai saat ini belum banyak berperan dalam meningkatkan pengajaran sejarah

2) Simpulan

Simposium ini telah berhasil menghimpun sejumlah pemikiran yang bersifat filosofis, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum, dan upaya perbaikan pengajaran sejarah.

3) Rekomendasi

- a. Kebijakan baru tentang pendidikan sejarah perlu dikembangkan yang berkaitan erat dengan posisi kurikulum Pendidikan Sejarah, termasuk kelengkapan sarana dan prasarana, termasuk penggunaan media audio visual, serta hasil evaluasi belajarnya. EBTANAS perlu untuk mata pelajaran sejarah (pendidikan sejarah) mengingat pengetahuan sejarah diperlukan dalam pembinaan kepribadian yang berwawasan kebangsaan adalah persyaratan sebagai warga negara.
- b. Perlu ditingkatkan kerjasama yang lebih fungsional antara Balitbang Dikbud (PUSBANGKURANDIK) dengan Ditjen Kebudayaan dan Ditjen Dikdasmen beserta lembaga pendidikan tinggi (universitas dan IKIP) dalam mengembangkan kurikulum
- c. Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan sejarah, hendaknya ditempuh proses pembelajaran yang interaktif sesuai dengan tingkat kematangan berfikir siswa.
- d. Sudah saatnya meninjau kembali kurikulum Pendidikan Sejarah mengingat adanya tuntutan baru pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan yang berorientasi kepada dinamika sosial dan kebutuhan masa depan serta perubahan peta politik dunia pada saat sekarang serta perspektif perkembangan masyarakat, negara, dan dunia di masa mendatang (abad ke-21)

- e. Perlu disusun buku standar tentang Pendidikan Sejarah yang bersifat Nasional bagi semua jenjang pendidikan, sebagai landasan pengembangan kurikulum sejarah.
- f. Perlu adanya perbedaan materi ajar sejarah secara berjenjang dan berkelanjutan.
- g. Dalam penulisan buku teks sejarah harus mengikuti kriteria sebagai berikut : (1) substansi faktual harus benar, (2) penafsiran harus logis dan sistematis, (3) penyajian dan retorik sesuai dengan jenjang usia, (4) pengenalan konsep-konsep sejarah perlu menggunakan pendekatan spiral, (5) harus menggunakan GBPP yang berlaku, dan (6) penampilan fisik buku harus menarik disertai ilustrasi gambar atau foto yang informatif.
- h. Perlu disosialisasikan GBPP dan Buku III 1994 yang telah diperbarui yang memuat deskripsi tentang materi sejarah, metode pembelajarannya, cara evaluasinya, harus disampaikan kepada guru sejarah.
- i. MSI hendaknya lebih berperan untuk memberikan informasi mengenai substansi sejarah sebagai hasil penelitian dalam bentuk yang lebih disederhanakan.

Cibogo, 27 Desember 1997

Tim Perumus

Panitia Perumus

1. Drs. M. Habib Moestopo (Ketua)
2. Drs. Mohammad Iskandar M.Hum. (Wakil Ketua)
3. Prof. Dr. Edi Sedyawati (Anggota)
4. Dr. Anhar Gonggong (Anggota)
5. Prof. Dr. Rochiyati Wirjaatmaja (Anggota)
6. Dr. Djamil Ibrahim (Anggota)
7. Prof. Dr. S. Hamid Hasan (Anggota)
8. Prof. Dr. Helius Sjamsuddin (Anggota)
9. Dr. Hafid Abbas (Anggota)
10. Drs. Susanto Zuhdi, M.Hum (Anggota)
11. Drs. Wasino, M.Hum (Anggota)

